



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.279-Huk/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu ditetapkan dan dimutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 315 Tahun 2023 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 315);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang Nomor 500.12.11/1558/IKP tanggal 19 Juni 2025 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Karawang tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 25 Juli 2025



DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program, Indikator Kegiatan, serta Indikator Sub Kegiatan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang						
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik						
	Indikator Program : Presentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	- Jumlah Layanan Hubungan Media	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	- Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS

	- Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
2.	Program Aplikasi Informatika						
	Indikator Program : Persentase Organisasi Perangkat daerah yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	a. Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	a. Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	c. Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	d. Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	e. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	f. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS

3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral						
	Indikator Program : Prosentase statistik sektoral yang diterbitkan	Bidang Statistik Sektoral	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Bidang Statistik Sektoral	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	a. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Bidang Statistik Sektoral	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	b. Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Bidang Statistik Sektoral	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	c. Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Bidang Statistik Sektoral	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	d. Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Bidang Statistik Sektoral	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
4.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi						
	Indikator Program : Tingkat Keamanan Informasi	Bidang Persandian	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Bidang Persandian	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	a. Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Bidang Persandian	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Persandian	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS

1	Aplikasi Kepemerintahan Berbasis Web di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
2	Aplikasi Layanan Publik Berbasis Web di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
3	Lokasi Pemasangan Wifi Publik di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
4	Rekap Laporan Pengaduan Melalui Aplikasi Tangkar per kecamatan di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
5	Rekap Laporan Pengaduan Melalui Aplikasi Tangkar per OPD/Instansi di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
6	Rekapitulasi Media Cetak Lokal di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
7	Rekapitulasi Media Online Lokal di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
8	Rekapitulasi Media Penyiaran Radio Swasta di Kabupaten Karawang Tahun 2024	LPPL Sturada Pangkal Perjuangan	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
E. Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang							
Kepala Sub Bagian Keuangan							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK

4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id , website www.lpse.karawangkab.go.id, serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							
1	Informasi tentang profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 Diskominfo	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		

7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
9	Agenda surat Dinas Komunikasi dan Informatika	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Diskominfo	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Diskominfo	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Diskominfo	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Diskominfo	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Diskominfo	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Diskominfo	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Diskominfo	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Dinas Komunikasi dan Informatika	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Diskominfo	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Diskominfo	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
F. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang							
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Newsroom di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2022 Diskominfo	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sturada Pangkal Perjuangan	LPPL Sturada Pangkal Perjuangan	Tahun 2019 Diskominfo	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 319 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Sturada Pangkal Perjuangan	LPPL Sturada Pangkal Perjuangan	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
3	Standart Operasional Prosedur (SOP) Penyiaran LPPL Sturada Pangkal Perjuangan Kab. Karawang	LPPL Sturada Pangkal Perjuangan	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lembaga Penyiaran Publik Sturada Kab. Karawang Tahun 2023	LPPL Sturada Pangkal Perjuangan	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2017 Diskominfo	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2022 Diskominfo	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 315 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
4	Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 487.24/Kep.317-Huk/2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
5	Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 800.22/Kep.177-Huk/2023 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tanggap Karawang (Tangkar) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR)	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
6	Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 487.24/Kep.318-Huk/2023 Tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK

7	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku Atasan PPID Nomor 487.24/Kep.44-Huk/2023 tentang Visi dan Misi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
8	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku Atasan PPID Nomor 487.24/Kep.39-Huk/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
9	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku Atasan PPID Nomor 487.24/Kep.40-Huk/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengujian Konsekuensi Informasi Publik	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
10	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku Atasan PPID Nomor 487.24/Kep.41-Huk/2023 tentang Standar Operasional Prosedur tentang Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
11	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku Atasan PPID Nomor 487.24/Kep.42-Huk/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
12	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku Atasan PPID Nomor 487.24/Kep.43-Huk/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
13	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku Atasan PPID Nomor 487.24/Kep.27-Huk/2023 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2023	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK

14	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku Atasan PPID Nomor 487.24/Kep.28-Huk/2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan (DIK) Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
15	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Newsroom di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2022 Diskominfo	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2017 Diskominfo	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2022 Diskominfo	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 315 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
4	Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 487.24/Kep.317-Huk/2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
5	Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 800.22/Kep.177-Huk/2023 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tanggap Karawang (Tangkar) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR)	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK

6	Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 487.24/Kep.318-Huk/2023 Tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
7	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku Atasan PPID Nomor 487.24/Kep.44-Huk/2023 tentang Visi dan Misi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
8	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku Atasan PPID Nomor 487.24/Kep.39-Huk/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
9	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku Atasan PPID Nomor 487.24/Kep.40-Huk/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengujian Konsekuensi Informasi Publik	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
10	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku Atasan PPID Nomor 487.24/Kep.41-Huk/2023 tentang Standar Operasional Prosedur tentang Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
11	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku Atasan PPID Nomor 487.24/Kep.42-Huk/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
12	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku Atasan PPID Nomor 487.24/Kep.43-Huk/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK

13	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku Atasan PPID Nomor 487.24/Kep.27-Huk/2023 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2023	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
14	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku Atasan PPID Nomor 487.24/Kep.28-Huk/2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan (DIK) Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
15	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

1	Standart Operasional Prosedur (SOP) Nomor 067/Kep.176/Diskominfo Tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah Melalui Media Massa	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

1	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2018 Diskominfo	√	√		BK
2	Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/Kep. 357-Huk/2024 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK

Kegiatan : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah

1	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2018 Diskominfo	√	√		BK
2	Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/Kep. 357-Huk/2024 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

1	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2018 Diskominfo	√	√		BK
2	Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/Kep. 357-Huk/2024 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

1	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2018 Diskominfo	√	√		BK
2	Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/Kep. 357-Huk/2024 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√	BK

Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

1	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2018 Diskominfo	√	√		BK
2	Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/Kep. 357-Huk/2024 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK

Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

1	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2018 Diskominfo	√	√		BK
2	Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/Kep. 357-Huk/2024 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Bidang Aplikasi Informatika	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

1	Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	Bidang Statistik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
2	Surat Keputusan Bupati Nomor 13/Kep.533-Huk/2023 Tahun 2023 Tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Statistik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2 /Kep.168-Huk/2024 tentang Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Kabupaten Karawang	Bidang Statistik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
4	Surat Keputusan Bupati Nomor 800.22/Kep. 564 - Huk/2022 tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Karawang	Bidang Statistik	Tahun 2022 Diskominfo	√	√		BK

5	Surat Keputusan Bupati Nomor 800.22/Kep. 319 - Huk/2023 tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Karawang	Bidang Statistik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
6	Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2 /Kep. 248 - Huk/2024 tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Karawang	Bidang Statistik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
7	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang Nomor 067/Kep.123 -Stat/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen Pengelolaan Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Statistik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
8	Keputusan Kepala Dinas dan Informatika Kabupaten Karawang Nomor 067/Kep.124 - Stat/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen Kualitas Data Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Statistik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
9	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang Nomor 067/Kep.121 -Stat/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen Arsitektur Data Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Statistik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
10	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang Nomor 067/Kep.125 -Stat/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen Data Induk dan Data Referensi Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Statistik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
11	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang Nomor 067/Kep.122 -Stat/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Interoperabilitas Data Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Statistik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK

12	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang Nomor 067/Kep.126 -Stat/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen Basis Data Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Statistik	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK
13	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Bidang Statistik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Bidang Statistik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
Sub Kegiatan : Membangun Metadata Statistik Sektoral							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Bidang Statistik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Bidang Statistik	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							
Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bidang Persandian	Tahun 2022 Diskominfo	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi, Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Persandian	Tahun 2022 Diskominfo	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Nomor 345 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bidang Persandian	Tahun 2023 Diskominfo	√	√		BK

4	Peraturan Bupati Karawang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tata Nasakah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bidang Persandian	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
5	Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2 /Kep.179-Huk/2024 tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Persandian	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
6	Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 100.3.3.2/Kep.473-Huk/2024 Tahun 2024 tentang Standar Autentifikasi Pada Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Persandian	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
7	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Persandian	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Persandian	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Bidang Persandian	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karawang Nomor 555.1 /Kep.32-eGov/2021 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Persandian	Tahun 2021 Diskominfo	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Persandian	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK

Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Operasional Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Operasional Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Persandian	Tahun 2024 Diskominfo	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program, Indikator Kegiatan, serta Indikator Sub Kegiatan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang						
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						
	Indikator Program : Skor LPPD	Bagian Tata Pemerintahan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	Indikator Program : Persentase fasilitasi kesejahteraan rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	Indikator Program : Persentase Implementasi Kerjasama Daerah	Bagian Kerjasama Daerah	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	Indikator Program : Persentase raperda yang diusulkan	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN						
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bagian Tata Pemerintahan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Layanan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						

	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
BAGIAN HUKUM							
	3. Indikator Kegiatan : Persentase Penataan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
BAGIAN KERJASAMA DAERAH							
	4. Indikator Kegiatan : Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Bagian Kerjasama Daerah	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bagian Kerjasama Daerah	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Bagian Kerjasama Daerah	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Bagian Kerjasama Daerah	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS

2.	Program Perekonomian dan Pembangunan						
	Indikator Program : Persentase Realisasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Seleksi/Tender	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	Indikator Program : Persentase Realisasi Fisik Pembangunan Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	Indikator Program : Predikat Opini Audit BUMD	Bagian Perekonomian dan SDA	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA						
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Laporan Kebijakan Perekonomian Daerah	Bagian Perekonomian dan SDA	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian Perekonomian dan SDA	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bagian Perekonomian dan SDA	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Bagian Perekonomian dan SDA	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						
	3. Indikator Kegiatan : Persentase Laporan Pengelolaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						

	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA						
	4. Indikator Kegiatan : Persentase Layanan Kebijakan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian dan SDA	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Bagian Perekonomian dan SDA	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Bagian Perekonomian dan SDA	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Bagian Perekonomian dan SDA	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
	BAGIAN ORGANISASI						
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Laporan Penataan Organisasi	Bagian Organisasi	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS

	- Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN						
	3. Indikator Kegiatan : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS

	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	4. Indikator Kegiatan : Persentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	5. Indikator Kegiatan : Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	BAGIAN UMUM						

6. Indikator Kegiatan : Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
Indikator Sub Kegiatan :						
- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
7. Indikator Kegiatan : Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
Indikator Sub Kegiatan :						
- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
- Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
8. Indikator Kegiatan : Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
Indikator Sub Kegiatan :						
- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
- Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
- Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
- Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS

	9. Indikator Kegiatan : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	10. Indikator Kegiatan : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	10. Indikator Kegiatan : Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Mebel yang dipelihara	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS

	11. Indikator Kegiatan : Persentase Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	- Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang						
1	SKOR LPPD Kabupaten	Bagian Tata Pemerintahan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
2	Persentase kinerja pengelolaan barang/jasa dan Opini Audit BUMD	Bagian Barang dan Jasa serta Bagian Perekonomian dan SDA	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
3	Nilai Akip SETDA	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
C.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Bagian Barang dan Jasa	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Bagian Barang dan Jasa	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Bagian Barang dan Jasa	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
D.	Daftar Data Statistik Sektoral Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang						
1	Daftar BUMD di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Perekonomian dan Kesra	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
2	Jumlah Paket yang Masuk Ke SIRUP di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Barang dan Jasa	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
3	Peraturan Bupati yang Ditetapkan Pemerintah di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS

4	Peraturan Daerah yang Ditetapkan Pemerintah di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
5	Rekapitulasi Bantuan Intensif untuk Guru Ngaji/TPA/RA/DTA/Mts dan Amil di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
6	Rekapitulasi Kerja Sama Daerah di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Kerjasama Daerah	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
7	Rekapitulasi Pengadaan Kendaraan Dinas di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
8	Rincian MoU/ PKS Antar Daerah di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Kerjasama Daerah	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
9	Rincian MoU/PKS Pihak Ketiga di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Kerjasama Daerah	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
10	Rekapitulasi Penerimaan Bea Siswa Karawang Cerdas bagi Siswa SMA di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
11	Rekapitulasi Penerimaan Bea Siswa Karawang Cerdas bagi Siswa SMK di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
E.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang						
	Kepala Sub Bagian Keuangan						
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Bagian Barang dan Jasa	Tahun 2025 Sekretariat Daerah	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Bagian Umum dan Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian						
1	Informasi tentang profil Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang (ASN dan Non ASN)	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
3	Agenda Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang setiap bulan pada tahun berjalan	Bagian Umum dan Bagian Protokol dan Komunkasi Pimpinan	Tahun 2025 Sekretariat Daerah	√	√		BK
4	Agenda Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang	Bagian Umum dan Bagian Protokol dan Komunkasi Pimpinan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Bagian Organisasi	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
9	Agenda surat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan						
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2025 Sekretariat Daerah	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2025 Sekretariat Daerah	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2025 Sekretariat Daerah	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2025 Sekretariat Daerah	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2025 Sekretariat Daerah	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2025 Sekretariat Daerah	√	√		BK

	6. Anggaran Kas 2025	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2025 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2021 Sekretariat Daerah	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2025 Sekretariat Daerah	√	√		SS

8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Bagian Kerjasama Daerah	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
F.	Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang						
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN							
Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan							
Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan							

1	Surat Perintah Sekertaris Daerah Karawang Nomor 800.11.1.1/2505/Tapem Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pameran APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia)	Bagian Tata Pemerintahan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan							
1	Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2 /Kep. 519 -Huk/2023 Tahun 2024 Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Tata Pemerintahan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bagian Tata Pemerintahan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah							
1	Surat Keputusan Bupati Nomor 800.22/Kep. 71-Huk/2023 Tahun 2023 Tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Karawang	Bagian Tata Pemerintahan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	Surat Keputusan Bupati Nomor 800.22/Kep. 73-Huk/2023 Tahun 2023 Tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang	Bagian Tata Pemerintahan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 800.22/Kep. 89-Huk/2023 Tahun 2023 Tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Bagian Tata Pemerintahan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
BAGIAN HUKUM							
Kegiatan : Fasilitas dan Koordinasi Hukum							
Sub Kegiatan : Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
3	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
4	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
5	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
6	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penataan Penyelenggaraan Pergudangan	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
7	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

8	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
9	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
10	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
11	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
12	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
13	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Bangunan Gedung	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
14	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
15	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Perumdam	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
16	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
17	Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
18	Peraturan Bupati Karawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kendaraan Dinas Sewa	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

19	Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Peningkatan Mutu dan Manajemen Satuan Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
20	Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
21	Peraturan Bupati Karawang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
22	Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
23	Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 442 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
24	Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
25	Peraturan Bupati Karawang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan Atas Pokok Pajak Dan Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

26	Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
27	Peraturan Bupati Karawang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2024/2025	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
28	Peraturan Bupati Karawang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 442 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
29	Peraturan Bupati Karawang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Online atau Dalam Jaringan	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
30	Peraturan Bupati Karawang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
31	Peraturan Bupati Karawang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Objek Pajak Sawah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
32	Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
33	Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Pengelola Islamic Centre	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
34	Peraturan Bupati Karawang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

35	Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan 2025	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
36	Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
37	Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
38	Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
39	Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Kemudahan Penanaman Modal Langsung Konstruksi	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
40	Peraturan Bupati Karawang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Program Karawang Cerdas	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
41	Peraturan Bupati Karawang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 327 Tahun 2023 tentang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
42	Peraturan Bupati Karawang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Dewan Kebudayaan Daerah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
43	Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
44	Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemngelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
45	Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

46	Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
47	Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
48	Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan/Hadiah Kepada Wajib Pajak Daerah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
49	Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan dan Koreksi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
50	Peraturan Bupati Karawang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
51	Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
52	Peraturan Bupati Karawang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kampung Kerukunan	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
53	Peraturan Bupati Karawang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
54	Peraturan Bupati Karawang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Untuk Melakukan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
55	Peraturan Bupati Karawang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

56	Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
57	Peraturan Bupati Karawang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
58	Peraturan Bupati Karawang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
59	Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
60	Peraturan Bupati Karawang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
61	Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
62	Peraturan Bupati Karawang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
63	Peraturan Bupati Karawang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
64	Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

65	Peraturan Bupati Karawang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
66	Peraturan Bupati Karawang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Wisata	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
67	Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
68	Peraturan Bupati Karawang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
69	Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
70	Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
71	Peraturan Bupati Karawang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Remunerasi Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

72	Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Bidang Kesehatan	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
73	Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Bidang Kesehatan	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
74	Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
75	Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Prosedur Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
76	Peraturan Bupati Karawang Nomor 60 Tahun 2024 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
77	Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
78	Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
79	Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
80	Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
81	Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

82	Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan barang Milik Daerah Melalui Sewa	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
83	Peraturan Bupati Karawang Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
84	Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Peningkatan dan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
85	Peraturan Bupati Karawang Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Inspektorat Award	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
86	Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
87	Peraturan Bupati Karawang Nomor 71 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
88	Peraturan Bupati Karawang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
89	Peraturan Bupati Karawang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

90	Peraturan Bupati Karawang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
91	Peraturan Bupati Karawang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pengembangan Hortikultura	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
92	Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
93	Keputusan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 serta Panitia Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
94	Keputusan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Laporan Keuangan semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
95	Keputusan Bupati Karawang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tim Verifikasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
96	Keputusan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tim Verifikasi dan Validasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

97	Keputusan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Tim Verifikasi dan Validasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga/Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
98	Keputusan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Koordinator Kabupaten, Koordinator Kecamatan, dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
99	Keputusan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
100	Keputusan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
101	Keputusan Bupati Karawang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Bupati Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
102	Kaputusan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, ROB, Abrasi, Longsor dan Pergerakan Tanah Serta Puting Beliung/Angin Kencang di Wilayah Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
103	Keputusan Bupati Karawang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
104	Keputusan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

105	Keputusan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Tim Fasilitasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
106	Keputusan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tim Fasilitasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
107	Keputusan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Tim Fasilitasi Kebijakan Energi dan Air Tingkat Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
108	Keputusan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
109	Keputusan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
110	Keputusan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Standar Harga Satuan dan Analisa Standar Belanja Kabupaten Karawang Tahun 2025	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
111	Keputusan Bupati Karawang Nomor 69 Tahun 2024 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
112	Keputusan Bupati Karawang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Jalan	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
113	Keputusan Bupati Karawang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sistem Limbah Domestik	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
114	Keputusan Bupati Karawang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

115	Keputusan Bupati Karawang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
116	Keputusan Bupati Karawang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
117	Keputusan Bupati Karawang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Tim Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
118	Keputusan Bupati Karawang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
119	Keputusan Bupati Karawang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
120	Keputusan Bupati Karawang Nomor 131 Tahun 2024 tentang Bapak Asuh Anak Stunting Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
121	Keputusan Bupati Karawang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
122	Keputusan Bupati Karawang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan se-Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
123	Keputusan Bupati Karawang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
124	Keputusan Bupati Karawang Nomor 145 Tahun 2024 tentang Tim Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

125	Keputusan Bupati Karawang Nomor 153 Tahun 2024 tentang Tim Inventarisasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
126	Keputusan Bupati Karawang Nomor 154 Tahun 2024 tentang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
127	Keputusan Bupati Karawang Nomor 155 Tahun 2024 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
128	Keputusan Bupati Karawang Nomor 164 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Jaminan Kesehatan Menyeluruh/Universal Health Coverage Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
129	Keputusan Bupati Karawang Nomor 168 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Data Statistik Sektor Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
130	Keputusan Bupati Karawang Nomor 169 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
131	Keputusan Bupati Karawang Nomor 170 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2023 Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
132	Kaputusan Bupati Karawang Nomor 174 Tahun 2024 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
133	Keputusan Bupati Karawang Nomor 178 Tahun 2024 tentang Sahabat Riset dan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

134	Keputusan Bupati Karawang Nomor 181 Tahun 2024 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
135	Keputusan Bupati Karawang Nomor 188 Tahun 2024 tentang Tim Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
136	Keputusan Bupati Karawang Nomor 190 Tahun 2024 tentang Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
137	Keputusan Bupati Karawang Nomor 191 Tahun 2024 tentang Tim Fasilitasi Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
138	Keputusan Bupati Karawang Nomor 200 Tahun 2024 tentang Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
139	Keputusan Bupati Karawang Nomor 219 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tanggap Karawang (Tangkar) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat! (SP4N LAPOR!) Pemerintah Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
140	Keputusan Bupati Karawang Nomor 221 Tahun 2024 tentang Tim Pengawasan Perizinan Terpadu Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
141	Keputusan Bupati Karawang Nomor 229 Tahun 2024 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Karawang Periode 2021-2026	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

142	Keputusan Bupati Karawang Nomor 232 Tahun 2024 tentang Tim Project Implementation Unit Program Hibah Air Limbah Setempat di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
143	Keputusan Bupati Karawang Nomor 239 Tahun 2024 tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
144	Keputusan Bupati Karawang Nomor 240 Tahun 2024 tentang Tim Penyelenggaraan Sekolah Perempuan Jawa Barat Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
145	Keputusan Bupati Karawang Nomor 242 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu Terbaik Tingkat Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
146	Keputusan Bupati Karawang Nomor 248 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
147	Keputusan Bupati Karawang Nomor 270 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
148	Keputusan Bupati Karawang Nomor 273 Tahun 2024 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
149	Keputusan Bupati Karawang Nomor 273 Tahun 2024 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
150	Keputusan Bupati Karawang Nomor 276 Tahun 2024 tentang Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

151	Keputusan Bupati Karawang Nomor 278 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Periode Masa Jabatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
152	Keputusan Bupati Karawang Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Periode Masa Jabatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa di Wilayah Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
153	Keputusan Bupati Karawang Nomor 282 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
154	Keputusan Bupati Karawang Nomor 283 Tahun 2024 tentang Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman dari Pengembang Perumahan Kepada Pemerintah Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
155	Keputusan Bupati Karawang Nomor 285 Tahun 2024 tentang Tim Verifikasi, Validasi dan Evaluasi Usulan Hibah Permohonan Bantuan Pemasangan Perangkat Elektronik Traffic Law Enforcement/Etle Tahap II	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
156	Keputusan Bupati Karawang Nomor 289 Tahun 2024 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pasar Cibuaya di Wilayah Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
157	Keputusan Bupati Karawang Nomor 295 Tahun 2024 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
158	Keputusan Bupati Karawang Nomor 299 Tahun 2024 tentang Pengelola Akun Sepakat Dalam Rangka Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

159	Keputusan Bupati Karawang Nomor 303 Tahun 2024 tentang Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security And Vulnerability Atlas Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
160	Keputusan Bupati Karawang Nomor 304 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
161	Keputusan Bupati Karawang Nomor 308 Tahun 2024 tentang Panitia Pelaksana Peringatan Hari Koperasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
162	Keputusan Bupati Karawang Nomor 309 Tahun 2024 tentang Penghargaan Kepada Koperasi Berprestasi Dalam Rangka Hari Koperasi ke 77 Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
163	Keputusan Bupati Karawang Nomor 312 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
164	Keputusan Bupati Karawang Nomor 319 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
165	Keputusan Bupati Karawang Nomor 325 Tahun 2024 tentang Tim Penjamin Mutu Penyelenggaraan Pelatihan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
166	Keputusan Bupati Karawang Nomor 339 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina Kampung Kerukunan Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
167	Kaputusan Bupati Karawang Nomor 340 Tahun 2024 tentang Penetapan Perumahan Resinda Sebagai Kampung Kerukunan	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

168	Keputusan Bupati Karawang Nomor 345 Tahun 2024 tentang Tim Verifikasi Penghargaan Seniman dan Kebudayaan Daerah Di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
169	Keputusan Bupati Karawang Nomor 352 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
170	Keputusan Bupati Karawang Nomor 358 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
171	Keputusan Bupati Karawang Nomor 359 Tahun 2024 tentang Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
172	Keputusan Bupati Karawang Nomor 360 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Revisi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2026	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
173	Keputusan Bupati Karawang Nomor 366 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
174	Keputusan Bupati Karawang Nomor 368 Tahun 2024 tentang Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Karawang Periode 2024-2029	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
175	Keputusan Bupati Karawang Nomor 379 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Kategori Penghargaan Inspektorat Award di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
176	Keputusan Bupati Karawang Nomor 383 Tahun 2024 tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

177	Keputusan Bupati Karawang Nomor 404 Tahun 2024 tentang Kompetisi Pekan Riset dan Inovasi Daerah 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
178	Keputusan Bupati Karawang Nomor 407 Tahun 2024 tentang Penilaian Potensi dan Kompetensi (Tallent Pool) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
179	Keputusan Bupati Karawang Nomor 433 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksanaan Desk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Secara Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Karawang	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
180	Keputusan Bupati Karawang Nomor 440 Tahun 2024 tentang Tim Asistensi Monitoring dan Evaluasi Karya Bhakti TNI di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
181	Keputusan Bupati Karawang Nomor 487 Tahun 2024 tentang Tim Perencanaan Obat Perbekalan Kesehatan Terpadu Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
182	Keputusan Bupati Karawang Nomor 491 Tahun 2024 tentang Tim Asisten Monitoring dan Evaluasi Bhakti Siliwangi Pola Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Karawang Tahun 2025	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
183	Keputusan Bupati Karawang Nomor 492 Tahun 2024 tentang Tim Asisten Monitoring dan Evaluasi Karya Bhakti TNI Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Karawang Tahun 2025	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
184	Keputusan Bupati Karawang Nomor 493 Tahun 2024 tentang Tim Asisten Monitoring dan Evaluasi Bhakti Siliwangi Pola TNI Manunggal Membangun Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Karawang Tahun 2025	Bagian Hukum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

[illegible]

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bagian Kerjasama Daerah	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Bagian Kerjasama Daerah	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Bagian Kerjasama Daerah	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM							
Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							
Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan							

1	Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 800.22/Kep.167-Huk/2022 Tahun 2022 Tentang Tim Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang	Bagian Administrasi Pembangunan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							
Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							
1	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor 020/1969/PBJ/2022 Tanggal 21 April 2022 Tentang Tim Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 800/Kep. 594 -Huk/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Karawang	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik							

1	Standar Operasional Prosedur Nomor 027/Kep.32-Huk/2021 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur dalam Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	Instruksi Bupati Karawang Nomor 020/6906/PBJ tanggal 29-12-2023 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM							
Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
BAGIAN ORGANISASI							
Kegiatan : Penataan Organisasi							
Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan							
1	Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Rengasdengklok Kabupaten Karawang Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Bagian Organisasi	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 74 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KELAS A PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Bagian Organisasi	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
33	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							
Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							
Sub Kegiatan : Fasilitas Keprotokolan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitas Komunikasi Pimpinan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN							
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
1	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.5 /Kep.4-huk/2024 tentang Tim Penyusun Evaluasi Rencana Strategis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.5 /Kep.7-huk/2024 tentang Tim Penyusun Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
3	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.5 /Kep.9-huk/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 dan Perubahan Tahun 2024	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

4	Keputusan Bupati Karawang Nomor 800.22 /Kep. 199-Huk/2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
5	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.5 /Kep.5-huk/2024 tentang Tim Penyusun Manajemen Risiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
6	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor :100.3.3.5/Kep.3-huk/2024 tentang Tim Pengelola Risiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
7	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 100.3.3.5/Kep.8-huk/2024 tentang Indikator Kinerja Individu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
8	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang nomor : 100.3.3.5/Kep.38-huk/2024 tentang Tim Pengelola Reformasi Birokrasi (Project Transformation Unit) Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
9	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
1	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.5 /Kep.6-huk/2024 tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
BAGIAN UMUM							
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 100,3,3,2 /Kep.58-huk/2024 tentang pembantu pengurus barang pengguna pada setda kabupaten karawang ta.2024	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor 100.3.3.5/kep. 13-huk/2024 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada lingkup setda	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 100,3,3,2 /Kep.58-huk/2024 tentang pembantu pengurus barang pengguna pada setda kabupaten karawang ta.2024	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor 100.3.3.5/kep. 13-huk/2024 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada lingkup setda	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 100,3,3,2 /Kep.58-huk/2024 tentang pembantu pengurus barang pengguna pada setda kabupaten karawang ta.2024	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor 100.3.3.5/kep. 13-huk/2024 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada lingkup setda	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 100,3,3,2 /Kep.58-huk/2024 tentang pembantu pengurus barang pengguna pada setda kabupaten karawang ta.2024	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor 100.3.3.5/kep. 13-huk/2024 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada lingkup setda	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 100,3,3,2 /Kep.58-huk/2024 tentang pembantu pengurus barang pengguna pada setda kabupaten karawang ta.2024	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor 100.3.3.5/kep.13-huk/2024 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada lingkup setda	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 100,3,3,2 /Kep.58-huk/2024 tentang pembantu pengurus barang pengguna pada setda kabupaten karawang ta.2024	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor 100.3.3.5/kep.13-huk/2024 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada lingkup setda	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Dinamis Pada SKPD							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Dinamis Pada SKPD	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan / Material							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitas Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitas Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 100,3,3,2 /Kep.58-huk/2024 tentang pembantu pengurus barang pengguna pada setda kabupaten karawang ta.2024	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor 100.3.3.5/kep. 13-huk/2024 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada lingkup setda	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel							

1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 100,3,3,2 /Kep.58-huk/2024 tentang pembantu pengurus barang pengguna pada setda kabupaten karawang ta.2024	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor 100.3.3.5/kep.13-huk/2024 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada lingkup setda	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 100,3,3,2 /Kep.58-huk/2024 tentang pembantu pengurus barang pengguna pada setda kabupaten karawang ta.2024	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor 100.3.3.5/kep.13-huk/2024 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada lingkup setda	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
1	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor 027/Kep.04-Huk/2023 tentang penunjuk pejabat pengadaan, Pejabat/Tim Pemeriksa hasil pekerjaan dan pejabat/Tim Pemeriksa administrasi hasil pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

Kegiatan : Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							
Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bagian Umum	Tahun 2024 Sekretariat Daerah	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program, Indikator Kegiatan, serta Indikator Sub Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang						
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						
	Indikator Program : Persentase dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD		Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran		Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Sub Bagian Program dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sub Bagian Program dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Sub Bagian Program dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Sub Bagian Program dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sub Bagian Program dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS

3. Indikator Kegiatan : Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Dilaksanakan		Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
Indikator Sub Kegiatan :						
- Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sub Bagian Program dan Keungan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
4. Indikator Kegiatan : Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD		Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
Indikator Sub Kegiatan :						
- Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
- Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
5. Indikator Kegiatan : Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
Indikator Sub Kegiatan :						
- Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
6. Indikator Kegiatan : Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Yang Dilaksanakan		Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
Indikator Sub Kegiatan :						
- Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
7. Indikator Kegiatan : Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kerja Sama Daerah		Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
- Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
8. Indikator Kegiatan : Persentase Fasilitas Tugas DPRD Yang Dilaksanakan		Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS

	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sub Bagian Program dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
2	Program Dukungan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
	Indikator Program : Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Sub Bagian Program dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Terbanyarkannya gaji dan tunjangan ASN	Sub Bagian Program dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Bagian Tata Usaha	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	- Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Bagian Tata Usaha	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	4. Indikator Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Bagian Rumah Tangga	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	- Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Bagian Rumah Tangga	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	- Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Bagian Rumah Tangga	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Bagian Rumah Tangga	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Bagian Rumah Tangga	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS

	- Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Sub Bagian Tata Usaha	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	- Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	Sub Bagian Rumah Tangga	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	5. Indikator Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	- Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub Bagian Rumah Tangga	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	- Terlaksananya Pengadaan Mebel	Sub Bagian Rumah Tangga	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	- Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Bagian Tata Usaha	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	- Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Bagian Rumah Tangga	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	- Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Bagian Rumah Tangga	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	- Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Bagian Tata Usaha	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	6. Indikator Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	- Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Sub Bagian Rumah Tangga	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Bagian Rumah Tangga	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	7. Indikator Kegiatan : Penataan Organisasi						
	- Jumlah Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sub Bagian Tata Usaha	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	9. Indikator Kegiatan : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						
	- Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sub Bagian Program dan Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS

	- Jumlah Penyediaan Dinas dan Atribut DPRD	Sub Bagian Tata Usaha	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	10. Indikator Kegiatan : Layanan Administrasi DPRD						
	- Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang						
1.	Persentase memfasilitasi Raperda Kabupaten Karawang	Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
C.	Daftar Data Statistik Sektoral Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang						
1	Daftar Ketua DPRD	Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
2	Banyaknya Produk Hukum DPRD	Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
3	Banyaknya Sidang Komisi di DPRD	Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
4	Banyaknya Sidang Pleno atau Paripurna di DPRD	Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
5	Daftar Anggota DPRD menurut Fraksi	Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
6	Daftar Anggota DPRD menurut Fraksi dan Jenis Kelamin	Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
7	Daftar Anggota DPRD menurut Komisi	Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
8	Daftar Anggota DPRD menurut Tingkat Pendidikan	Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
D.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang						
Kepala Sub Bagian Keuangan							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		BK

	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							
1	Informasi tentang profil Sekretariat DPRD Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		BK

5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
9	Agenda surat Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK

	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		BK
3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Sekretariat DPRD	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		SS

8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		BK
10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Sekretariat DPRD	√	√		BK

E. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Sub Kegiatan : Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

1	Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun. 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sub Kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2021 Sekretariat DPRD	√	√		BK
2	Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Karawang Nomor : 900.1.2.4/02/DPA/2025	Sub Bagian Umum	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sub Bagian Bagian Program dan Keuangan	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah							
1	Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun. 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sub Kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2021 Sekretariat DPRD	√	√		BK
2	Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Karawang Nomor : 900.1.2.4/02/DPA/2025	Sub Bagian Umum	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sub Kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran							
Sub Kegiatan : Pembahasan KUA dan PPAS							
1	Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun. 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sub Kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2021 Sekretariat DPRD	√	√		BK
2	Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Karawang Nomor : 900.1.2.4/02/DPA/2025	Sub Bagian Umum	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sub Bagian Program dan Keuangan	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							
1	Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun. 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sub Kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2021 Sekretariat DPRD	√	√		BK
2	Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Karawang Nomor : 900.1.2.4/02/DPA/2025	Sub Bagian Umum	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sub Bagian Program dan Keuangan	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembahasan APBD							

1	Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun. 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sub Kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2021 Sekretariat DPRD	√	√		BK
2	Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Karawang Nomor : 900.1.2.4/02/DPA/2025	Sub Bagian Umum	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sub Bagian Program dan Keuangan	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembahasan APBD Perubahan							
1	Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun. 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sub Kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2021 Sekretariat DPRD	√	√		BK
2	Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Karawang Nomor : 900.1.2.4/02/DPA/2025	Sub Bagian Umum	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sub Bagian Program dan Keuangan	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembahasan Pertanggungjawaban APBD							
1	Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun. 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sub Kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2021 Sekretariat DPRD	√	√		BK
2	Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Karawang Nomor : 900.1.2.4/02/DPA/2025	Sub Bagian Umum	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sub Bagian Program dan Keuangan	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
Kegiatan : Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							
Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Anggaran							
1	Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun. 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sub Kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2021 Sekretariat DPRD	√	√		BK
2	Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Karawang Nomor : 900.1.2.4/02/DPA/2025	Sub Bagian Umum	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sub Bagian Program dan Keuangan	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD							
Sub Kegiatan : Pendalaman Tugas DPRD							

1	Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun. 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sub Kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2021 Sekretariat DPRD	√	√		BK
2	Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Karawang Nomor : 900.1.2.4/02/DPA/2025	Sub Bagian Umum	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sub Bagian Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Publikasi dan Dokumentasi Dewan							
1	Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun. 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sub Kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2021 Sekretariat DPRD	√	√		BK
2	Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Karawang Nomor : 900.1.2.4/02/DPA/2025	Sub Bagian Umum	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sub Bagian Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
Kegiatan : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							
Sub Kegiatan : Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD							
1	Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun. 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sub Kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2021 Sekretariat DPRD	√	√		BK
2	Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Karawang Nomor : 900.1.2.4/02/DPA/2025	Sub Bagian Umum	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sub Bagian Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Reses							
1	Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun. 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sub Kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2021 Sekretariat DPRD	√	√		BK
2	Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Karawang Nomor : 900.1.2.4/02/DPA/2025	Sub Bagian Umum	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD							
Sub Kegiatan : Penyusunan Kode Etik DPRD							

1	Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun. 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sub Kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2021 Sekretariat DPRD	√	√		BK
2	Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Karawang Nomor : 900/Kep.01-Setwan/2024	Sub Bagian Umum	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
Kegiatan : Pembahasan Kerja Sama Daerah							
Sub Kegiatan : Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi							
1	Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun. 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sub Kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2021 Sekretariat DPRD	√	√		BK
2	Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Karawang Nomor : 900.1.2.4/02/DPA/2025	Sub Bagian Umum	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sub Bagian Penganggaran, Pengawasan dan Kerjasama	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
Kegiatan : Failitasi Tugas DPRD							
Sub Kegiatan : Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah							
1	Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun. 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sub Kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan	Tahun 2021 Sekretariat DPRD	√	√		BK
2	Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Karawang Nomor : 900.1.2.4/02/DPA/2025	Sub Bagian Umum	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sub Bagian Bagian Program dan Keuangan	Tahun 2025 Sekretariat DPRD	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
INSPEKTORAT KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Inspektorat Kabupaten Karawang						
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan						
	Indikator Program : Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Ketua Tim Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 Inspektorat	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Ketua Tim Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 Inspektorat	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Ketua Tim Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 Inspektorat	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Ketua Tim Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 Inspektorat	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Ketua Tim Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 Inspektorat	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Ketua Tim Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 Inspektorat	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan Desa	Ketua Tim Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 Inspektorat	√	√		SS
	- Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Ketua Tim Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 Inspektorat	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Kegiatan Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Kegiatan Pemeriksaan APIP	Ketua Tim Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 Inspektorat	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Ketua Tim Perencanaan	Tahun 2024 Inspektorat	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						

[illegible]

1	Informasi tentang profil Inspektorat Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Administrasi dan Umum	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Inspektorat (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Administrasi dan Umum	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Inspektorat setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Administrasi dan Umum	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Inspektorat	Sub Bagian Administrasi dan Umum	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Administrasi dan Umum	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Administrasi dan Umum	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Administrasi dan Umum	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Administrasi dan Umum	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		SS
9	Agenda surat Inspektorat	Sub Bagian Administrasi dan Umum	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Perencanaan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Perencanaan	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Perencanaan	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Perencanaan	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Perencanaan	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Perencanaan	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Perencanaan	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Perencanaan	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		BK
	7. Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Perencanaan	Tahun 2021 Inspektorat	√	√		SS
	8. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Perencanaan	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Evaluasi dan Pelaporan							
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Inspektorat	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 Inspektorat	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 Inspektorat	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 Inspektorat	√	√		BK

	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 Inspektorat	√	√		BK
3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Administrasi dan Umum	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Inspektur Pembantu Khusus	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Inspektorat	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		SS
6	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Administrasi dan Umum	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		SS
7	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Irban I,II,III,IV, Sus	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Irban I,II,III,IV, Sus	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Irban I,II,III,IV, Sus	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		BK

8	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Urban I,II,III,IV, Sus	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		SS
9	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Urban I,II,III,IV, Sus	Tahun 2025 Inspektorat	√	√		BK

F. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Inspektorat Kabupaten Karawang

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Perencanaan	Tahun 2022 Inspektorat	√	√		BK

Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja

1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2017 Inspektorat	√	√		BK

Sub Kegiatan : Reviu Laporan Keuangan

1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2017 Inspektorat	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengawasan Desa							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Perencanaan	Tahun 2022 Inspektorat	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Perencanaan	Tahun 2022 Inspektorat	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Inspektorat Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Perencanaan	Tahun 2021 Inspektorat	√	√		BK
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2011 Inspektorat	√	√		BK
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							
Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah							
1	Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lainnya	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Perencanaan	Tahun 2020 Inspektorat	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Perencanaan	Tahun 2022 Inspektorat	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Inspektorat Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Perencanaan	Tahun 2021 Inspektorat	√	√		BK
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							
Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi							
Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2010 Inspektorat				
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2022 Inspektorat	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2017 Inspektorat	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2022 Inspektorat	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2021 Inspektorat	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang						
1	Program Pengelolaan Pendidikan						
	Indikator Program : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	Indikator Program : Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	Indikator Program : Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	Indikator Program : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase SD terakreditasi A	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi SD	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	4. Indikator Kegiatan : Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi SD	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	5. Indikator Kegiatan : Iklim Keamanan SD	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	6. Indikator Kegiatan : Iklim Kebinekaan SD	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS

	7. Indikator Kegiatan : Iklim Inklusivitas SD	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS

	- Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	8. Indikator Kegiatan : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	9. Indikator Kegiatan : Persentase SMP terakreditasi A	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS

	10. Indikator Kegiatan : Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	11. Indikator Kegiatan : Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	12. Indikator Kegiatan : Iklim Keamanan SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	13. Indikator Kegiatan : Iklim Kebinekaan SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	14. Indikator Kegiatan : Iklim Inklusivitas SMP	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS

- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
- Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
- Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
- Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
- Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
- Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
- Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
- Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
- Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
- Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
- Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS

	- Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	15. Indikator Kegiatan : Angka partisipasi Kasar (APK) PAUD	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	16. Indikator Kegiatan : Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	17. Indikator Kegiatan : Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS

	18. Indikator Kegiatan : Persentase PKBM terakreditasi	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora				
2	Program Pengembangan Kurikulum						
	Indikator Program : Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
	Indikator Program : Persentase guru dan kepala sekolah bersertifikat	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora				

	Indikator Kegiatan : Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan						
	Indikator Program : Persentase satuan pendidikan terakreditasi	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
5	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra						
	Indikator Program : Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS

	Indikator Kegiatan : Persentase Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		
	- Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan						
	Indikator Program : Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Wirausaha Muda	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS

	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan						
	Indikator Program : Peningkatan prestasi olahraga	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase pembinaan olahraga pada satuan pendidikan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Persentase Pembinaan Atlet Muda (Amatir)	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS

	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	4. Indikator Kegiatan : Persentase Pembinaan Atlet Muda (Profesional)	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	5. Indikator Kegiatan : Persentase pembinaan olahraga rekreasi	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
8	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan						
	Indikator Program : Persentase Organisasi Pramuka yang dibina	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS

	- Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang						
1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
3	Cakupan pembinaan olahraga	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
C.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang						
	Urusan Pendidikan						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Usia Dini	Bidang PAUD dan DIKMAS	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan Dasar	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan Kesetaraan	Bidang PAUD dan DIKMAS	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
3	Peningkatan prestasi olahraga	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
D.	Daftar Data Berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang						
1	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS

E.	Daftar Data Statistik Sektoral Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang						
1	Jumlah Guru SD per kecamatan menurut status kepegawaian di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
2	Jumlah Guru SMP per kecamatan menurut status kepegawaian di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
3	Jumlah Kelulusan Siswa Tingkat SD SMP di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
4	Jumlah PKBM dan Pelaksanaan Kejar Paket A, Paket B dan Paket C di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
5	Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru pada Jenjang Pendidikan SD di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
6	Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru pada Jenjang Pendidikan SMP di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
7	Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru pada Jenjang Pendidikan TK di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
8	Rekapitulasi Cabang Olahraga Yang Dibina di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
9	Rekapitulasi Kondisi Ruang Kelas pada jenjang SMP di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
10	Rekapitulasi Kondisi Ruang Kelas pada Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
11	Rekapitulasi Organisasi Kepemudaan yang Dibina di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
12	Rekapitulasi Perolehan Medali Atlet di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
F.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang						
	Kepala Sub Bagian Keuangan						
	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						

1	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1	Informasi tentang profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK

3	Agenda Kerja Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 Disdikpora	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
9	Agenda surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disdikpora	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disdikpora	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disdikpora	√	√		BK

1	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disdikpora	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disdikpora	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disdikpora	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disdikpora	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK

5	Daftar serta Hasil Penelitian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Disdikpora	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disdikpora	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK

G.	Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karawang						
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							
Sub Kegiatan : Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembangunan Perpustakaan Sekolah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel Sekolah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK

Sub Kegiatan : Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Peningkatan Mutu dan Manajemen Satuan Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka dan Sekolah Menengah	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Peningkatan Mutu dan Manajemen Satuan Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka dan Sekolah Menengah	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Peningkatan Mutu dan Manajemen Satuan Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka dan Sekolah Menengah	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
2	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2 /Kep 2595-Huk/2024 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK

3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2018 Disdikpora	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							

1	Tata Cara Penerimaan Peserta Didik baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2024/2025	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Kelas Baru							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
Sub Kegiatan : Pembangunan Laboratorium							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel Sekolah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Peningkatan Mutu dan Manajemen Satuan Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka dan Sekolah Menengah	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK

2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Peningkatan Mutu dan Manajemen Satuan Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka dan Sekolah Menengah	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Peningkatan Mutu dan Manajemen Satuan Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka dan Sekolah Menengah	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
2	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2 /Kep 2595-Huk/2024 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Pada Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2018 Disdikpora	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2018 Disdikpora	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengembangan konten digital untuk pendidikan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan							

1	Tata Cara Penerimaan Peserta Didik baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2024/2025	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembangunan Ruang Kelas Baru							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/ atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendidikan Dasar	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel PAUD							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD							

1	Peraturan Bupati Nomor 348 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Berbentuk Taman Kanak-Kanak di Daerah	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2023 Disdikpora	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOP PAUD							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
1	Tata Cara Penerimaan Peserta Didik baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar Tahun Pelajaran 2024/2025	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
1	Peraturan Bupati Nomor 349 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Di Daerah	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2023 Disdikpora	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							
Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
Sub Kegiatan : Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
Sub Kegiatan : Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Peningkatan Mutu dan Manajemen Satuan Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka dan Sekolah Menengah	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Peningkatan Mutu dan Manajemen Satuan Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka dan Sekolah Menengah	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang GTK dan Kurikulum	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN							
Kegiatan : Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							
Sub Kegiatan : Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Kegiatan : Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							

Sub Kegiatan : Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA							
Kegiatan : Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang PAUD dan Dikmas	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							
Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar							
1	Surat Keputusan Bupati Nomor 420/Kep. 135-Huk/2023 Tahun 2023 Tentang Penetapan Seni Beladiri Pencak Silat Sebagai Ekstrakurikuler Wajib di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Sederajat di Kabupaten Karawang	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2023 Disdikpora	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi							
Sub Kegiatan : Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga							
Sub Kegiatan : Pengembangan Organisasi Keolahragaan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi							
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Tahun 2024 Disdikpora	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program, Indikator Kegiatan, serta Indikator Sub Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang						
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
	Indikator Progam : Persentase fasilitas kesehatan tingkat kabupaten yang terakreditasi	Kelompok Sub Substansi Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	Indikator Progam : Persentase rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	Indikator Progam : Presentasi balita gizi kurang	Kelompok Sub Substansi Gizi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	Indikator Progam : Persentase desa/kelurahan STBM	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Lingkungan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	Indikator Progam : Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (UHC)	Kelompok Sub Substansi Yankes Rujukan Dan Jaminan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	Indikator Progam : Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI	Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	Indikator Progam : Persentase ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	Indikator Progam : Persentase masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan kesehatan	Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	Indikator Progam : Persentase fasilitas kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kelompok Sub Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
	Indikator Progam : Persentase kasus gawat darurat yang tertangani	Kepala UPTD Kesehatan Khusus	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	Indikator Progam : Persentase Puskesmas melaksanakan sistem informasi kesehatan	Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Primer	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

	1. Indikator Kegiatan : Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Kelompok Sub Substansi Yankes Rujukan Dan Jaminan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	2. Indikator Kegiatan : Rasio puskesmas per satuan penduduk	Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Primer	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	3. Indikator Kegiatan : Rasio pustu per satuan penduduk	Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Primer	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	4. Indikator Kegiatan : Jumlah Puskesmas yang memiliki ketersediaan Obat Essensial	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kelompok Sub Substansi Yankes Rujukan Dan Jaminan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Primer	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Kelompok Sub Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Kelompok Sub Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kelompok Sub Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
	- Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kelompok Sub Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kelompok Sub Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Kelompok Sub Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

	- Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kelompok Sub Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kelompok Sub Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kelompok Sub Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kelompok Sub Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kelompok Sub Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kelompok Sub Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Kelompok Sub Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	Kelompok Sub Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Kelompok Sub Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kelompok Sub Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

- Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
- Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Primer	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
5. Indikator Kegiatan : Jumlah indikator SPM Bidang Kesehatan yang memenuhi target	Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Primer	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
6. Indikator Kegiatan : Jumlah bayi/balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
7. Indikator Kegiatan : Jumlah bayi/balita gizi buruk yang ditangani	Kelompok Sub Subtansi Gizi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
8. Indikator Kegiatan : Jumlah desa/kelurahan STBM	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Lingkungan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
9. Indikator Kegiatan : Jumlah masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan kesehatan	Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
10. Indikator Kegiatan : Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Kelompok Sub Substansi Yankes Rujukan Dan Jaminan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
11.Indikator Kegiatan : Jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dan Jaminan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
12.Indikator Kegiatan : Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Primer	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
13. Indikator Kegiatan : Jumlah Labkesda yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kelompok Sub Substansi Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
14. Indikator Kegiatan : Jumlah rumah sakit yang terakreditasi	Kelompok Sub Substansi Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
15. Indikator Kegiatan : Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Kelompok Sub Substansi Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
16. Indikator Kegiatan : Jumlah kasus gawat darurat yang ditangani PSC 119	Kepala UPTD Kesehatan Khusus	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
Indikator Sub Kegiatan :		Tahun 2024 Dinkes				

	- Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
	- Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
	- Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
	- Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
	- Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
	- Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
	- Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
	- Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kelompok Sub Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kelompok Sub Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kelompok Sub Substansi Promosi Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kelompok Sub Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kelompok Sub Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kelompok Sub Substansi Gizi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kelompok Sub Substansi Promosi Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Lingkungan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kelompok Sub Substansi Promosi Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		
	- Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kelompok Sub Substansi Promosi Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Kepala UPTD Kesehatan Khusus	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		
	- Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kelompok Sub Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dan Jaminan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		
	- Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Kepala UPTD Labkesda	Tahun 2024 Dinkes	√	√		

	- Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
	- Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Kelompok Sub Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Kelompok Sub Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kelompok Sub Substansi Yankes Rujukan Dan Jaminan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kelompok Sub Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kelompok Sub Substansi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
	- Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kepala UPTD Kesehatan Khusus	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
	17. Indikator Kegiatan : Jumlah Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
	Jumlah Puskesmas yang menyusun Profil Kesehatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :		Tahun 2024 Dinkes				

	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	18. Indikator Kegiatan : PersentasePenerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok Sub Substansi Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kelompok Sub Substansi Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kelompok Sub Substansi Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kelompok Sub Substansi Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dan Jaminan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
2	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan						
	Indikator Progam : Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kelompok Sub Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	1. Indikator Kegiatan : PersentasePemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Kelompok Sub Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	Indikator Sub Kegiatan :		Tahun 2024 Dinkes	√	√		

	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kelompok Sub Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kelompok Sub Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	2. Indikator Kegiatan : Rasio dokter per satuan penduduk	Kelompok Sub Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	3. Indikator Kegiatan : Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Kelompok Sub Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kelompok Sub Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kelompok Sub Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kelompok Sub Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	4. Indikator Kegiatan : Persentase SDM Kesehatan Peserta yang menerima sertifikat pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis	Kelompok Sub Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kelompok Sub Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman						
	Indikator Progam : Persentase Sarana Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman yang memenuhi standar	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

	1. Indikator Kegiatan : Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

3. Indikator Kegiatan : PersentasePenerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Indikator Sub Kegiatan :						
- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
4. Indikator Kegiatan : PersentasePenerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Indikator Sub Kegiatan :						
- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Lingkungan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
5. Indikator Kegiatan : PersentasePenerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Lingkungan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Indikator Sub Kegiatan :						
- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Lingkungan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
6. Indikator Kegiatan : PersentasePemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Lingkungan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Lingkungan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Lingkungan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						
	Indikator Progam : Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat						
	1. Indikator Kegiatan : PersentaseAdvokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	2. Indikator Kegiatan : PersentasePelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	- Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

	3. Indikator Kegiatan : PersentasePengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang						
1	Persentase Angka Kesakitan	Sub Koor Pelayanan Kesehatan Primer	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
2	Rasio Kematian Ibu	Sub Koor Kesehatan Keluarga	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
3	Rasio kematian bayi	Sub Koor Kesehatan Keluarga	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
4	Persentase Angka Stunting	Sub Koor Gizi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
C.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang						
	Urusan Kesehatan						
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Sub Koor Kesehatan Keluarga	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Sub Koor Kesehatan Keluarga	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sub Koor Kesehatan Keluarga	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Sub Koor Kesehatan Keluarga	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
7	Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Sub Koor Kesehatan Keluarga	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS

8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Sub Koor Kesehatan Keluarga	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Sub Koor Kesehatan Keluarga	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
D.	Daftar Data Berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang						
1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Gizi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
2	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Gizi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
3	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS

4	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
5	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
6	Jumlah Kabupaten/Kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
7	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
8	Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
9	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
10	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
11	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
12	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Yankes Rujukan Dan Jaminan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
13	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS

14	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
E.	Daftar Data Statistik Sektoral Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang						
1	Daftar Puskesmas yang Ada di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Primer	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
2	Daftar Rumah Sakit yang Ada di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Yankes Rujukan Dan Jaminan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
3	Jumlah Cakupan Sarana Air Bersih dan Jamban Keluarga di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Kesehatan Lingkungan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
4	Jumlah Kasus Kematian Bayi menurut Penyebabnya di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Sub Koor Kesehatan Keluarga	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
5	Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan menurut Penyebabnya di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Sub Koor Kesehatan Keluarga	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
6	Jumlah Kasus Penyakit Menular di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
7	Jumlah Kasus Penyakit Menular yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
8	Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
9	Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Primer	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
10	Jumlah Tenaga Medis per Puskesmas di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Primer	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS

11	Perbaikan Gizi BALITA di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Gizi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
12	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
13	Rekapitulasi Jumlah Pemberian Imunisasi pada Bayi di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS

F.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Kepala Sub Bagian Keuangan

1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1	Informasi tentang profil Dinas Kesehatan Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Dinas Kesehatan (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 Dinkes	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Dinas Kesehatan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
9	Agenda surat Dinas Kesehatan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Dinkes	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Subbag Keuangan dan Aset	Tahun 2025 Dinkes	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Dinkes	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Dinkes	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Dinkes	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Dinkes	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Subbag Keuangan dan Aset	Tahun 2025 Dinkes	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Dinas Kesehatan	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Dinas Kesehatan	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Dinkes	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
G. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK

3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440 tahun 4949 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pembangunan Puskesmas

1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440 tahun 4949 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK

4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengadaan Obat Vaksin							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengadaan Bahan Habis Pakai							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK

4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK

[illegible]

1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Kesehatan Keluarga	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK

4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK

5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK

3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Gizi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Gizi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Gizi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Gizi	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Gizi	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Kesehatan Lingkungan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Kesehatan Lingkungan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Kesehatan Lingkungan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK

4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Kesehatan Lingkungan	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Kesehatan Lingkungan	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2023 Dinkes	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	UPTD Pelayanan Kesehatan Khusus (PKK)	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Pelayanan Kesehatan Khusus (PKK)	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	UPTD Pelayanan Kesehatan Khusus (PKK)	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Pelayanan Kesehatan Khusus (PKK)	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Pelayanan Kesehatan Khusus (PKK)	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK

4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan dan Rujukan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan dan Rujukan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan dan Rujukan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan dan Rujukan	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan dan Rujukan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Primer	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Nomor 416 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Primer	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Primer	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Primer	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Primer	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Adiarsa

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Adiarsa	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Adiarsa	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Adiarsa	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Adiarsa	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Adiarsa	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Anggadita

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Anggadita	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Anggadita	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Anggadita	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Anggadita	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Anggadita	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Balongsari							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Balongsari	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Balongsari	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Balongsari	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Balongsari	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Balongsari	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Batujaya							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Batujaya	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Batujaya	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Batujaya	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Batujaya	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Batujaya	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Bayurlor							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Bayurlor	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Bayurlor	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Bayurlor	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Bayurlor	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK

5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Bayurlor	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Ciampel							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Ciampel	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Ciampel	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Ciampel	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Ciampel	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Ciampel	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Cibuaya							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Cibuaya	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Cibuaya	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Cibuaya	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK

4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Cibuaya	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Cibuaya	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Cicinde							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Cicinde	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Cicinde	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Cicinde	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Cicinde	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Cicinde	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Cikampek							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Cikampek	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Cikampek	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK

3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Cikampek	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Cikampek	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Cikampek	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Cikampek Utara							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Cikampek Utara	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Cikampek Utara	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Cikampek Utara	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Cikampek Utara	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Cikampek Utara	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Cilamaya							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Cilamaya	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK

[illegible]

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Gempol	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Gempol	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Gempol	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Gempol	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Gempol	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Jatisari							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Jatisari	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Jatisari	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Jatisari	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Jatisari	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Jatisari	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Jayakarta							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Jayakarta	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Jayakarta	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Jayakarta	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Jayakarta	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Jayakarta	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Jomin							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Jomin	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Jomin	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Jomin	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Jomin	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK

5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Jomin	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Kalangsari							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Kalangsari	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Kalangsari	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Kalangsari	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Kalangsari	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Kalangsari	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Karawang							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Karawang	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Karawang	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Karawang	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK

4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Karawang	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Karawang	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Karawang Kulon							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Karawang Kulon	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Karawang Kulon	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Karawang Kulon	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Karawang Kulon	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Karawang Kulon	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Kertamukti							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Kertamukti	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Kertamukti	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK

3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Kertamukti	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Kertamukti	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Kertamukti	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Klari							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Klari	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Klari	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Klari	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Klari	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Klari	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Kotabaru							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Kotabaru	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK

[illegible]

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Kutawaluya	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Kutawaluya	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Kutawaluya	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Kutawaluya	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Kutawaluya	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Lemah Duhur

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Lemah Duhur	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Lemah Duhur	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Lemah Duhur	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Lemah Duhur	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK

5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Lemah Duhur	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Lemahabang							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Lemahabang	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Lemahabang	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Lemahabang	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Lemahabang	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Lemahabang	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Loji							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Loji	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Loji	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Loji	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK

4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Loji	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Loji	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Majalaya							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Majalaya	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Majalaya	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Majalaya	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Majalaya	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Majalaya	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Medang Asem							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Medangasem	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Medangasem	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK

3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Medangasem	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Medangasem	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Medangasem	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Nagasari							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Nagasari	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Nagasari	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Nagasari	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Nagasari	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Nagasari	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Pacing							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Pacing	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK

[illegible]

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Pangkalan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Pangkalan	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Pangkalan	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Pangkalan	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Pangkalan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Pasirukem							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Pasirukem	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Pasirukem	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Pasirukem	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Pasirukem	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Pasirukem	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Pedes							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Pedes	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Pedes	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Pedes	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Pedes	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Pedes	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Plawad							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Plawad	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Plawad	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Plawad	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Plawad	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK

5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Plawad	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Purwasari							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Purwasari	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Purwasari	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Purwasari	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Purwasari	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Purwasari	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Rawamerta							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Rawamerta	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Rawamerta	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Rawamerta	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK

4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Rawamerta	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Rawamerta	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Rengasdengklok							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Rengasdengklok	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Rengasdengklok	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Rengasdengklok	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Rengasdengklok	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Rengasdengklok	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Sukatani							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Sukatani	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Sukatani	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK

3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Sukatani	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Sukatani	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Sukatani	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Sungaibuntu							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Sungaibuntu	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Sungaibuntu	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Sungaibuntu	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Sungaibuntu	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Sungaibuntu	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Telagasari							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Telagasari	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Telagasari	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Telagasari	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Telagasari	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Telagasari	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Tanjungpura

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Tanjungpura	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Tanjungpura	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Tanjungpura	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Tanjungpura	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Tanjungpura	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Telukjambe

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Telukjambe	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Telukjambe	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Telukjambe	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Telukjambe	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Telukjambe	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Tempuran

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Tempuran	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Tempuran	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Tempuran	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Tempuran	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK

5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Tempuran	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Tirtajaya							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Tirtajaya	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Tirtajaya	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Tirtajaya	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Tirtajaya	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Tirtajaya	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Tirtamulya							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Tirtamulya	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Tirtamulya	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Tirtamulya	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK

4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Tirtamulya	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Tirtamulya	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Tunggakjati							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Tunggakjati	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Tunggakjati	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Tunggakjati	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Tunggakjati	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Tunggakjati	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Wadas							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Wadas	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Wadas	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK

3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Wadas	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Wadas	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Wadas	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Wanakerta							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021Tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas Wanakerta	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan.Rincian Tugas,Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Wanakerta	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan,Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Wanakerta	Tahun 2017 Dinkes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 440/150/Dinkes Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Karawang	UPTD Puskesmas Wanakerta	Tahun 2022 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas Wanakerta	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Surveilans dan Imunisasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK

4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							
Sub Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan pelaporan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan pelaporan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan pelaporan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan pelaporan	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan pelaporan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan pelaporan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan pelaporan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan pelaporan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan pelaporan	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan pelaporan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK

5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Subkor Legislasi dan Akreditasi	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK

4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan pelaporan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan pelaporan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan pelaporan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan pelaporan	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan pelaporan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan pelaporan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan pelaporan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan pelaporan	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan pelaporan	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Program dan pelaporan	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK

3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Kefarmasian	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/7523/Dinkes Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sub Koordinator dan Kelompok Sub Substansi pada Dinas Kesehatan.	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2021 Dinkes	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 440/4949/Dinkes tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2018 Dinkes	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Sub Koor Kelompok Sub Substansi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Tahun 2024 Dinkes	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A	Daftar Data Indikator Program, Indikator Kegiatan, serta Indikator Sub Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang						
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)						
	Indikator Program : Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Luas Daerah Tergenang	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS

	- Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS

	- Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Rasio Jaringan Irigasi	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :	Bidang Sumber Daya Air					
	- Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Irigasi Rawa yang Dipelihara	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS

2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase						
	Indikator Program : Panjang Saluran drainase perkotaan berfungsi dengan baik	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
3	Program Penataan Bangunan Gedung						
	Indikator Program : Persentase rekomendasi teknis IMB (PBG) yang diterbitkan	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	Indikator Program : Persentase rekomendasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS

1. Indikator Kegiatan : Persentase rekomendasi teknis IMB (PBG) yang diterbitkan	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
2. Indikator Kegiatan : Persentase rekomendasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
Indikator Sub Kegiatan :						
- Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
- Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Bangunan dan Gedung	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
- Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
- Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Bangunan dan Gedung	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
- Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Bangunan dan Gedung	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
- Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	Bidang Bangunan dan Gedung	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
- Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bantuan teknis	Bidang Bangunan dan Gedung	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
- Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	Bidang Bangunan dan Gedung	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
- Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS

	- Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Telah Dilakukan Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo)		Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Bidang Bangunan dan Gedung	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Bidang Bangunan dan Gedung	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya						
	Indikator Kegiatan : Persentase Penataan Bangunan yang sesuai dengan Perencanaan	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS

	- Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
5	Program Penyelenggaraan Jalan						
	Indikator Program : Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	Indikator Program : Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Rasio panjang jalan dan Jembatan dengan jumlah penduduk	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Jalan yang Dibangun	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Jembatan yang Dibangun	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Flyover yang Dibangun	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS

	- Panjang Underpass yang Dibangun	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Terowongan/Tunnel yang Dibangun	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Jalan Strategis Desa yang Dibangun	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Jembatan Gantung yang Dibangun	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Jembatan Gantung yang Diganti/Direhabilitasi	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi						
	Indikator Program : Persentase tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Peserta Pelatihan Tenaga Terampil KonstruksiYang Bersertifikat	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS

- Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disiapkan	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
- Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
- Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
- Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
- Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
- Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
- Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
2. Indikator Kegiatan : Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
Indikator Sub Kegiatan :						
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
- Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
- Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
- Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS

	- Jumlah Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : PersentasePenerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi.	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait LUJK Nasional	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	4. Indikator Kegiatan : PersentasePengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa KonstruksiYang Dilaksanakan	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :			√	√		SS

	- Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang						
	Indikator Program : Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/KotaYang Dilaksanakan	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS

	3. Indikator Kegiatan : Informasi Penataan Ruang	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Bidang penataan Ruang	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Bidang penataan Ruang	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	4. Indikator Kegiatan : Persentase kasus yang Ditindaklanjuti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
B. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang							
1	Rasio luas daerah irigasi kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
2	Prosentase jalan dalam kondisi baik	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
3	Prosentase Jembatan dalam kondisi baik	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
4	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
5	Nilai/ Score SIPJAKI	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
6	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
7	Rasio Kepatuhan IMB	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang							
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
2	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
3	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Bidang Jalan dan jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS

4	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
5	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Bidang Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
D	Daftar Data Statistik Sektoral Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang						
1	Rekapitulasi Abrasi Pantai dan Muara Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
2	Rekapitulasi Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
3	Rekapitulasi Jalan Kabupaten yang Menjadi KewenanganKabupaten di Kab. Karawang di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
4	Rekapitulasi Jalan Nasional yang Menjadi Kewenangan Negara di Kab. Karawang di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
5	Rekapitulasi Jalan Provinsi yang Menjadi Kewenangan Provinsi di Kab. Karawang di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
6	Rekapitulasi Jalan Tol yang Menjadi Kewenangan Jasa Marga di Kab. Karawang di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
7	Rekapitulasi Jembatan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
8	Rekapitulasi Saluran Drainase Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
9	Rekapitulasi Saluran Irigasi Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
10	Rekapitulasi Saluran Sekunder Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Sumber Daya Air	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
F.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang						
Kepala Sub Bagian Keuangan							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK

	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							
1	Informasi tentang profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 DPUPR	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK

6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPUPR	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
9	Agenda surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPUPR	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPUPR	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPUPR	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPUPR	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPUPR	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPUPR	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPUPR	√	√		BK

2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 DPUPR	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPUPR	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS

9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
G. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang							
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Normalisasi / Restorasi Sungai							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Irigasi	Bidang SDA	Tahun 2016 DPUPR	√	√		BK

2	Peraturan Daerah Kabupaten karawang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pembangunan Sumur Resapan dan Lubang Resapan Biopori	Bidang SDA	Tahun 2023 DPUPR	√	√		BK
3	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penataan Garis Sempadan	Bidang SDA	Tahun 2022 DPUPR	√	√		BK
4	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraann Sistem Drainase	Bidang SDA	Tahun 2022 DPUPR	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang SDA	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota							
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Irigasi	Bidang SDA	Tahun 2016 DPUPR	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang SDA	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
Sub Kegiatan : Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Irigasi	Bidang SDA	Tahun 2016 DPUPR	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang SDA	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
Sub Kegiatan : Rehabilitas Jaringan Irigasi Permukaan							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Irigasi	Bidang SDA	Tahun 2016 DPUPR	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang SDA	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraann Sistem Drainase	Bidang SDA	Tahun 2022 DPUPR	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang SDA	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraann Sistem Drainase	Bidang SDA	Tahun 2022 DPUPR	√	√		BK

2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang SDA	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraann Sistem Drainase	Bidang SDA	Tahun 2022 DPUPR	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang SDA	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG							
1	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2015 DPUPR	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2018 DPUPR	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 800.22/Kep. 81-Huk/2022 Tahun 2022 Tentang Tim Profesi Ahli	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2022 DPUPR	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 800/Kep.974-PUPR/2023 Tahun 2023 Tentang Tim Penilai Teknis	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2023 DPUPR	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
Sub Kegiatan : Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 800/929/PB/2023 Tahun 2023 Tentang Penilik Bangunan	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2023 DPUPR	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2023 DPUPR	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung	Bidang Bangunan dan Gedung	Tahun 2015 DPUPR	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Bangunan dan Gedung	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi							
1	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2018 DPUPR	√	√		BK
2	Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor 800/Kep.974-PUPR/2023 Tahun 2023 Tentang Tim Penilai Teknis	Bidang Penataan Bangunan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA							

Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan dan Gedung di Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung	Bidang Bangunan dan Gedung	Tahun 2015 DPUPR	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jalan	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2016 DPUPR	√	√		BK
2	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan							
1	Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan Tanah Daerah Milik Jalan Di Kabupaten Karawang	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2015 DPUPR	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Jalan	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2023 DPUPR	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelebaran Jalan Menuju Standar							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Jalan	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2023 DPUPR	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan							

1	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan.	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2021 DPUPR	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Jalan dan Jembatan	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							
Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi							
Sub Kegiatan : Penyiapan Instruksi/Asesor/Penyelenggara Pelatihan							
1	Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang SPM Pekerjaan Umum	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2018 DPUPR	√	√		BK
2	Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2017 DPUPR	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi							
1	Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2017 DPUPR	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi							
1	Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2017 DPUPR	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI							
1	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2000 DPUPR	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							
Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2013 DPUPR	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang							

[illegible]

1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2011 DPUPR	√	√		BK
2	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Menara Telekomunikasi Bersama	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2014 DPUPR	√	√		BK
3	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karawang;	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2015 DPUPR	√	√		BK
4	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2015 DPUPR	√	√		BK
5	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2016 DPUPR	√	√		BK
6	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2017 DPUPR	√	√		BK
7	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2018 DPUPR	√	√		BK
8	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2022 DPUPR	√	√		BK
9	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penataan Garis Sempadan	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2022 DPUPR	√	√		BK
10	Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Transit Oriented Development Kereta Cepat dan Sekitarnya Tahun 2023 -2043	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2023 DPUPR	√	√		BK
11	Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Karawang	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2013 DPUPR	√	√		BK

12	Peraturan Bupati Karawang Nomor 91 Tahun 2022 tentang Luasan dan Sebaran, Diversifikasi, Insentif dan Disinsentif, Alih Fungsi Serta Pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2022 DPUPR	√	√		BK
13	Surat Keputusan Bupati Nomor 650/Kep. 142-Huk/2023 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2023 DPUPR	√	√		BK
14	Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 620/Kep-265-Huk/2023 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2023 DPUPR	√	√		BK
15	Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nomor 800/Kep.081-PUPR/2022 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2022 DPUPR	√	√		BK
16	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
Sub Kegiatan : Sistem Informasi Penataan Ruang							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2013 DPUPR	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2013 DPUPR	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2013 DPUPR	√	√		BK

2	Surat Keputusan Bupati Nomor 650/Kep. 142-Huk/2023 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2023 DPUPR	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Penataan Ruang	Tahun 2024 DPUPR	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program, Indikator Kegiatan, serta Indikator Sub Kegiatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang						
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						
	Indikator Program : Persentase Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase penduduk berakses air minum	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	- Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	-Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	-Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS

	-Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	-Jumlah Unit Sambungan Rumah (SR) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air bersih melalui SPAM jaringan perpipaan perdesaan/perkotaan	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	-Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah						
	Indikator Program : Persentase Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase rumah tinggal bersanitasi	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	- Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	- Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS

	- Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	- Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
3	Program Pengembangan Perumahan						
	Indikator Program : Persentase Program Pengembangan Perumahan	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Rumah Umum Dan Rumah Swadaya	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Rumah Umum Dan Rumah Swadaya	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Rumah Umum Dan Rumah Swadaya	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Rumah Umum Dan Rumah Swadaya	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Rumah Khusus	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Yang Disediakan	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Perizinan Dan Pengendalian Perumahan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Rumah Khusus	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS

	- Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Rumah Khusus	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	- Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Perizinan Dan Pengendalian Perumahan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	4. Indikator Kegiatan : PersentasePendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/KotaYang_Dilaksanakan	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Perizinan Dan Pengendalian Perumahan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Perizinan Dan Pengendalian Perumahan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Perizinan Dan Pengendalian Perumahan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	5. Indikator Kegiatan : PersentasePenerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Perizinan Dan Pengendalian Perumahan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Perizinan Dan Pengendalian Perumahan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
4	Program Kawasan Permukiman						
	Indikator Program : Persentase Pelaksanaan Program Kawasan Permukiman	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Rasio permukiman layak huni	Bidang Permukiman	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						

	- Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase pemukiman yang tertata	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	- Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS

	- Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
5	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh						
	Indikator Program : Persentase Pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Infrastruktur Pada Permukiman	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Infrastruktur Pada Permukiman	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Infrastruktur Pada Permukiman	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)						
	Indikator Program : Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Prasarana Perumahan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Prasarana Perumahan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Prasarana Perumahan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
	- Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Sarana Dan Utilitas Perumahan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS

1	Jumlah Pembangunan/Penataan Jalan Lingkungan (Jaling), Penerangan Jalan Umum (PJU), Tempat Pemakaman Umum (TPU), Instalasi Sanitasi, Rumah Layak Huni (Rulahu), Sarana Air Bersih dan Jalan Lingkungan Perumahan Drainase di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Pengendalian Prasarana Sarana Dan Utilitas Perumahan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
2	Jumlah Rumah Layak Huni, Rumah Tidak Layak Huni, Pembangunan Rumah Layak Huni dan Peningkatan Kualitas Rumah di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Pengendalian Prasarana Sarana Dan Utilitas Perumahan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
3	Jumlah Rumah yang Melanggar Lokasi Pendirian di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kepala Bidang Perumahan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
4	Rekapitulasi Penyerahan Tanah Fasos Fasum dari Pengembang di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Pengendalian Prasarana Sarana Dan Utilitas Perumahan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS

F.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang

Kepala Sub Bagian Keuangan

1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1	Informasi tentang profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPRKP	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPRKP	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 DPRKP	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPRKP	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPRKP	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPRKP	√	√		
7	Agenda surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPRKP	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPRKP	√	√		BK

1	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPRKP	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPRKP	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPRKP	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPRKP	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPRKP	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPRKP	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		BK
3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		BK
4	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 DPRKP	√	√		SS
5	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPRKP	√	√		SS
6	Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPRKP	√	√		BK

G.	Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten						
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis (SPAM)							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Sanitasi dan Pengelolaan Air Minum	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Sanitasi dan Pengelolaan Air Minum	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Sanitasi dan Pengelolaan Air Minum	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Sanitasi dan Pengelolaan Air Minum	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Sanitasi dan Pengelolaan Air Minum	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Sanitasi dan Pengelolaan Air Minum	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembangunan Baru SPAM Bahan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Sanitasi dan Pengelolaan Air Minum	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Sanitasi dan Pengelolaan Air Minum	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembangunan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Sanitasi dan Pengelolaan Air Minum	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengolahan Air Limbah Domestik							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Sanitasi dan Pengelolaan Air Minum	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT							

1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Sanitasi dan Pengelolaan Air Minum	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Sanitasi dan Pengelolaan Air Minum	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							
Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Perumahan	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Perumahan	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Perumahan	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Perumahan	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan							
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Perumahan	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Perumahan	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							
Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman							
Sub Kegiatan : Penyusunan dan/atau review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Permukiman	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Permukiman	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Permukiman	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							
Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Permukiman	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Permukiman	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Permukiman	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Permukiman	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH							
Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							
1	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang SOTK	Bidang Permukiman	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							
Sub Kegiatan : Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan							
1	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyerahan Sarana dan Prasarana Utilitas	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas	Tahun 2022 DPRKP	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 333 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Nomor 334 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK

4	Peraturan Bupati Nomor 335 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administatif Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian							
1	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyerahan Sarana dan Prasarana Utilitas	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas	Tahun 2022 DPRKP	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 333 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Nomor 334 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Nomor 335 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administatif Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan							
1	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyerahan Sarana dan Prasarana Utilitas	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas	Tahun 2022 DPRKP	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 333 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Nomor 334 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Nomor 335 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administatif Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas	Tahun 2023 DPRKP	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS SOSIAL KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Karawang						
1	Program Pemberdayaan Sosial						
	Indikator Program : Persentase Pemberdayaan Sosial PSKS		Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kelompok Kerja Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Ketua Tim Kelompok Kerja Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Peserta peningkatan kapasitas yang mendapatkan sertifikat	Kelompok kerja pemberdayaan sosial PSKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :		Tahun 2024 Dinsos				
	- Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Ketua tim kelompok kerja pemberdayaan sosial PSKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	- Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Ketua tim kelompok kerja pemberdayaan sosial PSKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	- Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Ketua tim kelompok kerja pemberdayaan sosial PSKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS

	- Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Ketua tim kelompok kerja pemberdayaan sosial PSKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan						
	Indikator Program : Persentase Warga Negara Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	Kelompok kerja Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kelompok kerja Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :		Tahun 2024 Dinsos				
	- Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Ketua tim kelompok kerja Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
3	Program Rehabilitasi Sosial						
	Indikator Program : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis.		Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Penyediaan Permakanan	Ketua tim kelompok kerja Pelayanan Kedaruratan PPKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	- Penyediaan Sandang	Ketua tim kelompok kerja Pelayanan Kedaruratan PPKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS

	- Penyediaan Alat Bantu	Ketua tim kelompok kerja Penyediaan Alat bantu PPKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Ketua tim kelompok kerja Pelayanan Kedaruratan PPKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	- Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Ketua tim kelompok kerja Pembinaan PPKS, Keluarga dan Masyarakat	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Ketua tim kelompok kerja Pembinaan PPKS, Keluarga dan Masyarakat	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	- Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Ketua tim kelompok kerja Penyediaan Alat bantu PPKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	- Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Ketua tim kelompok kerja Pelayanan Kedaruratan PPKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Ketua tim kelompok kerja Pelayanan Kedaruratan PPKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	- Pemberian Pelayanan Kedaruratan	Ketua tim kelompok kerja Pelayanan Kedaruratan PPKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Ketua tim kelompok kerja Pelayanan Kedaruratan PPKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	- Pemberian Layanan Rujukan	Ketua tim kelompok kerja Pelayanan Kedaruratan PPKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza diluar panti sosial		Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial.	Ketua tim kelompok kerja Pembinaan PPKS, Keluarga dan Masyarakat	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS

	- Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial	Ketua tim kelompok kerja Penyediaan Alat bantu PPKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial						
	Indikator Program : Persentase PPKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial		Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Pemeliharaan anak-anak terlantar	Ketua tim kelompok kerja perlindungan dan jaminan sosial PPKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Penjangkauan anak terlantar	Ketua tim kelompok kerja perlindungan dan jaminan sosial PPKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	- Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Ketua tim kelompok kerja perlindungan dan jaminan sosial PPKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Pengelolaan data fakir miskin		Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Ketua tim kelompok kerja pendataan PPKS dan PSKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	- Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Ketua tim kelompok kerja pendataan PPKS dan PSKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	- Bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Ketua tim kelompok kerja perlindungan dan jaminan sosial PPKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	- Fasilitas bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Ketua tim kelompok kerja perlindungan dan jaminan sosial PPKS	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
5	Program Penanganan Bencana						
	Indikator Program : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	Ketua tim kelompok kerja Perlindungan sosial korban bencana	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS

	1. Indikator Kegiatan : Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Ketua tim kelompok kerja Perlindungan sosial korban bencana	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Penyediaan makanan	Ketua tim kelompok kerja Perlindungan sosial korban bencana	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	- Penyediaan sandang	Ketua tim kelompok kerja Perlindungan sosial korban bencana	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	- Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Ketua tim kelompok kerja Perlindungan sosial korban bencana	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	- Pelayanan dukungan psikososial	Ketua tim kelompok kerja Perlindungan sosial korban bencana	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiap siagaan kebencanaan kabupaten/kota	Ketua tim kelompok kerja Perlindungan sosial korban bencana	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana (KSB)	Ketua tim kelompok kerja Perlindungan sosial korban bencana	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	- Koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana (Tagana)	Ketua tim kelompok kerja Perlindungan sosial korban bencana	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan						
	Indikator Program : Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Monumen Bersejarah Kabupaten	Ketua Tim Kelompok Kerja Kepahlawanan, Keberintisan dan Penyuluh Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Ketua Tim Kelompok Kerja Kepahlawanan, Keberintisan dan Penyuluh Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan kabupaten/kota	Ketua Tim Kelompok Kerja Kepahlawanan, Keberintisan dan Penyuluh Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS

	- Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Ketua Tim Kelompok Kerja Kepahlawanan, Keberintisan dan Penyuluh Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang						
1	Persentase PPKS desil 1 dan desil 2 yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial	Bidang Resos dan Linjamsos	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
C.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Dinas Sosial Kabupaten KarawangKarawang						
	Urusan Sosial						
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Bidang Rehabilitasi Sosial (Resos)	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	Bidang Linjamsos (perlindungan dan jaminan sosial)	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
D.	Daftar Data Berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang						
1	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Bidang Linjamsos	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
E.	Daftar Data Statistik Sektorial Pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang						
1	Banyaknya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan(TKSK), Petugas Sosial Masyarakat (PSM) dan Petugas Pendamping PKH di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pemberdayaan Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
2	Rekapitulasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Linjamsos	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
3	Rekapitulasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
4	Rekapitulasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS

F.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang						
Kepala Sub Bagian Keuangan							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							
1	Informasi tentang profil Dinas Sosial Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Dinas Sosial (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK

3	Agenda Kerja Kepala Dinas Sosial setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 Dinsos	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Dinas Sosial	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinsos	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
9	Agenda surat Dinas Sosial	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Dinsos	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Dinsos	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Dinsos	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Dinsos	√	√		BK

	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Dinsos	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Dinsos	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Dinsos	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Dinas Sosial	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Dinas Sosial	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dinsos	√	√		SS

G.	Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

Kegiatan : Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Dayasos	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Dayasos	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Dayasos	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Dayasos	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Dayasos	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							
Kegiatan : Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal							
Sub Kegiatan : Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Linjamsos	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							
Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2019 Tentang penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial	Tahun 2019 Dinsos	√	√		SS
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 389 Tahun 2023 Tentang Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Bidang Rehabilitasi Sosial	Tahun 2023 Dinsos	√	√		SS
3	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial	Tahun 2012 Dinsos	√	√		SS
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Rehabilitasi Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Rehabilitasi Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Alat Bantu							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Rehabilitasi Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Rehabilitasi Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Rehabilitasi Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Rehabilitasi Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Rehabilitasi Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Rehabilitasi Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Data dan Pengaduan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Rehabilitasi Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Kedaruratan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Rehabilitasi Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Rehabilitasi Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Rujukan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Rehabilitasi Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							
Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial							
1	Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman pelaksanaan bimbingan lanjut dan rujukan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Karawang	Bidang Rehabilitasi Sosial	Tahun 2013 Dinsos	√	√		SS
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Rehabilitasi Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang program kemitraan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumberdaya kesejahteraan sosial dengan dunia industri dan kelompok masyarakat peduli sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial	Tahun 2016 Dinsos	√	√		SS
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Rehabilitasi Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
Kegiatan : Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar							
Sub Kegiatan : Penjangkauan Anak-Anak Terlantar							

1	Surat Keputusan Bupati Nomor 460/Kep.137. Huk/.Tahun. 2023 Tentang Petunjuk teknis Pemberin Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Trtlantar Melalui lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Yang Bersumber Dari Anggaran Dana Bagi hasil Cukai tembkau Kabupaten karawang Tahun Anggaran 2023	Bidang Perlindungan Dan jaminan Sosial	Tahun 2023 Dinsos				BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang perlindungan Dan Jaminan Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang perlindungan Dan Jaminan Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang perlindungan Dan Jaminan Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang perlindungan Dan Jaminan Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang perlindungan Dan Jaminan Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang perlindungan Dan Jaminan Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang perlindungan Dan Jaminan Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang perlindungan Dan Jaminan Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang perlindungan Dan Jaminan Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelayanan Dukungan Psikososial							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang perlindungan Dan Jaminan Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang perlindungan Dan Jaminan Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang perlindungan Dan Jaminan Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							
Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemberdayaan Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemberdayaan Sosial	Tahun 2024 Dinsos	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang						
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan						
	Indikator Program : Persentase kegiatan yang telah di analisis menggunakan GAP/GBS	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	Indikator Program : Persentase organisasi pemberdayaan perempuan yang dibina	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Kebijakan PUG	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS

	- Jumlah perangkat daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	4. Indikator Kegiatan : Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah dokumen hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	5. Indikator Kegiatan : Persentase organisasi pemberdayaan perempuan yang dibina	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						

	- Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
2	Program Perlindungan Perempuan						
	Indikator Program : Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan melalui P2TP2A	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Perangkat Daerah yang Memberikan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS

	- Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Persentase Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga						
	Indikator Program : Persentase keterlibatan OPD Kab. Karawang dalam kegiatan P2WKSS	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	Indikator Program : Persentase kepala rumah tangga perempuan yang difasilitasi dalam PEKKA	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS

	Indikator Program : Persentase layanan motivator keluarga dalam mewujudkan peningkatan kualitas keluarga	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas keluarga	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah perangkat daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia-	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga peserta Peningkatan Kapasitas Keluarga yang mendapat sertifikat	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS

	- Jumlah dokumen hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Persentase Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak						
	Indikator Program : Persentase OPD yang terlibat dalam forum data terpilah gender	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Data Gender dan Anak	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)						
	Indikator Program : Persentase pemenuhan hak anak	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Presentase Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS

	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
6	Program Perlindungan Khusus Anak						
	Indikator Program : Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS

	1. Indikator Kegiatan : Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS

	3. Indikator Kegiatan : PersentasePenguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/KotaYang Dilaksanakan	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang						
1	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja barang dan jasa dan belanja modal	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
2	Persentase komponen nilai indikator KLA yang terpenuhi	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
3	Rasio perempuan korban kekerasan dan TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Bidang Pencegahan dan penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
4	Presentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten/ Kota (Penduduk usia kurang dari 18 tahun)	Bidang Pencegahan dan penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
C.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang						
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						

1	Persentase ARG pada belanja Barang dan Jasa dan belanja modal	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Bidang Pencegahan dan penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Bidang Pencegahan dan penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kar							
1	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
3	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
4	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
5	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki di Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Provinsi	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
6	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
7	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS

8	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
9	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
E.	Daftar Data Statistik Sektoral Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang						
1	Data dan Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
2	Rekapitulasi Jumlah Kantor dengan Fasilitas Layak Anak di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
3	Rekapitulasi Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani oleh P2TP2A di Kabupaten Karawang Tahun 2024 di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
4	Rekapitulasi Nilai Evaluasi Kota Layak Anak di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
5	Rekapitulasi Presentase dan Rasio Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
F.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karaw						
Kepala Sub Bagian Keuangan							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK

4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							
1	Informasi tentang profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 DP3A	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK

6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DP3A	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
9	Agenda surat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DP3A	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DP3A	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DP3A	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DP3A	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DP3A	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DP3A	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DP3A	√	√		BK

2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 DP3A	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DP3A	√	√		SS

8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DP3A	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK

G. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2020 DP3A	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2022-2026	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2022 DP3A	√	√		BK
3	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2 /Kep.135-Huk/2024 Tahun 2024 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
4	Keputusan Bupati Karawang Nomor 463.23 /Kep.477-Huk/2020 Tahun 2020 Tentang Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Tahun 2020 Di Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2020 DP3A	√	√		BK
5	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2 /Kep.136-Huk/2024 Tahun 2024 Tentang Tim Driver Pengarusutamaan Gender Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
6	Keputusan Bupati Karawang Nomor 463/Kep.793-Huk/2022 Tahun 2022 Tentang Penetapan Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2022 DP3A	√	√		BK
7	Standar Operasional Prosedur Nomor 067/51/PUG&PPKK/2022 Tahun 2022 Tentang Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2022 DP3A	√	√		BK
8	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) : Evaluasi PUG melalui APE, Rakor Pendataan APE, Kegiatan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dan Sosialisasi Kualitas Keluarga dalam Pola Asuh Anak	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2020 DP3A	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten Karawang.	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2020 DP3A	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG : Rakor Rencana Aksi Pokja PUG Tahunan, Monev Rencana Aksi Pokja PUG Tahunan, Rakor Rencana Aksi Pokja PUG 5 Tahunan, Monev Rencana Aksi Pokja PUG 5 Tahunan dan Advokasi Pelatihan PUG termasuk PPRG	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
Sub Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2020 DP3A	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten Karawang.	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2020 DP3A	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG : Pelatihan PUG termasuk PPRG bagi Kecamatan dan Kelurahan, Sosialisasi PUG dan PPRG Bidang Hukum dan Sosialisasi PUG dan PPRG bagi Lembaga Masyarakat dan Media	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							
Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2020 DP3A	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten Karawang.	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2020 DP3A	√	√		BK

3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota : Kegiatan Kelembagaan Data Gender dan Anak, Sosialisasi PUG bagi Dunia Usaha, Rakor Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dan Monev Data Gender dan Anak	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2020 DP3A	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2022-2026	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2022 DP3A	√	√		BK
3	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2 /Kep.135-Huk/2024 Tahun 2024 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
4	Keputusan Bupati Karawang Nomor 463.23 /Kep.477-Huk/2020 Tahun 2020 Tentang Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Tahun 2020 Di Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2020 DP3A	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi : Capacity Building Pengurus, Diklatpol Perempuan Politik, Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Perempuan Politik, Rapat Pengurus, Seminar dan Penganugerahan Perempuan Politik, Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Masyarakat di 8 Desa dan Sosialisasi Undang-Undang Pemilu	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2020 DP3A	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2022-2026	Kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender	Tahun 2022 DP3A	√	√		BK
3	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2 /Kep.765-Huk/2023 Tahun 2023 Tentang Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Karawang Periode Tahun 2023-2026	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2023 DP3A	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota : Capacity Building, Festival Kreasi Perempuan dan Anak, Pelatihan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Pelatihan Pencegahan TPPO, Seminar Kesehatan Perempuan dan Anak, Training of Trainer Pengurus Forkomda PUSPA, Pelatihan Ekonomi Kreatif untuk Perempuan di Desa dan Rapat Pengurus	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2 /Kep.138-Huk/2024 Tahun 2024 Tentang Lokasi Desa/Kelurahan Binaan Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
2	Keputusan Bupati Karawang Nomor 463/Kep.271-Huk/2023 Tahun 2023 Tentang Kelompok Kerja Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Kabupaten Karawang Tahun 2023	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2023 DP3A	√	√		BK

3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga, Capacity Building, Pelatihan Manajemen Keuangan, Rapat Pengurus, Seminar Kesehatan Masyarakat dan Sosialisasi Pemasaran Home Industri	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2 /Kep.138-Huk/2024 Tahun 2024 Tentang Lokasi Desa/Kelurahan Binaan Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
2	Keputusan Bupati Karawang Nomor 463/Kep. 271-Huk/2023 Tahun 2023 Tentang Kelompok Kerja Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Kabupaten Karawang Tahun 2023	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2023 DP3A	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota : Bimtek Wirausaha, Donor Darah, Pelatihan Keterampilan di Desa Binaan P2WKSS, Pelatihan Pemanfaatan Sampah, Praktek Merias Wajah, Rapat Umum, Sosialisasi Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi di Masyarakat, Desain Lomba Batik Lokal DWP, HUT DWP, Kunjungan ke TK Binaan dan SLB, Pelatihan Keterampilan, Pengajian Rutin, Rapat Koordinasi Pengurus dan Study Banding	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							

1	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.138-Huk/2024 Tahun 2024 Tentang Lokasi Desa/Kelurahan Binaan Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
2	Keputusan Bupati Karawang Nomor 463/Kep.271-Huk/2023 Tahun 2023 Tentang Kelompok Kerja Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Kabupaten Karawang Tahun 2023	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2023 DP3A	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota : Pembelajaran Sekoper Cinta, Pembinaan Dasawisma, Pertemuan Fasilitator Sekoper Cinta, Pertemuan Tim Pendata Sekoper Cinta, Rapat Evaluasi Akhir/Penilaian P2WKSS, Rapat Koordinasi P2WKSS Tingkat Desa, Rapat Koordinasi P2WKSS Tingkat Kabupaten, Rapat Verifikasi Awal P2WKSS, Tim Verifikasi Awal Tk. Provinsi Jawa Barat dan Wisuda Sekoper Cinta	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
1	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.138-Huk/2024 Tahun 2024 Tentang Lokasi Desa/Kelurahan Binaan Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
2	Keputusan Bupati Karawang Nomor 463/Kep.271-Huk/2023 Tahun 2023 Tentang Kelompok Kerja Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Kabupaten Karawang Tahun 2023	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2023 DP3A	√	√		BK

3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : Pelaksanaan Pendataan dan Pemetaan Perempuan Pelaku Ekonomi, Lomba Kreativitas, Pelatihan Keterampilan Kelompok PEKKA, Rapat Pembentukan Kelompok PEKKA, Rapat Pembinaan Kelompok PEKKA, Rapat Koordinasi Kelompok PEKKA dan Digital Parenting	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
1	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2 /Kep.138-Huk/2024 Tahun 2024 Tentang Lokasi Desa/Kelurahan Binaan Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
2	Keputusan Bupati Karawang Nomor 463/Kep. 271-Huk/2023 Tahun 2023 Tentang Kelompok Kerja Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Kabupaten Karawang Tahun 2023	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2023 DP3A	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : Kegiatan Hari Ibu, Kegiatan Hari Kartini, Pelatihan IT bagi Kualitas Organisasi Wanita Kabupaten Karawang, Pembinaan Organisasi, Peringatan Hari Besar Islam, Pelatihan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga, Pelatihan Skill di Desa, Pelatihan UMKM Wanita sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi dan Rapat Pengurus	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							

1	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2016 DP3A	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 396 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 - 2027	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2023 DP3A	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 463/ Kep. 166-HUK/ 2023 Tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Karawang	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2023 DP3A	√	√		BK
4	Surat Keputusan Bupati Nomor 463/Kep. 301-Huk/2023 Tentang Forum Anak Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2023 DP3A	√	√		BK
5	Standar Operasional Prosedur Nomor 463/ Kep.440 - Huk / 2022 Tentang Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga Campernik Kabupaten Karawang Tahun 2022 - 2027	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2022 DP3A	√	√		BK
6	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota : Pelatihan Ketahanan Keluarga, Sosialisasi stop perkawinan Anak, Sosialisasi KIE pegawai desa dan pembinaan motekar	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2016 DP3A	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 396 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 - 2027	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2023 DP3A	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 463/ Kep. 166-HUK/ 2023 Tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Karawang	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2023 DP3A	√	√		BK

4	Surat Keputusan Bupati Nomor 463/Kep. 301-Huk/2023 Tentang Forum Anak Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2023 DP3A	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Konperehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten Karawang/ Kota	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Wewenang Kabupaten/Kota

1	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2012 DP3A	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2019 DP3A	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 341 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2023 DP3A	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Karawang Nomor 300 Tahun 2023 Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2023 DP3A	√	√		BK
5	Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/Kep.155-Huk/2024 Tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
6	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Wewenang Kabupaten/Kota	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2017 DP3A	√	√		BK
2	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2012 DP3A	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 300 Tahun 2023 Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2023 DP3A	√	√		BK
4	Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/Kep.155-Huk/2024 Tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Tahun 2024 DP3A	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang						
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja						
	Indikator Program : Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Dokumen RTK	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja						
	Indikator Program : Persentase Tenaga Kerja yang dilatih	Bidang Bina Lattas	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Jumlah Kejuruan/Pelatihan yang dilaksanakan	Bidang Bina Lattas	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Bidang Bina Lattas	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	- Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Bidang Bina Lattas	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Jumlah Lembaga yang Dibina	Bidang Bina Lattas	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Bidang Bina Lattas	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS

	3. Indikator Kegiatan : Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Uji Kompetensi	Bidang Bina Lattas	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Bidang Bina Lattas	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
3	Program Penempatan Tenaga Kerja						
	Indikator Program : Presentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	Bidang Bina Penta	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Jumlah Pencari Kerja yang memperoleh kartu kuning (AK-1) & informasi loker	Bidang Bina Penta	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Bidang Bina Penta	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	- Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Bidang Bina Penta	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Jumlah CPMI yang memenuhi syarat	Bidang Bina Penta	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Bidang Bina Penta	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	- Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Bidang Bina Penta	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Jumlah bukti retribusi Perpanjangan IMTA yang divalidasi	Bidang Bina Penta	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Perusahaan yang mengikuti sosialisasi	Bidang Bina Penta	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
4	Program Hubungan Industrial						
	Indikator Program : Presentase kasus yang diselesaikan	Bidang Bina Hisyaker	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Jumlah Perusahaan yang PP nya disahkan dan Jumlah Perusahaan yang PKB nya didaftarkan	Bidang Bina Hisyaker	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS

	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Bidang Bina Hisyaker	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	- Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Bidang Bina Hisyaker	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	- Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Bidang Bina Hisyaker	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Jumlah Kasus Perselisihan	Bidang Bina Hisyaker	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Kasus Perselisihan	Bidang Bina Hisyaker	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	- Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Bidang Bina Hisyaker	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	- Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Bidang Bina Hisyaker	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	- Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Bidang Bina Hisyaker	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi						
	Indikator Program : Presentase calon transmigran yang mendapat penyuluhan	Bidang Bina Penta	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Jumlah Penduduk yang bertransmigrasi	Bidang Bina Penta	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Bina Penta	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	- Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Bidang Bina Penta	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	- Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Bidang Bina Penta	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS

B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang						
1	Indeks ketenagakerjaan	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
2	Persentase Pencari Kerja Karawang yang bekerja	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
C.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang						
	Urusan Tenaga Kerja						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
D.	Daftar Data Berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang						
1	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
2	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
3	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
4	Persentase tenaga kerja formal.	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS

5	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
6	Upah rata-rata per jam pekerja.	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
7	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
8	Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
9	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
10	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
11	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
E.	Daftar Data Statistik Sektoral Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang						
1	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
2	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Yang telah ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
3	Komposisi Jumlah Penyelesaian Kasus Perselisihan Industri di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
4	Komposisi Kepesertaan Jamsostek Pekerja/Buruh di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS

5	Komposisi Tenaga Kerja yang telah mendapatkan pelatihan di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
6	Rekapitulasi Pencari Kerja yang Sudah Ditempatkan di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kelompok Subs Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
7	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Bina Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
F.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang						
Kepala Sub Bagian Keuangan							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Kasubag Keuangan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Kasubag Keuangan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Kasubag Keuangan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Kasubag Keuangan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Kasubag Keuangan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							

1	Informasi tentang profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 Disnakertrans	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK

	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
9	Agenda surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disnakertrans	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disnakertrans	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disnakertrans	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disnakertrans	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disnakertrans	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disnakertrans	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disnakertrans	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Disnakertrans	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disnakertrans	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK

1	Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kelas A Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang	UPTD BLK	Tahun 2018 Disnakertrans	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang	UPTD BLK	Tahun 2021 Disnakertrans	√	√		BK
3	Standar Operasional Prosedur Nomor 068/UPTD-BLK/01/2015 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Pelatihankerja Berbasis Kompetensi	UPTD BLK	Tahun 2022 Disnakertrans	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 068/UPTD-BLK/02/2022 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Pelatihan Kewirausahaan	UPTD BLK	Tahun 2022 Disnakertrans	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (Kak) Sub Kegiatan	UPTD BLK	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK

Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Sub Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

1	Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Tahun 2021 s/d 2026	Kelompok Substansi kelembagaan pelatihan kerja	Tahun 2023 Disnakertrans	√	√		BK
2	Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kelompok Substansi kelembagaan pelatihan kerja	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
3	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (DPA) Nomor 900.1.2.4/44/DPA/2024	Kelompok Substansi kelembagaan pelatihan kerja	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (Kak) Sub Kegiatan	Kelompok Substansi kelembagaan pelatihan kerja	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK

Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

1	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang	Kelompok Substansi Sertifikasi dan Prodktifitas Tenaga Kerja	Tahun 2021 Disnakertrans	√	√		BK

2	Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Tahun 2021 s/d 2026	Kelompok Substansi Sertifikasi dan Prodktifitas Tenaga Kerja	Tahun 2023 Disnakertrans	√	√		BK
3	Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kelompok Substansi Sertifikasi dan Prodktifitas Tenaga Kerja	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
4	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (DPA) Nomor 900.1.2.4/44/DPA/2024	Kelompok Substansi Sertifikasi dan Prodktifitas Tenaga Kerja	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (Kak) Sub Kegiatan	Kelompok Substansi Sertifikasi dan Prodktifitas Tenaga Kerja	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Kegiatan : Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pelayanan antar Kerja

1	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tahun 2021 Disnakertrans	√	√		BK
2	Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Tahun 2021 s/d 2026	Kelompok Sub Substansi Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tahun 2023 Disnakertrans	√	√		BK
3	Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 068/PPTK/13/2023 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (Ak/I) Berbasis E-Ttd	Kelompok Sub Substansi Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tahun 2023 Disnakertrans	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (Kak) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK

Sub Kegiatan : Perluasan Kesempatan Kerja

1	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tahun 2021 Disnakertrans	√	√		BK
2	Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Tahun 2021 s/d 2026	Kelompok Sub Substansi Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tahun 2023 Disnakertrans	√	√		BK
3	Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (Kak) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK

Kegiatan : Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

1	Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Penempatan Dan Perlindungan PMI	Kelompok Sub Substansi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri	Tahun 2020 Disnakertrans	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri	Tahun 2021 Disnakertrans	√	√		BK
3	Standar Operasional Prosedur Nomor 068/ PPTK/ 04/2015 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Pendaftaran Dan Seleksi CPMI	Kelompok Sub Substansi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri	Tahun 2023 Disnakertrans	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (Kak) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK

Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran

1	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri	Tahun 2021 Disnakertrans	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 336 Tentang LTSA PMI. Pengganti Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan PTSP	Kelompok Sub Substansi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri	Tahun 2023 Disnakertrans	√	√		BK
3	Standar Operasional Prosedur Nomor 068/ PPTK/ 04/2015 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Pendaftaran Dan Seleksi CPMI	Kelompok Sub Substansi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri	Tahun 2022 Disnakertrans	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (Kak) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK

Kegiatan : Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah	Kelompok Sub Substansi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri	Tahun 2023 Disnakertrans	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri	Tahun 2023 Disnakertrans	√	√		BK
3	Standar Operasional Prosedur Nomor 068/ PPTK/ 11/ 2015 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Penerbitan Perpanjangan IMTA	Kelompok Sub Substansi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri	Tahun 2022 Disnakertrans	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (Kak) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Syarat Kerja, Jamsos dan Pengupahan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Syarat Kerja, Jamsos dan Pengupahan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan							
1	Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 560.05/Kep.503-Huk/2023 tentang Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang Periode 2023-2025	Kelompok Sub Syarat Kerja, Jamsos dan Pengupahan	Tahun 2023 Disnakertrans	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Syarat Kerja, Jamsos dan Pengupahan	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota							
1	Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 560.05/Kep.502-Huk/2023 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Karawang Periode 2023-2025	Kelompok Sub Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja	Tahun 2023 Disnakertrans	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							
Kegiatan : Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (Kak) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Transmigrasi	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (Kak) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Transmigrasi	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyuluhan Transmigrasi							
1	Standar Operasional Prosedur Nomor 068/PPTK/ 12/2022 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Penyuluhan Transmigrasi	Kelompok Sub Substansi Transmigrasi	Tahun 2022 Disnakertrans	√	√		BK

2	Kerangka Acuan Kerja (Kak) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Transmigrasi	Tahun 2024 Disnakertrans	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang						
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup						
	Indikator Program : Persentase dokumen RPPLH, KHLS, dan SLHD yang disusun	Bidang Tata Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Dokumen RPPLH	Bidang Tata Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Bidang Tata Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Bidang Tata Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Yang Disusun	Bidang Tata Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Bidang Tata Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Bidang Tata Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Bidang Tata Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
	- Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Keanekaragaman Hayati	Tahun 2024 DLH	√	√		SS

	Indikator Program : persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin pph dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	Bidang Penaatan Peraturan Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Bidang Penaatan Peraturan Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Bidang Penaatan Peraturan Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	- Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Bidang Penaatan Peraturan Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Penaatan Peraturan Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Bidang Penaatan Peraturan Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						
	Indikator Program : Persentase cakupan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Bidang Tata Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Lembaga Kemasyarakatan peserta Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Bidang Tata Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Bidang Tata Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS

	- Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Bidang Tata Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	- Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Bidang Tata Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	- Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Bidang Tata Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						
	Indikator Program : Persentase cakupan kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Bidang Tata Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Dilaksanakannya Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Tata Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Bidang Tata Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup						
	Indikator Program : Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH	Bidang Penaatan Peraturan Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Bidang Penaatan Peraturan Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Bidang Penaatan Peraturan Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS

	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Bidang Penataan Peraturan Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
9	Program Pengelolaan Persampahan						
	Indikator Program : Persentase timbulan sampah yang ditangani	Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase timbulan sampah yang ditangani	Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauren Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	- Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	- Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tahun 2024 DLH	√	√		SS

	- Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : PersentasePenerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh SwastaYang Dilaksanakan	Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : PersentasePembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak SwastaYang Dilaksanakan	Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	- Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang						
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Keanekaragaman Hayati	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Keanekaragaman Hayati	Tahun 2024 DLH	√	√		SS

3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Keanekaragaman Hayati	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
4	Persentase Timbunan Sampah di Perkotaan yang Tertangani dengan Baik	Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
C.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang						
	Urusan Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Keanekaragaman Hayati	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Bidang Penaatan Peraturan Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
E.	Daftar Data Statistik Sektoral Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang						
1	Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Menurut Kecamatan di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
2	Jumlah Kendaraan Operasional Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
3	Rekapitulasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengaduan Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Keanekaragaman Hayati	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
4	Rekapitulasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
5	Jumlah Ijin Lingkungan, Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Ijin TPS B3) dan Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air (IPALASA) di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah	Tahun 2024 DLH	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Dinas Lingkungan Hidup Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Dinas Lingkungan Hidup (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 DLH	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DLH	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DLH	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
9	Agenda surat Dinas Lingkungan Hidup	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DLH	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DLH	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DLH	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DLH	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DLH	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DLH	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DLH	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DLH	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Dinas Lingkungan Hidup	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 DLH	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DLH	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DLH	√	√		SS
G. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang							
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							
Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub-Substansi Pengkajian Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tahun 2024 DLH	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub-Substansi Pengkajian Dampak Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub-Substansi Pengkajian Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub-Substansi Pengendalian Pencemaran	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub-Substansi Pengendalian Perubahan Iklim	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala UPTD laboratorium LH	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub-Substansi Pengkajian Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							
Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub-Substansi Pertamanan dan Keanekaragaman Hayati	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub-Substansi Pertamanan dan Keanekaragaman Hayati	Tahun 2024 DLH	√	√		BK

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							
Kegiatan : Penyimpanan sementara Limbah B3							
Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3							
1	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Kelompok Sub-Substansi Pengendalian B3, Limbah B3 dan Limbah Non B3	Tahun 2022 DLH	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub-Substansi Pengendalian B3, Limbah B3 dan Limbah Non B3	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
Kegiatan : Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub-Substansi Pengendalian B3, Limbah B3 dan Limbah Non B3	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas LH Nomor: 660.1/Kep.01/2023 Tahun 2023 Tentang Petugas Patroli Sungai pada DLH Tahun 2023	Kelompok Sub-Substansi Pengawasan	Tahun 2023 DLH	√	√		BK
2	Standar Operasional Prosedur Pengawasan	Kelompok Sub-Substansi Pengawasan	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub-Substansi Pengawasan	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH							
1	Standar Operasional Prosedur Pengawasan	Kelompok Sub-Substansi Pengkajian Dampak Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub-Substansi Pengkajian Dampak Lingkungan	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							

Sub Kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub-Substansi Pengembangan Kapasitas dan Kemitraan	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub-Substansi Pengembangan Kapasitas dan Kemitraan	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub-Substansi Pengembangan Kapasitas dan Kemitraan	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							
Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota							
1	Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kelompok Sub-Substansi Pengaduan	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub-Substansi Pengaduan	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan							
1	SK Kepala Dinas LH Nomor 600.4.16.2/Kep. 100/PPL/2024 Tahun 2024 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah PT Textile One Indonesia	Kelompok Sub-Substansi Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
2	SK Kepala Dinas LH Nomor 600.4.16.2/Kep. 101/PPL/2024 Tahun 2024 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah PT Sapta Kurnia Abadi	Kelompok Sub-Substansi Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
3	SK Kepala Dinas LH Nomor 600.4.16.2/Kep. 476/PPL/2024 Tahun 2024 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah PT Mahakarya Reksawarga	Kelompok Sub-Substansi Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi	Tahun 2024 DLH	√	√		BK

4	SK Kepala Dinas LH Nomor 600.4.16.2/Kep. 495/PPL/2024 Tahun 2024 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah PT Budi Mulia Karunia Abadi	Kelompok Sub-Substansi Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
5	SK Kepala Dinas LH Nomor 600.4.16.2/Kep. 985/PPL/2024 Tahun 2024 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	Kelompok Sub-Substansi Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
6	SK Kepala Dinas LH Nomor 600.4.16.2/Kep. 1101/PPL/2024 Tahun 2024 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah PT Graha Buana Prima	Kelompok Sub-Substansi Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
7	SK Kepala Dinas LH Nomor 600.4.16.2/Kep. 1261/PPL/2024 Tahun 2024 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah PT Innovindo Kreasi Bersama	Kelompok Sub-Substansi Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
8	SK Kepala Dinas LH Nomor 600.4.16.2/Kep. 2299/PPL/2024 Tahun 2024 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Kelompok Sub-Substansi Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
9	SK Kepala Dinas LH Nomor 600.4.16.2/Kep. 2679/PPL/2024 Tahun 2024 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah PT Harapan Anang Bakri & Sons	Kelompok Sub-Substansi Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
10	SK Kepala Dinas LH Nomor 600.4.16.2/Kep. 2771/PPL/2024 Tahun 2024 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah PT Maligi Permata Industrial Estate	Kelompok Sub-Substansi Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
11	SK Kepala Dinas LH Nomor 600.4.16.2/Kep. 2770/PPL/2024 Tahun 2024 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah PT Karawang Tatabina Industrial Estate	Kelompok Sub-Substansi Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi	Tahun 2024 DLH	√	√		BK

12	SK Kepala Dinas LH Nomor 600.4.16.2/Kep. 677/PPL/2024 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah PT Vamindo Jaya	Kelompok Sub-Substansi Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
13	SK Kepala Dinas LH Nomor 600.4.16.2/Kep. 678/PPL/2024 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah CV Mitra Bangun Bersama	Kelompok Sub-Substansi Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
14	SK Kepala Dinas LH Nomor 600.4.16.2/Kep. 1808/PPL/2024 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah PT Budi Mulia Karunia Abadi	Kelompok Sub-Substansi Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
15	SK Kepala Dinas LH Nomor 600.4.16.2/Kep. 1873/PPL/2024 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah PT Mahakarya Reksawarga	Kelompok Sub-Substansi Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
16	SK Kepala Dinas LH Nomor 600.4.16.2/Kep. 1974/PPL/2024 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah PT Idemitsu Lube Techno Indonesia	Kelompok Sub-Substansi Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
17	SK Kepala Dinas LH Nomor 600.4.16.2/Kep. 1773/PPL/2024 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Yayasan Badan Rumah Sakit Gereja Kristen Pasundan	Kelompok Sub-Substansi Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
18	Standar Operasional Prosedur Penerapan Sanksi	Kelompok Sub-Substansi Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
19	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub-Substansi Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi	Tahun 2024 DLH	√	√		BK

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Kegiatan : Pengelolaan Sampah

Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

1	Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik	Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Kebersihan	Tahun 2021 DLH	√	√		BK

2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub-Substansi Pengelolaan Sampah	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali							
1	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah	Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Kebersihan	Tahun 2017 DLH	√	√		BK
2	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Bank Sampah	Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Kebersihan	Tahun 2023 DLH	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategis Kabupaten Karawang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Kebersihan	Tahun 2018 DLH	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik	Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Kebersihan	Tahun 2021 DLH	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Kebersihan	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah	Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Kebersihan	Tahun 2017 DLH	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategis Kabupaten Karawang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Kebersihan	Tahun 2018 DLH	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Kebersihan	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan							
1	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Bank Sampah		Tahun 2023 DLH	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik	Kelompok Sub-Substansi Pengelolaan Sampah	Tahun 2021 DLH	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub-Substansi Pengelolaan Sampah	Tahun 2024 DLH	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub-Substansi Pengelolaan Sampah	Tahun 2024 DLH	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Padan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang						
1	Program Pendaftaran Penduduk						
	Indikator Program : Persentase kegiatan pada program pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Capaian Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS

	- Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Capaian Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Capaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						

	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
2	Program Pencatatan Sipil						
	Indikator Program : Persentase kegiatan pada program pencatatan sipil yang dilaksanakan	Bidang Pencatatan Sipil	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Capaian Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Bidang Pencatatan Sipil	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Bidang Pencatatan Sipil	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Bidang Pencatatan Sipil	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Bidang Pencatatan Sipil	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Bidang Pencatatan Sipil	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Bidang Pencatatan Sipil	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						

	Indikator Program : Persentase kegiatan pada program PIAK yang dilaksanakan	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Capaian Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Capaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS

	- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
	- Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang						
1	Persentase cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
2	Persentase Cakupan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
3	Persentase Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	Bidang Pencatatan Sipil	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Sekretariat	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
C.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang						
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Perekaman KTP elektronik	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
2	Kepemilikan akta kelahiran	Bidang Pencatatan Sipil	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
3	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS

D.	Daftar Data Berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang						
1	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Bidang Pencatatan Sipil	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
2	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Bidang Pencatatan Sipil	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
3	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Bidang Pencatatan Sipil	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
E.	Daftar Data Statistik Sektoral Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang						
1	Jumlah Penduduk berdasarkan Agama di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
2	Jumlah Penduduk berdasarkan Golongan Darah di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
3	Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
4	Jumlah Penduduk berdasarkan Kepala Keluarga dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
5	Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
6	Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
7	Jumlah Penduduk berdasarkan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
8	Jumlah Penduduk berdasarkan Rasio Ketergantungan (dependency ratio) di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
9	Jumlah Penduduk berdasarkan Sex Ratio (Rasio Jenis Kelamin) di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS

10	Jumlah Penduduk berdasarkan Wajib KTP dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
11	Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
12	Komposisi Penduduk berdasarkan Status Perkawinan dan Kelompok Usia di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
13	Realisasi Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
14	Realisasi Penerbitan Akta Perceraian dan Akta Perkawinan berdasarkan Agama di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
15	Rekapitulasi Mutasi Kependudukan di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
F.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang						
	Kepala Sub Bagian Keuangan						
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK

4	<u>Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id</u>	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							
1	Informasi tentang profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 Disdukcapil	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK

6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
9	Agenda surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disdukcapil	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disdukcapil	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disdukcapil	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disdukcapil	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disdukcapil	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disdukcapil	√	√		BK

	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disdukcapil	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Disdukcapil	√	√		SS

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							
Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk							
Sub Kegiatan : Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2021 Disdukcapil	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2021 Disdukcapil	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk							
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2021 Disdukcapil	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2021 Disdukcapil	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pendaftaran Penduduk	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2021 Disdukcapil	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2021 Disdukcapil	√	√		BK

3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk							
Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Tahun 2021 Disdukcapil	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Tahun 2021 Disdukcapil	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
PROGRAM PENCATATAN SIPIL							
Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil							
Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Pencatatan Sipil	Tahun 2021 Disdukcapil	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang	Bidang Pencatatan Sipil	Tahun 2021 Disdukcapil	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pencatatan Sipil	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
Sub Kegiatan : Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Pencatatan Sipil	Tahun 2021 Disdukcapil	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang	Bidang Pencatatan Sipil	Tahun 2021 Disdukcapil	√	√		BK

3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pencatatan Sipil	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							
Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							
Sub Kegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2021 Disdukcapil	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2021 Disdukcapil	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
Sub Kegiatan : Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2021 Disdukcapil	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2021 Disdukcapil	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK
Sub Kegiatan : Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2021 Disdukcapil	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2021 Disdukcapil	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	Tahun 2024 Disdukcapil	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, serta Indikator Sub Kegiatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang						
1	Program Penataan Desa						
	Indikator Program : Persentase (%) Penataan Desa di Kabupaten Karawang	Bidang Penyelenggaraan Penataan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Desa Yang Ditata	Bidang Penyelenggaraan Penataan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Bidang Penyelenggaraan Penataan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	- Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Bidang Penyelenggaraan Penataan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	- Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Bidang Penyelenggaraan Penataan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Bidang Penyelenggaraan Penataan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
2	Program Peningkatan Kerja Sama Desa						
	Indikator Program : Persentase (%) Desa yang Melakukan Kerjasama	Bidang Kerjasama Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Desa Yang Melaksanakan Kerja Sama	Bidang Kerjasama Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Bidang Kerjasama Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Bidang Kerjasama Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Bidang Kerjasama Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS

3	Program Administrasi Pemerintahan Desa						
	Indikator Program : % Desa yang memiliki administrasi desa sesuai peraturan perundang undangan	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : % Desa yang memiliki administrasi desa sesuai peraturan perundang undangan	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Desa	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	- Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dadn Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Profil Desa	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	- Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat						

	Indikator Program : % Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPMD, RTRW, Posyandu, Karangtaruna dan Lembaga Adat Yang Berdaya	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang						
1	Persentase peningkatan status Desa Mandiri	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS

2	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang							
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Persentase peningkatan satatus desa mandiri'	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang							
1	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
2	Jumlah desa tertinggal.	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
3	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
E. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang							
1	Jumlah Bantuan Keuangan Yang Diterima oleh Desa/Kelurahan di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
2	Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun, RW dan RT di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
3	Penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
F. Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang							
Kepala Sub Bagian Keuangan							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK

4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di wwebsite www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							
1	Informasi tentang profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 DPMD	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK

6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
9	Agenda surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPMD	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPMD	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPMD	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPMD	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPMD	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPMD	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPMD	√	√		BK

2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 DPMD	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPMD	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPMD	√	√		SS

[illegible]

1	Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang Nomor 074.1/Kep.785-PPD/2023 Tentang Tim Penyusun Kajian Karakteristik Berdasarkan Potensi Wilayah Desa di Kabupaten Karawang Tahun 2023	Kepala Bidang Penyelenggaraan Penataan Desa	Tahun 2023 DPMD	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Bidang Penyelenggaraan Penataan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitas Penataan Kewenangan Desa							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Bidang Penyelenggaraan Penataan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitas Penamaan dan Kode Desa							
1	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pada Daerah Kabupaten Karawang	Kepala Bidang Penyelenggaraan Penataan Desa	Tahun 2023 DPMD	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Bidang Penyelenggaraan Penataan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Bidang Penyelenggaraan Penataan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA							
Kegiatan : Fasilitas Kerja Sama antar Desa							
Sub Kegiatan : Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Badan Usaha Milik Desa	Kepala Bidang Peningkatan Kerjasama Desa	Tahun 2023 DPMD	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 444 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa	Kepala Bidang Peningkatan Kerjasama Desa	Tahun 2023 DPMD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Bidang Peningkatan Kerjasama Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Bidang Peningkatan Kerjasama Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK

Sub Kegiatan : Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Bidang Peningkatan Kerjasama Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							
Sub Kegiatan : Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Desa	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2023 DPMD	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa							
1	Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2022 DPMD	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Desa	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2023 DPMD	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa							
1	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Badan Usaha Milik Desa	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2023 DPMD	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa							
1	Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2021 DPMD	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitas Penyusunan Profil Desa							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitas Pengelolaan Aset Desa							
1	Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2017 DPMD	√	√		BK

2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD							
1	Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2017 DPMD	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa							
1	Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Karawang	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2017 DPMD	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah							
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	Tahun 2024 DPMD	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang						
1	Program Pengendalian Penduduk						
	Indikator Program : Persentase Kebijakan Pengendalian Kependudukan yang disusun		Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua tim Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penduduk	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua tim Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penduduk	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS

	- Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua tim Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penduduk	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua tim Kelompok Sub Substansi Advokasi dan KIE	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua tim Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penduduk	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua tim Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penduduk	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua tim Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penduduk	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua tim Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penduduk	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS

	- Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Ketua tim Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk		Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua tim Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penduduk	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua tim Kelompok Sub Substansi Data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua tim Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penduduk	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua tim Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penduduk	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua tim Kelompok Sub Substansi Data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua tim Kelompok Sub Substansi Data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS

	- Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua tim Kelompok Sub Substansi Data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua tim Kelompok Sub Substansi Data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua tim Kelompok Sub Substansi Data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua tim Kelompok Sub Substansi Data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)						
	Indikator Program : Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR Bagi Perempuan menikah Usia 15 - 49 Tahun)		Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Advokasi dan KIE	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS

	- Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Advokasi dan KIE	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Advokasi dan KIE	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Advokasi dan KIE	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kepala Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelola POKTAN dan Stunting	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kepala Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelola PEK dan IMP	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS

	- Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Ketua Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelola PEK dan IMP	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Ketua Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelola PEK dan IMP	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Ketua Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelola PEK dan IMP	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Ratio Akseptor KB						
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelola dan distribusi alokon	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Bina Kesertaan KB	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Bina Kesertaan KB	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Bina Kesertaan KB	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS

	- Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelola dan distribusi alokon	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelola dan distribusi alokon	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Bina Kesertaan KB	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Jaminan Pelayanan KB	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Jaminan Pelayanan KB	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Jaminan Pelayanan KB	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	4. Indikator Kegiatan : Persentase Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Jaminan Pelayanan KB	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS

	- Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua tim Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penduduk	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua tim Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penduduk	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua tim Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penduduk	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
3	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)						
	Indikator Program : Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita		Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kepala Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelola POKTAN dan Stunting	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kepala Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelola POKTAN dan Stunting	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS

	- Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kepala Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelola POKTAN dan Stunting	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kepala Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelola PEK dan IMP	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kepala Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelola PEK dan IMP	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kepala Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelola POKTAN dan Stunting	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kepala Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelola POKTAN dan Stunting	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kepala Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelola POKTAN dan Stunting	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Ketua Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua tim Pengendalian Penduduk	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS

	2. Indikator Kegiatan : Persentase Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kepala Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelola POKTAN dan Stunting	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kepala Bidang Pengendaian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Advokasi dan KIE	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kepala Bidang Pengendaian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Advokasi dan KIE	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kepala Bidang Pengendaian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Advokasi dan KIE	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang						
1	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS

2	Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS Usia 15 - 49 Tahun	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
3	Median Usia Kawin Pertama Wanita	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
C.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang						
	Urusan Keluarga Berencana						
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
D.	Daftar Data Berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang						
1	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
2	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
3	Persentase Unmet Need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB Yang Tidak Terpenuhi) Menurut Provinsi	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
4	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
5	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
6	Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-19 Tahun Menurut Provinsi	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS

E.	Daftar Data Statistik Sektoral Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang						
1	Banyaknya Klinik Keluarga Berencana dan Pos Keluarga Desa Menurut kecamatan di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, dan Ketua Tim Data dan informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
2	Banyaknya PIK KRR, Pendidik Sebaya dan Konselor (PS/PK), Forum Peduli Kependudukan, IPPKKB, Juang Kencana dan Forum Antar Umat Beragama di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kepala Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga, dan ketua tim Poktan dan STUNTING	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
3	Banyaknya PPKBD, Sub PPKBD, TPD, Poktan BKB, BKB HI, Poktan BKR Paripurna dan UPPKS di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kepala Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga, dan Ketua Tim PEK dan IMP	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
4	Jumlah Kampung KB, KB Perusahaan, Kelompok KB Pria, PKBRS dan Desa Binaan Kesatuan Gerak PKK di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi Data dan Informasi, dan Ketua Tim Pengendalian Penduduk	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
5	Jumlah Peserta KB Baru menurut jenis kontrasepsi di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kepala Bidang Keluarga Berencana, dan Ketua Tim Kelompok Substansi Kesertaan KB	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
6	Jumlah PUS dan Peserta KB Aktif menurut jenis kontrasepsi di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kepala Bidang Keluarga Berencana, dan Ketua Tim Kelompok Substansi Kesertaan KB	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
F.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawar						
	Kepala Sub Bagian Keuangan						
	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
1	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK

3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							
1	Informasi tentang profil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 DPPKB	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK

6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPPKB	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
9	Agenda surat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPPKB	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPPKB	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPPKB	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPPKB	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPPKB	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPPKB	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPPKB	√	√		BK

2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPPKB	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 DPPKB	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPPKB	√	√		SS

[illegible]

Sub Kegiatan : Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas PPKB Nomor 800.1.13.1/70/DPPKB Tahun 2024 Tentang Tim Kerja Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penduduk	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penduduk	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penduduk	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas PPKB Nomor 800.1.13.1/71/DPPKB Tahun 2024 Tentang Tim Kerja Kelompok Sub Substansi Data dan Informasi	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas PPKB Nomor 800.1.13.1/71/DPPKB Tahun 2024 Tentang Tim Kerja Kelompok Sub Substansi Data dan Informasi	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas PPKB Nomor 800.1.13.1/71/DPPKB Tahun 2024 Tentang Tim Kerja Kelompok Sub Substansi Data dan Informasi	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas PPKB Nomor 800.1.13.1/71/DPPKB Tahun 2024 Tentang Tim Kerja Kelompok Sub Substansi Data dan Informasi	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK

2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Data dan Informasi	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal							
Sub Kegiatan : Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas PPKB Nomor 800.1.13.1/78/DPPKB Tahun 2024 Tentang Tim Kerja Kelompok Sub Substansi Advokasi KIE	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Advokasi dan KIE	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Advokasi dan KIE	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas PPKB Nomor 800.1.13.1/78/DPPKB Tahun 2024 Tentang Tim Kerja Kelompok Sub Substansi Advokasi KIE	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Advokasi dan KIE	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Advokasi dan KIE	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas PPKB Nomor 800.1.13.1/78/DPPKB Tahun 2024 Tentang Tim Kerja Kelompok Sub Substansi Advokasi KIE	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Advokasi dan KIE	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Advokasi dan KIE	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas PPKB Nomor 800.1.13.1/78/DPPKB Tahun 2024 Tentang Tim Kerja Kelompok Sub Substansi Advokasi KIE	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Advokasi dan KIE	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Advokasi dan KIE	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)							

1	Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Nomor 800.1.13 /340/Sekret Tahun 2024 Tentang Ketua Tim Sub Substansi Poktan dan Stunting	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Poktan dan Stunting	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Poktan dan Stunting	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengendalian Program KKBPK							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Nomor 800.1.13 /340/Sekret Tahun 2024 Tentang Ketua Tim Sub Substansi Poktan dan Stunting	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Poktan dan Stunting	Tahun 2024, DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Poktan dan Stunting	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							
Sub Kegiatan : Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Nomor 800.1.13 /341/Sekret Tahun 2024 Tentang Ketua Tim Sub Substansi PEK dan IMP	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi PEK dan IMP	Tahun 2024, DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi PEK dan IMP	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penguatan Pelaksanaan Penyuluh, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Nomor 800.1.13 /341/Sekret Tahun 2024 Tentang Ketua Tim Sub Substansi PEK dan IMP	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi PEK dan IMP	Tahun 2024, DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi PEK dan IMP	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)							

1	Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Nomor 800.1.13 /341/Sekret Tahun 2024 Tentang Ketua Tim Sub Substansi PEK dan IMP	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi PEK dan IMP	Tahun 2024, DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi PEK dan IMP	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas PPKB Nomor 800.1.13.1/70/DPPKB Tahun 2024 Tentang Tim Kerja Kelompok Sub Substansi Pengelolaan dan Distribusi Alokon	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelolaan dan Distribusi Alokon	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelolaan dan Distribusi Alokon	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas PPKB Nomor 800.1.13.1/73/DPPKB Tahun 2024 Tentang Tim Kerja Kelompok Sub Substansi Bina Kesertaan KB	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Bina Kesertaan KB	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub SubstansiBina Kesertaan KB	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas PPKB Nomor 800.1.13.1/70/DPPKB Tahun 2024 Tentang Tim Kerja Kelompok Sub Substansi Pengelolaan dan Distribusi Alokon	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelolaan dan Distribusi Alokon	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelolaan dan Distribusi Alokon	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
Sub Kegiatan : Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas PPKB Nomor 800.1.13.1/70/DPPKB Tahun 2024 Tentang Tim Kerja Kelompok Sub Substansi Pengelolaan dan Distribusi Alokon	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelolaan dan Distribusi Alokon	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK

2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengelolaan dan Distribusi Alokon	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							
Sub Kegiatan : Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas PPKB Nomor 800.1.13.1/78/DPPKB Tahun 2024 Tentang Tim Kerja Kelompok Sub Substansi Advokasi KIE	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Advokasi dan KIE	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Advokasi dan KIE	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
Sub Kegiatan : Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas PPKB Nomor 800/842/DPPKB/2021 Tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penduduk	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penduduk	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas PPKB Nomor 800/842/DPPKB/2021 Tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penduduk	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Pengendalian Penduduk	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Nomor 800.1.13 /340/Sekret Tahun 2024 Tentang Ketua Tim Sub Substansi Poktan dan Stunting	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Poktan dan Stunting	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Poktan dan Stunting	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK

Sub Kegiatan : Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

1	Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Nomor 800.1.13 /340/Sekret Tahun 2024 Tentang Ketua Tim Sub Substansi Poktan dan Stunting	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Poktan dan Stunting	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Poktan dan Stunting	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK

Sub Kegiatan : Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

1	Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Nomor 800.1.13 /340/Sekret Tahun 2024 Tentang Ketua Tim Sub Substansi Poktan dan Stunting	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Poktan dan Stunting	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Poktan dan Stunting	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK

Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

1	Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Nomor 800.1.13 /340/Sekret Tahun 2024 Tentang Ketua Tim Sub Substansi Poktan dan Stunting	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Poktan dan Stunting	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Poktan dan Stunting	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK

Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

1	Surat Keputusan Bupati Nomor 476/Kep. 337-Huk/2023	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga, Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Poktan dan Stunting	Tahun 2023, DPPKB	√	√		BK

2	Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Nomor 800.1.13 /340/Sekret Tahun 2024 Tentang Ketua Tim Sub Substansi Poktan dan Stunting	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Poktan dan Stunting	Tahun 2024, DPPKB	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Poktan dan Stunting	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
Sub Kegiatan : Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Nomor 800.1.13 /340/Sekret Tahun 2024 Tentang Ketua Tim Sub Substansi Poktan dan Stunting	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Poktan	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Poktan dan Stunting	Tahun 2024 DPPKB	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang						
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)						
	Indikator Program : Persentase pemenuhan Penyelenggaraan LLAJ	Bidang Prasarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Presentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	Bidang Prasarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Bidang Prasarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	- Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Bidang Prasarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	- Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Bidang Prasarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	- Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Bidang Prasarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Presentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	UPTD Terminal	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	UPTD Terminal	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	UPTD Perparkiran	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	UPTD Perparkiran	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS

	4. Indikator Kegiatan : Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	- Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	5. Indikator Kegiatan : Persentase Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Bidang Lalu Lintas	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Bidang Lalu Lintas	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Bidang Lalu Lintas	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Bidang Lalu Lintas	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	6. Indikator Kegiatan : Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Kasi manajemen dan Analisis Dampak Lalu Lintas	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Kasi manajemen dan Analisis Dampak Lalu Lintas	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	7. Indikator Kegiatan : Persentase Audit dan Inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS

	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	8. Indikator Kegiatan : Persentase Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ata barang antar kota	Bidang Angkutan dan Sarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Bidang Angkutan dan Sarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Bidang Angkutan dan Sarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	9. Indikator Kegiatan : Persentase penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang	Bidang Angkutan dan Sarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Angkutan dan Sarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	- Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Angkutan dan Sarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS

	- Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Angkutan dan Sarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
2	Program Pengelolaan Pelayaran						
	Indikator Program : Persentase program pengelolaan pelayaran	UPTD Pelayaran dan Pelabuhan	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	UPTD Pelayaran dan Pelabuhan	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang tersedia	UPTD Pelayaran dan Pelabuhan	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
3.	Program Pengelolaan Perkeretaapian						
	Indikator Program : Persentase program pengelolaan Perkeretaapian	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Tahun 2024 Dishub				
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang						
1	Persentase peningkatan prasarana perhubungan	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
2	Rasio konektivitas kabupaten / kota	Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
3	V/C Rasio di Jalan Kabupaten	Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS

C.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang						
	Urusan Perhubungan						
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
2	V/C Rasio di Jalan Kabupaten	Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
D.	Daftar Data Berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang						
1	Jumlah dermaga penyeberangan.	Kepala UPTD Pelayaran dan Pelabuhan	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
2	Jumlah pelabuhan strategis.	Kepala UPTD Pelayaran dan Pelabuhan	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
E.	Daftar Data Statistik Sektoral Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang						
1	Kondisi Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum	Kepala Bidang Angkutan dan Sarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
2	Rekapitulasi PAD yang Diperoleh Dishub	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
3	Rekapitulasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	<u>UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor</u>	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
4	Rekapitulasi Perlengkapan Jalan	Kepala Bidang Prasarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
F.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang						
Kepala Sub Bagian Keuangan							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK

4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							
1	Informasi tentang profil Dinas Perhubungan Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Dinas Perhubungan (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Dinas Perhubungan setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 Dishub	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Dinas Perhubungan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK

7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
9	Agenda surat Dinas Perhubungan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
Kelompok Sub Bagian Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Dishub	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Dishub	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Dishub	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Dishub	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Dishub	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Dishub	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Dishub	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Dinas Perhubungan	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Dinas Perhubungan	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Dishub	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Dishub	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dishub	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
G. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang							
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang	Bidang Prasarana	Tahun 2021 Dishub	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan	Bidang Prasarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang	Bidang Prasarana	Tahun 2021 Dishub	√	√		BK

2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan di Kabupaten Karawang	Bidang Prasarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan							
1	Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang	Bidang Prasarana	Tahun 2021 Dishub	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Bidang Prasarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan							
1	Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang	Bidang Prasarana	Tahun 2021 Dishub	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Bidang Prasarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C							
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C							
1	Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Terminal	UPTD Terminal	Tahun 2012 Dishub	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Termial Tipe C	UPTD Terminal	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran	UPTD Perparkiran	Tahun 2018 Dishub	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 328 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran	UPTD Perparkiran	Tahun 2018 Dishub	√	√		BK

1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Tahun 2018 Dishub	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Tahun 2018 Dishub	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Tahun 2018 Dishub	√	√		BK
2	Standar Operasional Prosedur Nomor 551/04/Dishub/2018 Tahun 2018 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Tahun 2018 Dishub	√	√		BK
3	Standar Operasional Prosedur Nomor 551/04/Dishub/2018 Tahun 2018 Tentang Mutasi Keluar Uji	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Tahun 2018 Dishub	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 551/04/Dishub/2018 Tahun 2018 Tentang Mutasi Uji Masuk	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Tahun 2018 Dishub	√	√		BK
5	Standar Operasional Prosedur Nomor 551/04/Dishub/2018 Tahun 2018 Tentang Numpang Uji Masuk	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Tahun 2018 Dishub	√	√		BK

6	Standar Operasional Prosedur Nomor 551/04/Dishub/2018 Tahun 2018 Tentang Numpang Uji Keluar	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Tahun 2018 Dishub	√	√		BK
7	Standar Operasional Prosedur Nomor 551/04/Dishub/2018 Tahun 2018 Tentang Pengujian Pertama Kali	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Tahun 2018 Dishub	√	√		BK
8	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Tahun 2023 Dishub	√	√		BK

Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan	Bidang Lalu Lintas	Tahun 2020 Dishub	√	√		BK
2	Standar Operasional Prosedur Nomor 551/03/Dishub/2018 Tahun 2018 Tentang SOP Pengaturan Lalu Lintas	Bidang Lalu Lintas	Tahun 2018 Dishub	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Bidang Lalu Lintas	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Bidang Lalu Lintas	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK

Sub Kegiatan : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Kabupaten/Kota

1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Lalu Lintas	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
2	Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 551.05/Kep.202-Huk/2015 Tahun 2015 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Karawang	Bidang Lalu Lintas	Tahun 2015 Dishub	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Bidang Lalu Lintas	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK

Kegiatan : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kasi manajemen dan Analisis Dampak Lalu Lintas	Tahun 2013 Dishub	√	√		BK
2	Standar Operasional Prosedur Nomor 551/03/Dishub/2018 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Rekomendasi Analis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	Kasi manajemen dan Analisis Dampak Lalu Lintas	Tahun 2018 Dishub	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Kasi manajemen dan Analisis Dampak Lalu Lintas	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
Kegiatan : Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Tahun 2023 Dishub	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Angkutan dan Sarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Bidang Angkutan dan Sarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
Kegiatan : Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Angkutan dan Sarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Angkutan dan Sarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Angkutan dan Sarana	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							
Kegiatan : Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal							
Sub Kegiatan : Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal							

1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayaran dan Pelabuhan Kelas A Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang	UPTD Pelayaran dan Pelabuhan	Tahun 2018 Dishub	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal	UPTD Pelayaran dan Pelabuhan	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN							
Kegiatan : Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayaran dan Pelabuhan Kelas A Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang	UPTD Pelayaran dan Pelabuhan	Tahun 2018 Dishub	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	UPTD Pelayaran dan Pelabuhan	Tahun 2024 Dishub	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang						
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam						
	Indikator Program : Persentase pertumbuhan koperasi baru	Bidang Pemberdayaan dan Perizinan Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/KotaYang_Dilaksanakan	Bidang Pemberdayaan dan Perizinan Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pemberdayaan dan Perizinan Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : PersentasePenerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/KotaYang_Dilaksanakan	Bidang Pemberdayaan dan Perizinan Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pemberdayaan dan Perizinan Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS

2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi						
	Indikator Program : Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan kewilayahan daerah kabupaten kota	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	- Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi						
	Indikator Program : Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase KSP/USP Aktif	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	- Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian						

	Indikator Program : Persentase koperasi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan untuk koperasi	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	1.Indikator Kegiatan : Persentase Koperasi Aktif	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaYang Dilaksanakan	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	- Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi						
	Indikator Program : Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)						
	Indikator Program : Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						

	- Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	- Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	- Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	- Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	- Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	- Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
7	Program Pengembangan UMKM						
	Indikator Program : Persentase Usaha Mikro Yang dikembangkan	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Usaha Mikro Yang Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang						
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
2	Persentase Usaha mikro Menjadi Usaha Kecil (naik Kelas)	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS

C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang							
	Urusan Koperasi dan UMKM						
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Kabid Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
D. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang							
1	Data Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha UMKM di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
2	Jumlah Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak Aktif Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
3	Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Non KUD di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
4	Jumlah Koperasi yang Melaporkan RAT dan Tidak Melaporkan RAT di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
E. Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang							
Kepala Sub Bagian Keuangan							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK

4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							
1	Informasi tentang profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 DinkopUKM	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK

6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
9	Agenda surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DinkopUKM	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DinkopUKM	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DinkopUKM	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DinkopUKM	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DinkopUKM	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DinkopUKM	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DinkopUKM	√	√		BK

2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 DinkopUKM	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DinkopUKM	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		SS

1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Perizinan Koperasi	Tahun 2022 DinkopUKM	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 378 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Perizinan Koperasi	Tahun 2023 DinkopUKM	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan asilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pemberdayaan Perizinan Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							
Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							
Sub Kegiatan : Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2022 DinkopUKM	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 378 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2023 DinkopUKM	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2022 DinkopUKM	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 378 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2023 DinkopUKM	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							
Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2022 DinkopUKM	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 378 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2023 DinkopUKM	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							
Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Perizinan Koperasi	Tahun 2022 DinkopUKM	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 378 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Perizinan Koperasi	Tahun 2023 DinkopUKM	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Bidang Pemberdayaan Perizinan Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							
Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2022 DinkopUKM	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 378 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2023 DinkopUKM	√	√		BK

3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2022 DinkopUKM	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 378 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2023 DinkopUKM	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2022 DinkopUKM	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 378 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2023 DinkopUKM	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2022 DinkopUKM	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 378 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2023 DinkopUKM	√	√		BK

3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							
Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							
Sub Kegiatan : Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2022 DinkopUKM	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 378 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2023 DinkopUKM	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Tahun 2024 DinkopUKM	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang						
1	Program Promosi Penanaman Modal						
	Indikator Program : Presentase Realisasi Promosi Penanaman Modal yang sesuai dengan strategi perencanaan	Kelompok Substansi Penanaman Modal	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Kelompok Substansi Penanaman Modal	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kelompok Substansi Penanaman Modal	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
3	Program Pelayanan Penanaman Modal						
	Indikator Program : Presentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	Kelompok Substasin Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal Yang Dilayani	Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Ketua Tim Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
	- Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Ketua Tim Publikasi, Konsultasi, Pengaduan, dan Penyuluhan Perizinan	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS

4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						
	Indikator Program : Presentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
	- Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
	- Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal						
	Indikator Program : Persentase Pemanfaat Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dapat dipenuhi	Kelompok Substansi Penanaman Modal	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Kelompok Substansi Penanaman Modal	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
	- Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kelompok Substansi Penanaman Modal	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS

B. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang							
1	Nilai realisasi investasi	Kelompok Substansi Penanaman Modal	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sekretariat	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang							
	Urusan Penanaman Modal						
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	Kelompok Substansi Penanaman Modal	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
D. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang							
1	Jumlah perijinan menurut jenisnya yang diterbitkan di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kelompok Substansi Penanaman Modal	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
2	Rekapitulasi Data dan Informasi Penanaman Modal di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kelompok Substansi Penanaman Modal	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
3	Rekapitulasi Jenis Industri Berdasarkan Pemodalan di Kab. Karawang Tahun 2024	Bidang Penanaman Modal	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
E. Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang							
Kepala Sub Bagian Keuangan							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK

4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							
1	Informasi tentang profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 DPMPTSP	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK

6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
9	Agenda surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPMPTSP	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPMPTSP	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPMPTSP	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPMPTSP	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPMPTSP	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPMPTSP	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPMPTSP	√	√		BK

2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK
3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 DPMPTSP	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPMPTSP	√	√		SS

[illegible]

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Substansi Penanaman Modal	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							
Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
1	Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 503.05/Kep.351 - Huk/2022 Tahun 2022 Tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang	Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu pintu	Tahun 2022 DPMPTSP	√	√		BK
2	Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 800.22/Kep.81-Huk/2022 Tahun 2022 Tentang Penugasan Tim Profesi Ahli Kabupaten Karawang	Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu pintu	Tahun 2022 DPMPTSP	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu pintu	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK
4	SOP Pelayanan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu pintu	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK
5	Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan dan izin lainnya	Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu pintu	Tahun 2018 DPMPTSP		√		BK
6	Alur/Mekanisme Pengajuan Izin	Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu pintu	Tahun 2018 DPMPTSP	√	√		BK
7	Status dan Posisi Berkas Perizinan	Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu pintu	Tahun 2018 DPMPTSP		√		BK
8	Laporan Kegiatan Pelayanan Perizinan	Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu pintu	Tahun 2024 DPMPTSP				BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK

2	Laporan Pengaduan dan Tindaklanjut Pengaduan	Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK
3	Laporan Konsultasi	Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK
4	Rekapitulasi Pengaduan	Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK
5	Rekapitulasi Konsultasi	Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian	Tahun 2016 DPMPTSP	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK

Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian	Tahun 2023 DPMPTSP	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pengawasan Penanaman Modal

1	Surat Keputusan Bupati Nomor 800.22/ Kep. 377 - Huk/2023 Tahun 2023 Tentang Tim Pengawasan Perizinan	Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian	Tahun 2023 DPMPSTP	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian	Tahun 2024 DPMPSTP	√	√		BK

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik	Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian	Tahun 2017 DPMPTSP	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Substansi Penanaman Modal	Tahun 2024 DPMPTSP	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang						
1	Program Pengembangan Kebudayaan						
	Indikator Program : Persentase budaya karawang yang dikembangkan	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota yang akan dikelola	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Orang/Lembaga yang Mendapat Penghargaan Pemajuan Kebudayaan	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS

2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional						
	Indikator Program : Persentase kesenian tradional yang dikembangkan	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Indikator Kegiatan : Persentase Kesenian Masyarakat yang Dibina	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
3	Program Pembinaan Sejarah						
	Indikator Program : Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Pembinaan Sejarah Lokal	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya						
	Indikator Program : Persentase Cagar Budaya ditetapkan dan kelola	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Cagar Budaya yang Ditetapkan	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS

	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Cagar Budaya yang Dikelola	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
5	Program Pengelolaan Permuseuman						
	Indikator Program : Persentase Koleksi benda sejarah yang dilindungi	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Museum Kabupaten/Kota yang Dikelola	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
6	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						

	Indikator Program : Persentase destinasi wisata yang akan dikembangkan	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang Dikelola	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Lokasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Lokasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pariwisata Kabupaten/Kota	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/KotaYang Dilaksanakan	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota-	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS

	- Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	3.Indikator Kegiatan : Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
7	Program Pemasaran Pariwisata						
	Indikator Program : Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Bidang Pemasaran	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Bidang Pemasaran	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS

	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Bidang Pemasaran	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Bidang Pemasaran	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Bidang Pemasaran	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Bidang Pemasaran	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Bidang Pemasaran	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
8	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						
	Indikator Program : Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	Bidang Ekonomi Kreatif	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Bidang Ekonomi Kreatif	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Bidang Ekonomi Kreatif	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Bidang Ekonomi Kreatif	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	- Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Bidang Ekonomi Kreatif	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Dilaksanakan	Bidang Ekonomi Kreatif	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :		Tahun 2024 Disparbud				

	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Bidang Ekonomi Kreatif	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang						
1	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kabupaten Karawang	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
2	Persentase unsur pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
C.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang						
	Urusan Kebudayaan						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	Urusan Pariwisata						
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
D.	Daftar Data Berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang						
1	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
2	Jumlah wisatawan mancanegara.	Bidang Pemasaran	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
3	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
E.	Daftar Data Statistik Sektor Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang						
1	Hotel dan Penginapan menurut kualifikasi, lokasi dan Jumlah Tenaga Kerja di Kab. Karawang Tahun 2024	Bidang Pemasaran	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
2	Rekapitulasi Data dan Informasi Kepariwisataan di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS

3	Rekapitulasi Objek Wisata Sejarah menurut lokasi di Kab. Karawang Tahun 2024	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
4	Rekapitulasi Objek Wisata Budaya menurut lokasi di Kab. Karawang Tahun 2024	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
5	Rekapitulasi Objek Wisata Keagamaan menurut lokasi di Kab. Karawang Tahun 2024	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
6	Rekapitulasi Objek Wisata Kuliner menurut lokasi di Kab. Karawang Tahun 2024	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
7	Rekapitulasi Objek Wisata Sejarah menurut lokasi di Kab. Karawang Tahun 2024	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
8	Rekapitulasi PAD Sektor Pariwisata menurut objek wisata, target dan realisasi di Kab. Karawang Tahun 2024	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
9	Rekapitulasi Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya, Situs Sejarah dan Cagar Budaya di Kab. Karawang Tahun 2024	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
10	Rekapitulasi Objek Wisata Tirta menurut lokasi di Kab. Karawang Tahun 2024	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
F.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang						
Kepala Sub Bagian Keuangan							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK

4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							
1	Informasi tentang profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 Disparbud	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK

6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disparbud	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
9	Agenda surat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disparbud	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disparbud	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disparbud	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disparbud	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disparbud	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disparbud	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disparbud	√	√		BK

2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Disparbud	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disparbud	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS

9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
G. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang							
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							
Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah	Bidang Kebudayaan	Tahun 2018 Disparbud	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang	Bidang Kebudayaan	Tahun 2021 Disparbud	√	√		BK
3	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Nomor 432/63/Sekre tentang Juru Pelihara Cagar Budaya/Situs Kabupaten Karawang Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
5	Peraturan Bupati Karawang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Dewan Kebudayaan Daerah	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
6	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah	Bidang Kebudayaan	Tahun 2018 Disparbud	√	√		BK
2	Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 800.22/Kep.281-Huk/2023 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Karawang	Bidang Kebudayaan	Tahun 2023 Disparbud	√	√		BK
4	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
5	Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Nomor 432/63/Sekre tentang Juru Pelihara Cagar Budaya/Situs Kabupaten Karawang Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
6	Peraturan Bupati Karawang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Dewan Kebudayaan Daerah	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK

7	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
Kegiatan : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah	Bidang Kebudayaan	Tahun 2018 Disparbud	√	√		BK
2	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Dewan Kebudayaan Daerah	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 326 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Seniman dan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Karawang	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah	Bidang Kebudayaan	Tahun 2018 Disparbud	√	√		BK
2	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Dewan Kebudayaan Daerah	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							
Kegiatan : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang	Bidang Kebudayaan	Tahun 2021 Disparbud	√	√		BK

1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya Kabupaten Karawang	Bidang Kebudayaan	Tahun 2013 Disparbud	√	√		BK
2	Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 800.22/Kep.281-Huk/2023 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Karawang	Bidang Kebudayaan	Tahun 2023 Disparbud	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Nomor 432/63/Sekre tentang Juru Pelihara Cagar Budaya/Situs Kabupaten Karawang Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Karawang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Dewan Kebudayaan Daerah	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pemanfaatan Cagar Budaya

1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya Kabupaten Karawang	Bidang Kebudayaan	Tahun 2013 Disparbud	√	√		BK
2	Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 800.22/Kep.281-Huk/2023 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Karawang	Bidang Kebudayaan	Tahun 2023 Disparbud	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Nomor 432/63/Sekre tentang Juru Pelihara Cagar Budaya/Situs Kabupaten Karawang Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Karawang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Dewan Kebudayaan Daerah	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Kebudayaan	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK

PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Kegiatan : Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2016 Disparbud	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata di Kabupaten Karawang	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2018 Disparbud	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Wisata	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Karawang Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
5	Peraturan Bupati Karawang Nomor 301 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian, Penetapan, Pengawasan Dan Pengendalian Desa Wisata	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
6	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2016 Disparbud	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata di Kabupaten Karawang	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2018 Disparbud	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Wisata	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Karawang Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
5	Peraturan Bupati Karawang Nomor 301 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian, Penetapan, Pengawasan Dan Pengendalian Desa Wisata	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK

6	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Destinasi Pariwisata	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							
Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Pemasaran	Tahun 2019 Disparbud	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemasaran	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Pemasaran	Tahun 2019 Disparbud	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemasaran	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Pemasaran	Tahun 2019 Disparbud	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Pemasaran	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							
Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							
Sub Kegiatan : Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan	Bidang Ekonomi Kreatif	Tahun 2016 Disparbud	√	√		BK
2	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Bidang Ekonomi Kreatif	Tahun 2022 Disparbud	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 323 Tahun 2023 tentang Komite Ekonomi Kreatif Dan inofatif Kabupaten Karawang	Bidang Ekonomi Kreatif	Tahun 2023 Disparbud	√	√		BK

4	Peraturan Bupati Karawang Nomor 324 Tahun 2023 Tentang Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif, Perlindungan Usaha, Tata Cara Permohonan Izin Usaha, Dan Mekanisme Pemberian Insentif Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Bidang Ekonomi Kreatif	Tahun 2023 Disparbud	√	√		BK
5	Peraturan Bupati Karawang Nomor 325 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemenuhan Indeks Kota Kreatif	Bidang Ekonomi Kreatif	Tahun 2023 Disparbud	√	√		BK
6	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Ekonomi Kreatif	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	Bidang Ekonomi Kreatif	Tahun 2016 Disparbud	√	√		BK
2	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Bidang Ekonomi Kreatif	Tahun 2022 Disparbud	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 323 Tahun 2023 tentang Komite Ekonomi Kreatif Dan inofatif Kabupaten Karawang	Bidang Ekonomi Kreatif	Tahun 2023 Disparbud	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Karawang Nomor 324 Tahun 2023 Tentang Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif, Perlindungan Usaha, Tata Cara Permohonan Izin Usaha, Dan Mekanisme Pemberian Insentif Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Bidang Ekonomi Kreatif	Tahun 2023 Disparbud	√	√		BK
5	Peraturan Bupati Karawang Nomor 325 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemenuhan Indeks Kota Kreatif	Bidang Ekonomi Kreatif	Tahun 2023 Disparbud	√	√		BK
6	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Ekonomi Kreatif	Tahun 2024 Disparbud	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PERIKANAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Karawang						
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap						
	Indikator Program : Produksi perikanan tangkap	Bidang Perikanan Tangkap	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	Indikator Program : Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	Bidang Perikanan Tangkap	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Bidang Perikanan Tangkap	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Bidang Perikanan Tangkap	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	- Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Bidang Perikanan Tangkap	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	- Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Bidang Perikanan Tangkap	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Cakupan bina kelompok nelayan	Bidang Perikanan Tangkap	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Bidang Perikanan Tangkap	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	- Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Bidang Perikanan Tangkap	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	- Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan PenDanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (BPJS Ketenagakerjaan JKK, JKM)	Bidang Perikanan Tangkap	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS

	3. Indikator Kegiatan : Persentase Layanan yang diberikan oleh TPI	Bidang Perikanan Tangkap	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Bidang Perikanan Tangkap	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	- Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Bidang Perikanan Tangkap	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	4. Indikator Kegiatan : Persentase Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Bidang Perikanan Tangkap	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan BKP yang Diterbitkan	Bidang Perikanan Tangkap	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	- Persentase kapal penangkapan ikan yang sudah terdaftar	Bidang Perikanan Tangkap	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya						
	Indikator Program : Produksi perikanan Budidaya	Bidang Perikanan Budidaya	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : PersentasePenerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Bidang Perikanan Budidaya	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Bidang Perikanan Budidaya	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Pembudi Daya Ikan KecilYang Diberdayakan	Bidang Perikanan Budidaya	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Bidang Perikanan Budidaya	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS

	- Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Bidang Perikanan Budidaya	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	- Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Bidang Perikanan Budidaya	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	- Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Bidang Perikanan Budidaya	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Produksi perikanan Budidaya	Bidang Perikanan Budidaya	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :		Tahun 2024 Diskan				
	- Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Perikanan Budidaya	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	- Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Perikanan Budidaya	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	- Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Bidang Perikanan Budidaya	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	- Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Bidang Perikanan Budidaya	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan						
	Indikator Program : Tingkat konsumsi ikan penduduk	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	Indikator Program : Produksi olahan hasil perikanan	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						

	- Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Peserta Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Yang mendapat sertifikat	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Persentase Konsumsi ikan	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Tahun 2024 Diskan	√	√		
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	- Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	4. Indikator Kegiatan : Persentase Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perikanan Kabupaten Karawang						
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton)	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS

2	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
C.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Dinas Perikanan Kabupaten Karawang						
	Urusan Kelautan dan Perikanan						
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
D.	Daftar Data Berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Dinas Perikanan Kabupaten Karawang						
1	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
E.	Daftar Data Statistik Sektoral Pada Dinas Perikanan Kabupaten Karawang						
1	Jumlah Alat Tangkap Untuk Perikanan Tangkap berdasarkan jenis alat tangkap di Kab. Karawang tahun 2024	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
2	Jumlah kapal/perahu berdasarkan jenis kapal di Kab. Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
3	Luas Lahan Budidaya Ikan di Kab. Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
4	Produksi dan Nilai Produksi Budaya Ikan Hias berdasarkan Luas Area Budidaya di Kab. Karawang tahun 2024	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
5	Produksi dan Nilai Produksi Hasil Pengolahan Ikan di Kab. Karawang tahun 2024	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
6	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan di Kab. Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
7	Produksi Ikan Berdasarkan Perikanan Budidaya di Kab. Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS

8	Produksi Ikan Berdasarkan Perikanan Tangkap di Kab. Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
9	Rekapitulasi Komoditas Unggulan Perikanan Kab. Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
10	Rekapitulasi Pelaku Usaha Rumah Tangga Perikanan (RTP) dan Rumah Tangga Buruh Perikanan (RTBP) di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
11	Rekapitulasi Program Unggulan Perikanan di Kab. Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
12	Rekapitulasi Rata-Rata Pendapatan Masyarakat Perikanan per Tahun di Kab. Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
13	Rekapitulasi Rata-Rata Pendapatan Masyarakat Perikanan per Tahun di Kab. Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
F. Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Karawang							
Kepala Sub Bagian Keuangan							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Keuangan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Keuangan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Keuangan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Keuangan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Keuangan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK

4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Keuangan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Ketua Tim Kelompok Sub Substansi Keuangan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							
1	Informasi tentang profil Dinas Perikanan Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Dinas Perikanan (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Dinas Perikanan setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 Diskan	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Dinas Perikanan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Diskan	√	√		

7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
9	Agenda surat Dinas Perikanan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Diskan	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Diskan	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Diskan	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Diskan	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Diskan	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Diskan	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Diskan	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Dinas Perikanan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Dinas Perikanan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Diskan	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Diskan	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
G. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Karawang PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Alat Penangkapan Ikan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 178 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja	Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Tahun 2023 Diskan	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap							

1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 178 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja	Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Tahun 2023 Diskan	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 178 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	Tahun 2023 Diskan	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 178 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	Tahun 2023 Diskan	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 178 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	Tahun 2023 Diskan	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	Tahun 2022 Diskan	√	√		BK
Kegiatan : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)							
Sub Kegiatan : Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)							
1	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan	Tahun 2023 Diskan	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)							
1	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan	Tahun 2023 Diskan	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
Kegiatan : Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Alat Penangkapan Ikan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan : Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Kelompok Sub Substansi Bina Produksi dan Kelembagaan Perikanan Budidaya	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil							
Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Usaha Kecil Perikanan Budidaya	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Usaha Kecil Perikanan Budidaya	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan : Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Usaha Kecil Perikanan Budidaya	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan							
Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
Sub Kegiatan : Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan : Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							
Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil							
Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Kelembagaan dan Pengolahan Skala Mikro dan Kecil	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Bina Mutu	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota							
Sub Kegiatan : Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Logistik dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kelompok Sub Substansi Kelembagaan dan Pengolahan Skala Mikro dan Kecil	Tahun 2024 Diskan	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang						
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan						
	Indikator Program : persentase lumbung pangan aktif(%).	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : persentase lumbung pangan aktif(%).	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat						
	Indikator Program : Angka ketersediaan energi (AKE)	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Program : Angka ketersediaan protein (AKP)	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Ketersediaan pangan utama	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS

	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :	Bidang Pangan					
	- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Persentase Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Yang Dilaksanakan	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS

	4. Indikator Kegiatan : Persentase Kelompok Masyarakat yang diberdayakan dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan						
	Indikator Program : Persentase Intervensi daerah rawan pangan	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : PersentasePenyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan KecamatanYang Dilaksanakan	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Cakupan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan						

	Indikator Program : persentase pangan yang aman dikonsumsi	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Sertifikasi Keamanan Pangan Segar yang diterbitkan	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian						
	Indikator Program : Persentase terdistribusinya Sarana Pertanian		Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Yang ditangani	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	bidang TPH	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	bidang TPH	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS

- Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	bidang TPH	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
- Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
3. Indikator Kegiatan : Persentase Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak yang memenuhi standar mutu	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
Indikator Sub Kegiatan :						
- Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
- Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
4. Indikator Kegiatan : Persentase Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
Indikator Sub Kegiatan :						
- Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
- Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
5. Indikator Kegiatan : Persentase Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak beredar Yang tidak memenuhi standar	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
Indikator Sub Kegiatan :						
- Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
- Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
- Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
- Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
- Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
- Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS

	6. Indikator Kegiatan : Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian						
	Indikator Program : Persentase Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana pertanian		Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Bidang Perkebunan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS

	- Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Persentase Luas Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	4. Indikator Kegiatan : Persentase Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS

7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						
	Indikator Program : Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : PersentasePenjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/KotaYang Dilaksanakan	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : PersentasePengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/KotaYang Dilaksanakan	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						

	- Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	4. Indikator Kegiatan : Persentase Kesehatan Masyarakat Veteriner Yang Memenuhi Persyaratan Teknis	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	5. Indikator Kegiatan : Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan HewanYang_Dilaksanakan	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
8	Pogram Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian						
	Indikator Program : Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Bidang Perkebunan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Luas Wilayah Bencana Pertanian Yang Ditangani	Bidang Perkebunan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Bidang Perkebunan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS

	- Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Bidang Perkebunan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Bidang Perkebunan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Bidang Perkebunan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Bidang Perkebunan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
9	Program Penyuluhan Pertanian						
	Indikator Program : Persentase Kelompok Tani Kelas Utama	Bidang Penyuluhan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian yang Tersedia	Bidang Penyuluhan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Bidang Penyuluhan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Bidang Penyuluhan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Bidang Penyuluhan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Bidang Penyuluhan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	- Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Bidang Penyuluhan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang						
1	Pesentase Peningkatan Produktivitas Padi, Kedelai, jamur Merang dan Kopi	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
2	Persentase Peningkatan Populasi ternak	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS

3	Persentase peningkatan produksi pertanian (padi, kedelai, jamur merang, kopi, ternak)	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
4	Persentase tersedianya Sistem Informasi Pangan	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
5	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
C.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang						
	Urusan Pertanian						
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Bidang TPH	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
	Urusan Pangan						
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
D.	Daftar Data Berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang						
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Bidang Pangan	Tahun 2024DPKP	√	√		SS
2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Bidang Pangan	Tahun 2024DPKP	√	√		SS
3	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Bidang Pangan	Tahun 2024DPKP	√	√		SS
E.	Daftar Data Statistik Sektoral Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang						
1	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kab. Karawang tahun 2024	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
2	Jumlah Gapoktan, Poktan dan Anggota di Kab. Karawang tahun 2024	Bidang Penyuluhan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
3	Jumlah hasil produksi komoditi pangan utama Kab. Karawang tahun 2024	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
4	Jumlah tingkat konsumsi komoditi pangan utama Kab. Karawang tahun 2024	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS

5	Perkembangan Harga Pangan Strategis Tingkat Konsumen di Kab. Karawang Tahun 2024	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
6	Rekapitulasi Alsintan untuk Pemanenan dan Pengolahan Padi di Kab. Karawang Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
7	Rekapitulasi Luas Lahan Padi Ladang , Produksi dan Produktivitas Hasil Panen Padi Ladang di Kab. Karawang Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
8	Rekapitulasi Luas Lahan Sawah Berdasarkan Frekuensi Penanaman Padi di Kab. Karawang Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
9	Rekapitulasi Luas Lahan Sawah, Produksi dan Produktivitas Hasil Panen Padi Sawah di Kab. Karawang Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
10	Rekapitulasi Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berdasarkan status kepegawaian di Kab. Karawang Tahun 2024	Bidang Penyuluhan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
11	Rekapitulasi Produksi Palawija di Kab. Karawang Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
12	Rekapitulasi Produksi Tanaman Holtikultura di Kab. Karawang 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
F. Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang							
Kepala Sub Bagian Keuangan							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2025	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK

4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di wwebsite www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							
1	Informasi tentang profil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 DPKP	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK

6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPKP	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
9	Agenda surat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPKP	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPKP	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPKP	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPKP	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPKP	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPKP	√	√		BK

	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 DPKP	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 DPKP	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 DPKP	√	√		SS

Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Sub Kegiatan : Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

1	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Ketahanan Pangan	Bidang Pangan	Tahun 2021 DPKP	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Pangan	Bidang Pangan	Tahun 2022 DPKP	√	√		BK
3	Standar Operasional Prosedur Nomor 526/01/Pangan Tahun 2023 Tentang Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Bidang Pangan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK

Sub Kegiatan : Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

1	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Ketahanan Pangan	Bidang Pangan	Tahun 2021 DPKP	√	√		BK
2	Surat Keputusan Bupati Nomor 978/Kep. 172-Huk/2023 Tahun 2023 Tentang Kelompok Penerima Hibah Barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga pada Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2023	Bidang Pangan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
3	Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Nomor :800/Kep.275-Pangan/2023 tentang Tim Teknis sub kegiatan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal tahun 2023	Bidang Pangan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 526/02/Pangan Tahun 2023 Tentang Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bidang Pangan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

1	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Ketahanan Pangan	Bidang Pangan	Tahun 2021 DPKP	√	√		BK
2	Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Nomor 526/Kep.629-Pangan/2023 tentang Enumerator Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Bidang Pangan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
3	Standar Operasional Prosedur Nomor 526/03/Pangan Tahun 2023 Tentang Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Bidang Pangan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan							
1	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Ketahanan Pangan	Bidang Pangan	Tahun 2021 DPKP	√	√		BK
2	Surat Keputusan Bupati Nomor 978/Kep. 168-Huk/2023 Tahun 2023 Tentang Kelompok Penerima Hibah Uang Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan APBD Kabupaten Karwang Tahun 2023	Bidang Pangan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
3	Standar Operasional Prosedur Nomor 526/04/Pangan Tahun 2023 Tentang Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Bidang Pangan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Ketahanan Pangan	Bidang Pangan	Tahun 2021 DPKP	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Bidang Pangan	Tahun 2022 DPKP	√	√		BK
3	Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Nomor 800/Kep.1238-Pangan/2023 tentang Penetapan Pendamping Cadangan Pangan Masyarakat Tahun 2023	Bidang Pangan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 526/05/Pangan Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Bidang Pangan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Tahun 2024	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK

Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

1	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Ketahanan Pangan	Bidang Pangan	Tahun 2021 DPKP	√	√		BK
2	Surat Keputusan Bupati Nomor 978/Kep. 167-Huk/2023 Tentang Kelompok Penerima Bantuan Hibah Uang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada kegiatan anggota keluarga sehat pekarangan lestari (ASRI) Tahun 2023	Bidang Pangan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
3	Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Nomor :800/Kep.276-Pangan/2023 tentang Tim Teknis sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal tahun 2023	Bidang Pangan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 526/06/Pangan Tahun 2024 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK

5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							
Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Ketahanan Pangan	Bidang Pangan	Tahun 2021 DPKP	√	√		BK
2	Keputusan Bupati Nomor 800.22/Kep.171-Huk/2023 Tahun 2023 Tentang Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023	Bidang Pangan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
3	Standar Operasional Prosedur Nomor 526/10-Pangan Tahun 2023 Tentang Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Bidang Pangan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Ketahanan Pangan	Bidang Pangan	Tahun 2021 DPKP	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Keamanan Pangan di Kabupaten Karawang	Bidang Pangan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
3	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor 800.22/Kep.25-Huk/2023 Tentang Tim Teknis Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi dalam Negeri Usaha Kecil	Bidang Pangan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK

4	Standar Operasional Prosedur Nomor 526/08/Pangan Tahun 2023 Tentang Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pangan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pangan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							
Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang TPH	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
2	Peraturan Bupati nomer 100.3.3.2 / Kep.463-Huk 2024 tetang penerima manfaat bantuan bangunan green house budidaya tanaman melon Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabuapten Karawang tahun anggaran 2024	Bidang TPH	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Nomor : 100.3.3.2 / Kep 461-Huk 2024 tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Bangunan Kubung Jamur pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Bidang TPH	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
4	Keputusan Bupati Karawang Nomor: 100.3.3.2/Kep.462-Huk/2024 tentang Kelompok Tani Penerima Manfaat Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Bidang TPH	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang TPH	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang TPH	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK

2	Keputusan Bupati Karawang nomor : 100.3.3.2 / Kep.447-Huk / 2024 tentang Penerima Manfaat Sub Kegiatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan / Tumbuhan (Pupuk Hayati) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Bidang TPH	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Nomor : 500.6.7.1/Kep 487/TPH/II/2024 tentang Penunjukan, Penetapan Penerima Manfaat Sub Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan / Tumbuhan (Pengadaan Benih Padi) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Bidang TPH	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Nomor : 500.6.9/Kep 2888/SDG/TPH/X/2024 tentang Penetapan Penerima Manfaat Sub Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan / Tumbuhan (Budidaya Padi Sehat dengan Teknologi Jajar Legowo) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Bidang TPH	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
5	Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Nomor : 500.6.9/Kep 2886/SDG/TPH/X/2024 tentang Penetapan Penerima Manfaat sub peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan/Tumbuhan (Rintisan Desa Padi Organik) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Bidang TPH	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK

6	Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Nomor : 500.6.9/Kep.486/ TPH/II/2024 tentang Penunjukan, Penetapan Calon Penerima Manfaat Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan/Tumbuhan (Demplot Salibu) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Bidang TPH	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
7	Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Nomor : 500.6.7.1 / Kep.488 / TPH /II / 2024 tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Monitoring Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan / Tumbuhan Tahun Anggaran 2024	Bidang TPH	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
8	Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Nomor : 500.6.9/Kep. 2887/SDG/TPH/X/2024 tentang Penetapan Penerima Manfaat Sub Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan/Tumbuhan (Pengkajian Padi Varietas Super Genjah) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Bidang TPH	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang TPH	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK

2	Keputusan Bupati Karawang Nomor : 100.3.0.2 / Kep 447-Huk / 2024 tentang penerima manfaat sub peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan / Tumbuhan (Pupuk Hayati) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Nomor : 500.6.7.1 / Kep.488 / TPH /II / 2024 tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Monitoring Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan / Tumbuhan Tahun Anggaran 2024	Bidang TPH	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Nomor : 500.6.14.4 / Kep.498 / TPH /II / 2024 tentang Penunjukan, Penetapan Penerima Manfaat Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan / Tumbuhan (Pupuk Calcium) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten KarawangTahun Anggaran 2024	Bidang TPH	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
4	Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Nomor : 500.6.7.1/Kep.485/TPH/II/2024 tentang Penunjukan, Penetapan Penerima Manfaat Sub Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan/Tumbuhan (Pupuk Hayati) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten KarawangTahun Anggaran 2024	Bidang TPH	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
5	Keputusan Bupati Karawang Nomor : 100.3.3.2/Kep. 547-Huk/2024 tentang : Penerima Manfaat Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota Bantuan Bibit Tanaman Buah-Buahan untuk Kelompok Tanu Tahun Anggaran 2024	Bidang TPH	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK

Kegiatan : Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil							
1	Surat Keputusan Bupati Nomor 660/Kep. 376-Huk/2022 Tahun 2023 Tentang Jasa Petugas Inseminasi Buatan (Inseminator Mandiri)	Bidang Peternakan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Kegiatan : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain							
Sub Kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
2	Keputusan Bupati Karawang Nomor : 100.3.3.2 / Kep.521-Huk / 2024 tentang Penerima Bantuan Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat Sub Kegiatan Pengadaan Benih / Bibit Ternak yang Bersumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain tahun anggaran 2024	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian							
Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan							
1	Standar Operasional Prosedur Nomor 067 Tahun 2023 Tentang Bimbingan Teknis Kegiatan Perkebunan	Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian							
Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Prasarana	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Prasarana					
Kegiatan : Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota							
Sub Kegiatan : Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Kegiatan : Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum							
Sub Kegiatan : Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							
Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis							
1	Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nomor 524/Kep.282-Ternak/01/2023 Tahun 2023 Tentang Tim Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ruminansia	Bidang Peternakan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner							
Sub Kegiatan : Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	UPTD Puskesmas	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Peternakan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							
Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK

Sub Kegiatan : Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							
Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa							
1	Standar Operasional Prosedur Nomor 900/03/Penyuluhan/2023 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Bidang Penyuluhan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Penyuluhan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa							
1	Standar Operasional Prosedur Nomor 900/02/Penyuluhan/2023 Tahun 2023 Tentang Kegiatan Penyuluhan, Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Bidang Penyuluhan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Penyuluhan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian							
1	Standar Operasional Prosedur Nomor 900/01/Penyuluhan/2023 Tahun 2023 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Bidang Penyuluhan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Penyuluhan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembentukan Badan Usaha Milik Petani							
1	Standar Operasional Prosedur Nomor 900/04/Penyuluhan/2023 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Bidang Penyuluhan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Penyuluhan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota							
1	Standar Operasional Prosedur Nomor 900/05/Penyuluhan/2023 Tahun 2023 Tentang Kegiatan Sekolah Lapang Pertanian Ramah Lingkungan Berbasis Organik	Bidang Penyuluhan	Tahun 2023 DPKP	√	√		BK

2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Penyuluhan	Tahun 2024 DPKP	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang						
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan						
	Indikator Program : Persentase Jumlah Dokumen ijin yang direkomendasikan	Kabid Fasilitasi, Pengawasan Usaha Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : PersentasePenerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko SwalayanYang Dilaksanakan	Kabid Fasilitasi, Pengawasan Usaha Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						SS
	- Jumlah Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabid Fasilitasi, Pengawasan Usaha Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kabid Fasilitasi, Pengawasan Usaha Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kabid Fasilitasi, Pengawasan Usaha Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Kabid Fasilitasi, Pengawasan Usaha Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kabid Fasilitasi, Pengawasan Usaha Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS

	- Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kabid Fasilitas, Pengawasan Usaha Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	4. Indikator Kegiatan : Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri Yang Dilaksanakan	Kabid Fasilitas, Pengawasan Usaha Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Kabid Fasilitas, Pengawasan Usaha Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Kabid Fasilitas, Pengawasan Usaha Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	5. Indikator Kegiatan : Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Kabid Fasilitas, Pengawasan Usaha Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabid Fasilitas, Pengawasan Usaha Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	6. Indikator Kegiatan : Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Yang Dilaksanakan	Kabid Fasilitas, Pengawasan Usaha Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kabid Fasilitas, Pengawasan Usaha Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS

	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Kabid Fasilitasi, Pengawasan Usaha Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kabid Fasilitasi, Pengawasan Usaha Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	7. Indikator Kegiatan : Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan						
	Indikator Program : Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Kabid Sarana Distribusi Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang Tersedia	Kabid Sarana Distribusi Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kabid Sarana Distribusi Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabid Sarana Distribusi Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Yang Memperoleh Sertifikasi	Kabid Sarana Distribusi Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kabid Sarana Distribusi Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS

	- Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kabid Sarana Distribusi Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting						
	Indikator Program : Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS

	- Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
4	Program Pengembangan Ekspor						
	Indikator Program : Persentase nilai ekspor	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Presentase Produk Unggulan Daerah Yang diEkspor	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS

	- Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen						
	Indikator Program : Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Kepala UPTD Metrologi Legal	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Yang Dilaksanakan	Kepala UPTD Metrologi Legal	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kepala UPTD Metrologi Legal	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kepala UPTD Metrologi Legal	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Kepala UPTD Metrologi Legal	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri						
	Indikator Program : Jumlah produk dalam Pameran yang diikuti	Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS

	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri						
	Indikator Program : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Kepala Bidang Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Dokumen Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kepala Bidang Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Kepala Bidang Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kepala Bidang Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kepala Bidang Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kepala Bidang Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kepala Bidang Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kepala Bidang Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
8	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota						
	Indikator Program : Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang	Kepala Bidang Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS

	Indikator Kegiatan : Persentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Kepala Bidang Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Kepala Bidang Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
9	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional						
	Indikator Program : Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Kepala Bidang Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Data Informasi dan Analisis Industri	Kepala Bidang Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kepala Bidang Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kepala Bidang Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS

	- Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kepala Bidang Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang						
1	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB Kabupaten Karawang	Kepala Bidang Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
2	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Kabupaten Karawang	Kepala Bidang Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
C.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang						
	Urusan Perdagangan						
1	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Kepala UPTD Metrologi Legal	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Kepala Bidang Fasilitas, Pengawasan Usaha Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	Kepala Bidang Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	Urusan Perindustrian						
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	Kepala Bidang Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Kepala Bidang Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
D.	Daftar Data Statistik Sektoral Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang						
1	Banyaknya pasar berdasarkan kepengelolaannya di Kab. Karawang tahun 2024	Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS

[illegible]

1	Informasi tentang profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 Disperindag	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disperindag	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK

	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
9	Agenda surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disperindag	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disperindag	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disperindag	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disperindag	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disperindag	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disperindag	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disperindag	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disperindag	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Disperindag	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disperindag	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
F. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang							
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							
Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang							
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Fasilitasi, Pengawasan Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
Kegiatan : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri							
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Fasilitasi, Pengawasan Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
Kegiatan : Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat							
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C							
1	Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembatasan Peredaran Minuman Beralkohol	Kabid Fasilitasi, Pengawasan Perdagangan	Tahun 2021 Disperindag	√	√		BK

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							
Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Pengendalian Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							
Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala UPTD Metrologi Legal	Tahun 2024 Disperindag	√	√		
Sub Kegiatan : Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala UPTD Metrologi Legal	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							
Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Sarana Distribusi Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Sarana Distribusi Perdagangan	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							
Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							
Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK
Sub Kegiatan : Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Industri	Tahun 2024 Disperindag	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang						
1	Program Pembinaan Perpustakaan						
	Indikator Program : Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS

	- Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	4. Indikator Kegiatan : rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno						
	Indikator Program : Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS

	1. Indikator Kegiatan : Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaYang_Dilaksanakan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
3	Program Pengelolaan Arsip						
	Indikator Program : Persentase PD yang menerapkan pengelolaan Arsip secara baku	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : PersentasePengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/KotaYang_Dilaksanakan	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :	Bidang Arsip					
	- Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : PersentasePengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/KotaYang_Dilaksanakan	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :	Bidang Arsip					

	- Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :	Bidang Arsip					
	- Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
4	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip						
	Indikator Program : Persentase arsip statis yang dialihmediakan	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : PersentasePemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) TahunYang_Dilaksanakan	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/KotaYang_Dilaksanakan	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						

	- Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/KelurahanYang Dilaksanakan	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	4. Indikator Kegiatan : Persentase Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS

	5. Indikator Kegiatan : Persentase Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang Yang Dilaksanakan	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :		Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapan	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
5	Program Perizinan Penggunaan Arsip						
	Indikator Program : Persentase ijin pemanfaatan arsip tertutup yang dikeluarkan		Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :		Tahun 2024 Disarsipperpus				
	- Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapan	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	- Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang						
1	Rasio Perpustakaan Persatuan penduduk (PMDN 18/2020)	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
2	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (PMDN 18/2020)	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yg sah dan pertanggungjawaban nasional (PMND 18/2020)	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS

4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemetintah, pelayan publik dan kesejahteraan daerah	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
C.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang						
	Urusan Perpustakaan						
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	Urusan Kearsipan						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Bidang Arsip	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
D.	Daftar Data Statistik Sektorar Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang						
1	Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah Kab. Karawang Tahun 2024	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah di Kab. Karawang Tahun 2024	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
3	Jumlah Perpustakaan Menurut Jenisnya di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
4	Rekapitulasi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2024	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
5	Rekapitulasi Data dan Informasi Perpustakaan di Kabupaten Karawang Tahun 2024	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS

[illegible]

1	Informasi tentang profil Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 Disarsipperpus	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK

	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
9	Agenda surat Dinas Arsip dan Perpustakaan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disarsipperpus	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disarsipperpus	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disarsipperpus	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disarsipperpus	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disarsipperpus	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disarsipperpus	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disarsipperpus	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Dinas Arsip dan Perpustakaan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Disarsipperpus	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Disarsipperpus	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK
F. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang							
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2019 Disarsipperpus	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang	Bidang Perpustakaan	Tahun 2021 Disarsipperpus	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Khusus	Bidang Perpustakaan	Tahun 2021 Disarsipperpus	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Kerjasama Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2022 Disarsipperpus	√	√		BK

5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2019 Disarsipperpus	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Khusus	Bidang Perpustakaan	Tahun 2021 Disarsipperpus	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Kerjasama Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2022 Disarsipperpus				
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2019 Disarsipperpus	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca	Bidang Perpustakaan	Tahun 2022 Disarsipperpus	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengembangan Bahan Pustaka							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2019 Disarsipperpus	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Khusus	Bidang Perpustakaan	Tahun 2021 Disarsipperpus	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2019 Disarsipperpus	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Khusus	Bidang Perpustakaan	Tahun 2021 Disarsipperpus	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2019 Disarsipperpus	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Khusus	Bidang Perpustakaan	Tahun 2021 Disarsipperpus	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Kerjasama Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2022 Disarsipperpus	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK
Kegiatan : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2019 Disarsipperpus	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Khusus	Bidang Perpustakaan	Tahun 2021 Disarsipperpus	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca	Bidang Perpustakaan	Tahun 2022 Disarsipperpus	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Nomor 339 tahun 2023 Tentang Pelayanan Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2023 Disarsipperpus	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2019 Disarsipperpus	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca	Bidang Perpustakaan	Tahun 2022 Disarsipperpus	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Khusus	Bidang Perpustakaan	Tahun 2021 Disarsipperpus	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2019 Disarsipperpus	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Khusus	Bidang Perpustakaan	Tahun 2021 Disarsipperpus	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	Tahun 2019 Disarsipperpus	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca	Bidang Perpustakaan	Tahun 2022 Disarsipperpus	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Perpustakaan	Tahun 2024 Disarsipperpus	√	√		BK
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							
Kegiatan : Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Bidang Arsip	Tahun 2019 Disarsipperpus	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 393 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah	Bidang Arsip	Tahun 2023 Disarsipperpus	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Bidang Arsip	Tahun 2019 Disarsipperpus	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan & Akses Dinamis di Lngkungan Pemerintah Daerah	Bidang Arsip	Tahun 2019 Disarsipperpus	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Bidang Arsip	Tahun 2018 Disarsipperpus	√	√		BK
Kegiatan : Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Bidang Arsip	Tahun 2019 Disarsipperpus	√	√		BK
Kegiatan : Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Bidang Arsip	Tahun 2019 Disarsipperpus	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Bidang Arsip	Tahun 2019 Disarsipperpus	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 392 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan	Bidang Arsip	Tahun 2023 Disarsipperpus	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Nomor 391 Tahun 2023 Tentang Penghargaan Kearsipan	Bidang Arsip	Tahun 2023 Disarsipperpus	√	√		BK
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							
Kegiatan : Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Bidang Arsip	Tahun 2019 Disarsipperpus	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang						
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum						
	Indikator Program : Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Bidang Trantibum	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
	Indikator Program : Persentase Linmas yang lulus dan memiliki sertifikat diklatsar	Bidang Linmas	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
	Indikator Program : Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Bidang PPUD	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Bidang Trantibum	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Bidang Trantibum	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
	- Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Bidang Trantibum	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Bidang Trantibum	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS

- Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bidang Trantibum	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
- Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Bidang SDA	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Bidang Trantibum	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
- Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Bidang Trantibum	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
- Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Bidang SDA	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
- Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Bidang PPUD	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
2. Indikator Kegiatan : Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada	Bidang PPUD	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
Indikator Sub Kegiatan :						
- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Bidang PPUD	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Bidang PPUD	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
- Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Bidang PPUD	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
3. Indikator Kegiatan : Persentase Pejabat PPNS Peserta Peningkatan Kapasitas yang bersertifikat	Bidang PPUD	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
Indikator Sub Kegiatan :			√	√		SS

	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Bidang SDA	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang						
1	Persentase Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Bidang PPUD	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
C.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang						
	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Bidang Trantibum	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Bidang PPUD	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
D.	Daftar Data Statistik Sektoral Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang						
1	Jumlah Personil Pol PP Berdasarkan Status Kepegawaian di Kab. Karawang Tahun 2024	Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
2	Rekapitulasi Pelayanan Satpol PP di Kab. Karawang Tahun 2024	Bidang Trantibum	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
E.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang						
Kepala Sub Bagian Keuangan							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK

3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							
1	Informasi tentang profil Satuan Polisi Pamong Praja Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 Satpol PP	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK

6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
9	Agenda surat Satuan Polisi Pamong Praja	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Satpol PP	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Satpol PP	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Satpol PP	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Satpol PP	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Satpol PP	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Satpol PP	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Satpol PP	√	√		BK

2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Satuan Polisi Pamong Praja	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Satpol PP	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Satpol PP	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		SS

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat	Kabid TIBUM/Kasi OPSDAL	Tahun 2023 Satpol PP	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 419 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang	Kabid TIBUM/Kasi OPSDAL	Tahun 2023 Satpol PP	√	√		BK
3	Standar Operasional Prosedur Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	Kabid TIBUM/Kasi OPSDAL	Tahun 2023 Satpol PP	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid TIBUM/Kasi OPSDAL	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK

Sub Kegiatan : Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat	Kabid TIBUM/Kasi OPSDAL	Tahun 2023 Satpol PP	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang	Kabid TIBUM/Kasi OPSDAL	Tahun 2021 Satpol PP	√	√		BK
3	Standar Operasional Prosedur Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	Kabid TIBUM/Kasi OPSDAL	Tahun 2023 Satpol PP	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid TIBUM/Kasi OPSDAL	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

1	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Kabid LINMAS	Tahun 2020 Satpol PP	√	√		BK
2	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kabid LINMAS	Tahun 2021 Satpol PP	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang	Kabid LINMAS	Tahun 2021 Satpol PP	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah.	Kabid LINMAS	Tahun 2022 Satpol PP	√	√		BK
5	Surat Keputusan Bupati Nomor 046/Kep. 576-Huk/2022 Tahun Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Karawang	Kabid LINMAS	Tahun 2022 Satpol PP	√	√		BK
6	Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 300. 1 . 4/Kep. 046-Linmas / 2024 tentang Penetapan Anggota Satlinmas TRC Kabupaten Karawang TA.2024	Kabid LINMAS	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
7	Standar Operasional Prosedur Nomor 300.1.4./Kep.049-Linmas Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Kordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Kabid LINMAS	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
8	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2024	Kabid LINMAS	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Kabid LINMAS	Tahun 2020 Satpol PP	√	√		BK
2	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kabid LINMAS	Tahun 2021 Satpol PP	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang	Kabid LINMAS	Tahun 2021 Satpol PP	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah.	Kabid LINMAS	Tahun 2022 Satpol PP	√	√		BK
5	Surat Keputusan Bupati Nomor 046/Kep. 576-Huk Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Karawang	Kabid LINMAS	Tahun 2022 Satpol PP	√	√		BK
6	Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 300.1.4./Kep.050-Linmas Tahun 2024 tentang Peningkatan Kapasitas Pendidikan Dasar Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat	Kabid LINMAS	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
7	Standar Operasional Prosedur Nomor 300.1.4./Kep.050-Linmas Tahun 2024 tentang Standar Oprasional Prosedur Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabid LINMAS	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
8	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindunngan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2024	Kabid LINMAS	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

1	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Bidang SDA	Tahun 2023 Satpol PP	√	√		BK
2	Keputusan Bupati 180.18/kep.106-huk/2023 tentang susunan organisasi dan keanggotaan sekretariat PPNS kab Karawang	Bidang SDA	Tahun 2023 Satpol PP	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 Tentang kedudukan,susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja Satpolpp kabupaten Karawang	Bidang SDA	Tahun 2021 Satpol PP	√	√		BK
4	SOP Nomor SOP/SDA/DT/01 tgl Agustus 2023.	Bidang SDA	Tahun 2023 Satpol PP	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Bidang SDA	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum							
1	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Bidang Trantibum	Tahun 2020 Satpol PP	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang	Bidang Trantibum	Tahun 2021 Satpol PP	√	√		BK
3	Standar Operasional Prosedur Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	Bidang Trantibum	Tahun 2023 Satpol PP	√	√		BK

4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bidang Trantibum	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
Sub Kegiatan : Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
1	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat	Kabid PPUD/Kasi Binwasluh	Tahun 2020 Satpol PP	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang	Kabid PPUD/Kasi Binwasluh	Tahun 2021 Satpol PP	√	√		BK
3	Standar Operasional Prosedur Nomor 067/006 /Sekret /2023 Tahun 2023 Tentang Pengawasan dan Pemeriksaan	Kabid PPUD/Kasi Binwasluh	Tahun 2023 Satpol PP	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kabid PPUD/Kasi Binwasluh	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
1	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat	Kabid PPUD/Kasi Sidik-Lidik	Tahun 2020 Satpol PP	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kabid PPUD/Kasi Sidik-Lidik	Tahun 2015 Satpol PP	√	√		BK
3	Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Nomor 067/Kep.982/2015 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pemasangan Stiker Pengawasan Oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Karawang	Kabid PPUD/Kasi Sidik-Lidik	Tahun 2015 Satpol PP	√	√		BK

4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kabid PPUD/Kasi Sidik-Lidik	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK
Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							
Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS							
1	Peraturan Bupati 73/2015 Tentang sekretariat PPNS daerah pemerintah kab Karawang	Bidang SDA	Tahun 2015 Satpol PP	√	√		BK
2	Peraturan Daerah 14/2014 Tentang PPNS daerah pemerintah kabupaten Karawang	Bidang SDA	Tahun 2014 Satpol PP	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Bidang SDA	Tahun 2024 Satpol PP	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang						
1	Program Penanggulangan Bencana						
	Indikator Program : Prosentase Peningkatan Kemampuan tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	Indikator Program : Prosentase Penanganan Kejadian Bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	Indikator Program : Prosentasi Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Penduduk yang menerima Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS

	2. Indikator Kegiatan : Persentase Warga Negara dan Aparatur yang Memperoleh sertifikat Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Persentase Keluarga yang memperoleh sertifikat Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS

	4. Indikator Kegiatan : Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	5. Indikator Kegiatan : Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	6. Indikator Kegiatan : Informasi Penanggulangan Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS

	- Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran						
	Indikator Program : Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Sumberdaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS

- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
- Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
- Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
- Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
- Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
- Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
2. Indikator Kegiatan : PersentaseInspeksi Peralatan Proteksi KebakaranYang_Dilaksanakan	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
Indikator Sub Kegiatan :						

	- Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : PersentaseInvestigasi Kejadian KebakaranYang_Dilaksanakan	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	4. Indikator Kegiatan : PersentasePemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KebakaranYang_Dilaksanakan	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	5. Indikator Kegiatan : PersentasePenyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan ManusiaYang_Dilaksanakan	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS

	- Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang						
1	Persentase Penanganan Bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal Urusan Bencana	Sekretaris BPBD	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
2	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
3	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
4	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
C.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang						
	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS

4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
D.	Daftar Data Berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang						
1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
E.	Daftar Data Statistik Sektoral Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang						
1	Jumlah Kejadian Bencana Alam menurut Jenisnya di Kab. Karawang Tahun 2024	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
2	Jumlah KK dan Kerugian Materi yang Diakibatkan Bencana Alam di Kab. Karawang Tahun 2024	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
3	Jumlah Korban Jiwa yang Diakibatkan Bencana Alam menurut Kategori Kerugian di Kab. Karawang Tahun 2024	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
4	Jumlah Korban Rumah/Tempat Tinggal yang Diakibatkan Bencana Alam menurut Klasifikasi Kerusakan di Kab. Karawang Tahun 2024	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
F.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang						
Kepala Sub Bagian Keuangan							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Keuangan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Keuangan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Keuangan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Keuangan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Keuangan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK

4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Keuangan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Keuangan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
Kepala Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							
1	Informasi tentang profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (ASN dan Non ASN)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap bulan pada tahun berjalan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 BPBD	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK

6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BPBD	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
9	Agenda surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BPBD	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BPBD	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BPBD	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BPBD	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BPBD	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BPBD	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BPBD	√	√		BK

2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 BPBD	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BPBD	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS

	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
9	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPBD	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK

G.	Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
2	Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 067/114/ IV/BPBD/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 322 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK

Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 322 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK

3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (trc) Bencana Kabupaten/kota							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 322 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (trc) Bencana Kabupaten/kota	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
2	Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 067/114/ IV/BPBD/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK

3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 322 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 322 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 322 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK

3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
2	Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 067/114/ IV/BPBD/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 322 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 322 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota	Kelompok Sub Substansi Kesiapsiagaan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							
Sub Kegiatan : Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/kota							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kedaruratan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor: 321 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Masyarakat Bencana dan Pengungsi Bencana di Daerah	Kelompok Sub Substansi Kedaruratan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 322 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan	Kelompok Sub Substansi Kedaruratan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kelompok Sub Substansi Kedaruratan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kedaruratan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK

2	Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 067/114/ IV/BPBD/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Kedaruratan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor: 321 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Masyarakat Bencana dan Pengungsi Bencana di Daerah	Kelompok Sub Substansi Kedaruratan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Karawang Nomor 322 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan	Kelompok Sub Substansi Kedaruratan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kelompok Sub Substansi Kedaruratan	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Logistik	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
2	Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 067/114/ IV/BPBD/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Logistik	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor: 321 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Masyarakat Bencana dan Pengungsi Bencana di Daerah	Kelompok Sub Substansi Kedaruratan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK

4	Peraturan Bupati Karawang Nomor 322 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan	Kelompok Sub Substansi Kedaruratan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kelompok Sub Substansi Logistik	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
Sub Kegiatan : Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Logistik	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
2	Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 067/114/ IV/BPBD/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	Kelompok Sub Substansi Logistik	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor: 321 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Masyarakat Bencana dan Pengungsi Bencana di Daerah	Kelompok Sub Substansi Kedaruratan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Karawang Nomor 322 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan	Kelompok Sub Substansi Kedaruratan	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kelompok Sub Substansi Logistik	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK
Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							
Sub Kegiatan : Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota							

1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Rehabilitasi	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 322 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Rehabilitasi	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Rehabilitasi	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK

Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/kota

1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Rehabilitasi	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 322 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Rehabilitasi	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/kota	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Rehabilitasi	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK

Sub Kegiatan : Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota

1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Rehabilitasi	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 322 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Rehabilitasi	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota	Sub Koordinator Kelompok Sub Substansi Rehabilitasi	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	1. Kelompok Sub Substansi Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana 2. Kelompok Sub Substansi Pencegahan Kebakaran	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	1. Kelompok Sub Substansi Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana 2. Kelompok Sub Substansi Pencegahan Kebakaran	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Kelompok Sub Substansi Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana 2. Kelompok Sub Substansi Pencegahan Kebakaran	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	1. Kelompok Sub Substansi Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana 2. Kelompok Sub Substansi Pencegahan Kebakaran	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	1. Kelompok Sub Substansi Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana 2. Kelompok Sub Substansi Pencegahan Kebakaran	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1. Kelompok Sub Substansi Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana 2. Kelompok Sub Substansi Pencegahan Kebakaran	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK

Sub Kegiatan : Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	1. Kelompok Sub Substansi Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana 2. Kelompok Sub Substansi Pencegahan Kebakaran	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	1. Kelompok Sub Substansi Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana 2. Kelompok Sub Substansi Pencegahan Kebakaran	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1. Kelompok Sub Substansi Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana 2. Kelompok Sub Substansi Pencegahan Kebakaran	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK

Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat

1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	1. Kelompok Sub Substansi Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana 2. Kelompok Sub Substansi Pencegahan Kebakaran	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	1. Kelompok Sub Substansi Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana 2. Kelompok Sub Substansi Pencegahan Kebakaran	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	1. Kelompok Sub Substansi Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana 2. Kelompok Sub Substansi Pencegahan Kebakaran	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK

Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Sub Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan Dan Evakuasi

1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	1. Kelompok Sub Substansi Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana 2. Kelompok Sub Substansi Pencegahan Kebakaran	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	1. Kelompok Sub Substansi Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana 2. Kelompok Sub Substansi Pencegahan Kebakaran	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan Dan Evakuasi	1. Kelompok Sub Substansi Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana 2. Kelompok Sub Substansi Pencegahan Kebakaran	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan Dan Evakuasi

1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang	1. Kelompok Sub Substansi Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana 2. Kelompok Sub Substansi Pencegahan Kebakaran	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	1. Kelompok Sub Substansi Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana 2. Kelompok Sub Substansi Pencegahan Kebakaran	Tahun 2023 BPBD	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan Dan Evakuasi	1. Kelompok Sub Substansi Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana 2. Kelompok Sub Substansi Pencegahan Kebakaran	Tahun 2024 BPBD	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang						
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah						
	Indikator Program : Persentase Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Penetapan RKPD Tepat waktu	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS

	- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah						

	Indikator Program : Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan yang terealisasi	1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam 3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Kegiatan Perencanaan yang terealisasi	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan Manusia	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan Manusia	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS

	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan Manusia	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan Manusia	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Presentase Perencanaan dan Pendanaan yang Disusun	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perekonomian	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perekonomian	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perekonomian	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perekonomian	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sumber Daya Alam	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sumber Daya Alam	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS

	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sumber Daya Alam	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sumber Daya Alam	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : 1. Presentase perencanaan dan pendanaan sektor infrastruktur yang disusun = 50% 2. Presentase perencanaan dan pendanaan sektor kewilayahan yang disusun = 50% Presentase perencanaan dan pendanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan = 100%	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Infrastruktur	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Infrastruktur	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Infrastruktur	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Infrastruktur	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Kewilayahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS

	- Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Kewilayahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Kewilayahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Kewilayahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah						
	Indikator Program : Indeks Inovasi Daerah	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Jumlah fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS

	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Jumlah penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Jumlah penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	4. Indikator Kegiatan : Presentase inovasi daerah yang dilaporkan	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS

	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang						
1	Persentase (%) Keselarasan muatan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RKPD	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					
	a. Persentase (%) keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Prioritas Daerah/PD)	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	b. Persentase (%) keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Prioritas Daerah/PD)	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	c. Persentase (%) keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Prioritas Daerah/PD)	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
2	Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah	1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam 3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					
	a. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS

	b. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	c. Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
3	Persentase (%) hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dan dipublikasikan	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan					
	a. Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung kebijakan daerah	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
	b. Persentase hasil kelitbangan yang dipublikasikan kepada pemangku kepentingan	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
C. Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang							
Kepala Sub Bagian Keuangan							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK

4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							
1	Informasi tentang profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 Bappeda	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK

6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
9	Agenda surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Bappeda	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Bappeda	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Bappeda	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Bappeda	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Bappeda	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Bappeda	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Bappeda	√	√		BK

2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Bappeda	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Bappeda	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		SS

[illegible]

1	Peraturan Daerah kabupaten Karawang Nomor 12 tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
5	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2 /Kep.382-Huk Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
6	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK

Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

1	Peraturan Daerah kabupaten Karawang Nomor 12 tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK

5	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2 /Kep.382-Huk Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
6	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik							
1	Peraturan Daerah kabupaten Karawang Nomor 12 tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
5	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2 /Kep.382-Huk Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
6	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah							
1	Peraturan Daerah kabupaten Karawang Nomor 12 tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK

3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
5	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2 /Kep.382-Huk Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
6	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

1	Peraturan Daerah kabupaten Karawang Nomor 12 tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
5	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2 /Kep.382-Huk Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
6	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK

Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

1	Peraturan Daerah kabupaten Karawang Nomor 12 tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
5	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2 /Kep.382-Huk Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
6	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

1	Peraturan Daerah kabupaten Karawang Nomor 12 tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK

5	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2 /Kep.382-Huk Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
6	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							
Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah							
Sub Kegiatan : Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
1	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2 /Kep.164-Huk/2024 Tentang Tim Percepatan Jaminan Kesehatan Menyeluruh/ <i>Universal health Coverage</i> Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan Manusia	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
2	Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 100.3.3.5/Kep.1-Huk/2024 Tentang Pengelola Akun Sepakat Dalam Rangka Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan Manusia	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan Manusia	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
1	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2 /Kep.164-Huk/2024 Tentang Tim Percepatan Jaminan Kesehatan Menyeluruh/ <i>Universal health Coverage</i> Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan Manusia	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
2	Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 100.3.3.5/Kep.1-Huk/2024 Tentang Pengelola Akun Sepakat Dalam Rangka Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan Manusia	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK

3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan Manusia	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
1	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.164-Huk/2024 Tentang Tim Percepatan Jaminan Kesehatan Menyeluruh/ <i>Universal health Coverage</i> Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan Manusia	Tahun 2024 Bappeda	√	√		
2	Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 100.3.3.5/Kep.1-Huk/2024 Tentang Pengelola Akun Sepakat Dalam Rangka Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan Manusia	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan Manusia	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
1	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.164-Huk/2024 Tentang Tim Percepatan Jaminan Kesehatan Menyeluruh/ <i>Universal health Coverage</i> Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan Manusia	Tahun 2024 Bappeda	√	√		
2	Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 100.3.3.5/Kep.1-Huk/2024 Tentang Pengelola Akun Sepakat Dalam Rangka Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan Manusia	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan Manusia	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perekonomian	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perekonomian	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perekonomian	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perekonomian	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sumber Daya Alam	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sumber Daya Alam	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sumber Daya Alam	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sumber Daya Alam	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Infrastruktur	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Infrastruktur	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Infrastruktur	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK

Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Infrastruktur	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Kewilayahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Kewilayahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Kewilayahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Kewilayahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							
Sub Kegiatan : Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan							
1	Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 000.3.4 /635/Litbang Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penyelenggara Swakelola Tipe III Pada Kajian Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi Massal Tahun 2025	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
2	Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 000.3.4 /1162/Litbang Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penyelenggara Swakelola Tipe II Pada Background Study Peran Dan Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi							

1	Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 000.3.4/635/Litbang Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penyelenggara Swakelola Tipe III Pada Kajian Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi Massal Tahun 2025	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
2	Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 000.3.4/1162/Litbang Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penyelenggara Swakelola Tipe II Pada Background Study Peran Dan Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

1	Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 000.3.4/635/Litbang Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penyelenggara Swakelola Tipe III Pada Kajian Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi Massal Tahun 2025	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
2	Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 000.3.4/1162/Litbang Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penyelenggara Swakelola Tipe II Pada Background Study Peran Dan Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK

Sub Kegiatan : Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan

1	Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 000.3.4/635/Litbang Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penyelenggara Swakelola Tipe III Pada Kajian Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi Massal Tahun 2025	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
2	Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 000.3.4/1162/Litbang Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penyelenggara Swakelola Tipe II Pada Background Study Peran Dan Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK

Sub Kegiatan : Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan

1	Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 000.3.4/635/Litbang Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penyelenggara Swakelola Tipe III Pada Kajian Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi Massal Tahun 2025	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
2	Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 000.3.4/1162/Litbang Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penyelenggara Swakelola Tipe II Pada Background Study Peran Dan Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK

Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

1	Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 000.3.4 /1033/Litbang Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penyelenggara Swakelola Tipe II Pada Background Study Percepatan Pembangunan Desa Mandiri	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
2	Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 000.3.4 /1321/Litbang Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penyelenggara Swakelola Tipe III Pada Kajian Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
3	Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 100.3.3 /1436/Litbang Tahun 2024 Tentang Tim Teknis Penyusunan Background Study Ketahanan Pangan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
4	Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 000.3.4 /1177/Litbang Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penyelenggara Swakelola Tipe II Pada Background Study Ketenagakerjaan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
5	Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 000.3.4 /1427/Litbang Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penyelenggara Swakelola Tipe II Pada Kajian Peninjauan Kembali Tentang Sejarah Karawang	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
6	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pariwisata							
1	Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 000.3.4 /1033/Litbang Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penyelenggara Swakelola Tipe II Pada Background Study Percepatan Pembangunan Desa Mandiri	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
2	Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 000.3.4 /1321/Litbang Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penyelenggara Swakelola Tipe III Pada Kajian Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Karawang	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK

1	Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 000.9.6.3/3699/Litbang Tahun 2024 Tentang Publikasi Jurnal Ilmiah Karawang (JiKa) volume 02 BAPPEDA Kab. Karawang	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi							
1	Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.404-huk/2024 Tahun 2024 Tentang Kompetisi Pekan Riset dan Inovasi Daerah 2024	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
2	Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 100.3.3/1438/Litbang Tahun 2024 Tentang Penetapan Juri pada Pekan Riset dan Inovasi Daerah (Perioda) 2024	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
3	Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 100.3.3/2266/Litbang Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Kompetisi Pekan Riset dan Inovasi Daerah (Perioda) 2024	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Krtua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Tahun 2024 Bappeda	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang						
1	Program Kepegawaian Daerah						
	Indikator Program : Nilai Sistem Merit Hasil Penilaian Mandiri	Kabid Pengadaan Pemberhentiandan Sistem Informasi	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kabid Pengadaan Pemberhentiandan Sistem Informasi	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kabid Pengadaan Pemberhentiandan Sistem Informasi	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabid Pengadaan Pemberhentiandan Sistem Informasi	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kabid Pengadaan Pemberhentiandan Sistem Informasi	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Kabid Pengadaan Pemberhentiandan Sistem Informasi	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Kabid Pengadaan Pemberhentiandan Sistem Informasi	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kabid Pengadaan Pemberhentiandan Sistem Informasi	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS

	- Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Sistem Informasi	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Sistem Informasi	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Sistem Informasi	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Sistem Informasi	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Sistem Informasi	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Sistem Informasi	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Laporan Mutasi dan Promosi ASN	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2024 BKPSDM				SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	3. Indikator Kegiatan : Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS

	- Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	4. Indikator Kegiatan : Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabid Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabid Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabid Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabid Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS

	- Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kabid Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kabid Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Kabid Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kabid Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kabid Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kabid Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Kabid Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia						
	Indikator Program : Nilai merit sistem pada aspek pengembangan karier dengan sub aspek pengembangan kompetensi	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Persentase Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis yang mendapat sertifikat	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS

	- Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Persentase Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis yang mendapat sertifikat	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS

	- Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang						
1	Nilai Sistem Merit Hasil Penilaian Mandiri	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
C.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang						
	Urusan Kepegawaian						
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
D.	Daftar Data Statistik Sektoral Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang						
1	Komposisi PNS berdasarkan perangkat daerah/unit kerja menurut jenis kelamin di Kab. Karawang Tahun 2024	Kabid Pengadaan Pemberhentiandan Sistem Informasi	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
2	Komposisi PNS berdasarkan unit kerja/perangkat daerah menurut tingkat pendidikan di Kab. Karawang Tahun 2024	Kabid Pengadaan Pemberhentiandan Sistem Informasi	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
3	Komposisi PNS berdasarkan unit kerja/perangkat daerah menurut jabatan di Kab. Karawang Tahun 2024	Kabid Pengadaan Pemberhentiandan Sistem Informasi	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS

4	Komposisi PNS berdasarkan unit kerja/perangkat daerah menurut kepangkatan di Kab. Karawang Tahun 2024	Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Sistem Informasi	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
E.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang						
Kepala Sub Bagian Keuangan							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							

1	Informasi tentang profil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 BKPSDM	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		
	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana						

7	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
9	Agenda surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BKPSDM	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BKPSDM	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BKPSDM	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BKPSDM	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BKPSDM	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BKPSDM	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BKPSDM	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 BKPSDM	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BKPSDM	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK

	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
F.	Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang						
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							
Kegiatan : Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK							
1	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025	Kabid Pengadaan Pemberhentiandan Sistem Informasi	Tahun 2010 BKPSDM	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Pengadaan ASN di Lingkungan Pemerintahan Daerah	Kabid Pengadaan Pemberhentiandan Sistem Informasi	Tahun 2023 BKPSDM	√	√		BK

3	Standar Operasional Prosedur Nomor 09/BKPSDM/01/2022 Tentang Peningkatan Status CPNS menjadi PNS	Kabid Pengadaan Pemberhentiandan Sistem Informasi	Tahun 2022 BKPSDM	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Pengadaan Pemberhentiandan Sistem Informasi	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian							
1	Peraturan BKN RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya	Kabid Pengadaan Pemberhentiandan Sistem Informasi	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
2	Standar Operasional Prosedur Nomor 13/BKPSDM/01/2022 tentang Pengurusan Pensiun BUP PNS Gol.IV/C Ke Atas	Kabid Pengadaan Pemberhentiandan Sistem Informasi	Tahun 2022 BKPSDM	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Pengadaan Pemberhentiandan Sistem Informasi	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kepegawaian							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Pengadaan Pemberhentiandan Sistem Informasi	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
Kegiatan : Mutasi dan Promosi ASN							
Sub Kegiatan : Pengelolaan Mutasi ASN							
1	Standar Operasional Prosedur Nomor : 02/BKPSDM/01/2022 Tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2022 BKPSDM	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Promosi ASN							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN							
Sub Kegiatan : Pengelolaan Assessment Center							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN							
1	Peraturan Bupati Nomor 175 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2023 BKPSDM	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembinaan Jabatan Fungsional ASN							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
Sub Kegiatan : Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Pengembangan Karir dan KePangkatan	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembinaan Disiplin ASN							
1	Surat Keputusan Bupati Nomor 800 /Kep. 568-Huk /2023 Tahun 2023 Tentang Pejabat Penyelenggara Negara Tertentu Atas Permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kabid Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur	Tahun 2023 BKPSDM	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Teknis							
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK

Kegiatan : Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK

Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun 2024 BKPSDM	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang						
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah						
	Indikator Program : Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS	Kepala Bidang Anggaran	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
	Indikator Program : Persentase Pelaporan Keuangan tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen)	Kepala Bidang Perbendaharaan	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
	Indikator Program : Persentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar Akuntansi Pemerintah	Kepala Bidang Akuntansi	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
	Indikator Program : Persentase sistem keuangan yang terintegrasi	Kepala Bidang Perbendaharaan	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Rencana Anggaran Daerah	Kepala Bidang Anggaran	Tahun 2024 BPKAD				
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
	- Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Ketua Tim Sub - Substansi Analisis dan Evaluasi Anggaran	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
	- Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Ketua Tim Sub - Substansi Analisis dan Evaluasi Anggaran	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK

	- Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Ketua Tim Sub - Substansi Analisis dan Evaluasi Anggaran	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
	- Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Ketua Tim Sub - Substansi Analisis dan Evaluasi Anggaran	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
	- Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
	- Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
	2. Indikator Kegiatan : Laporan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kepala Bidang Perbendaharaan	Tahun 2024 BPKAD				
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kepala Sub Bidang Manajemen Kas	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
	- Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kepala Sub Bidang. Pengelolaan Pembiayaan dan Dana Transfer	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kepala Sub Bidang Manajemen Kas	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kepala Sub Bidang Manajemen Kas	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kepala Sub Bidang. Pengelolaan Pembiayaan dan Dana Transfer	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kepala Sub Bidang Manajemen Kas	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK

- Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Kepala Sub Bidang Manajemen Kas	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kepala Sub Bidang Manajemen Kas	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
- Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kepala Sub Bidang Manajemen Kas	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
- Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kepala Sub Bidang Manajemen Kas	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
- Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kepala Sub Bidang Manajemen Kas	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
3. Indikator Kegiatan : Pelaporan Keuangan Daerah	Kepala Bidang Akuntansi	Tahun 2024 BPKAD				
Indikator Sub Kegiatan :						
- Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah	Tahun 2024 BPKAD	√			BK
- Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah	Tahun 2024 BPKAD	√			BK

	- Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah	Tahun 2024 BPKAD	√			BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kepala Sub Bidang Pembinaan Akuntansi Perangkat Daerah	Tahun 2024 BPKAD	√			BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Ketua Tim Sub-Substansi Pembukuan dan Pelaporan	Tahun 2024 BPKAD	√			BK
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kepala Sub Bidang Pembinaan Akuntansi Perangkat Daerah	Tahun 2024 BPKAD	√			BK
	4. Indikator Kegiatan : Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terealisasi		Tahun 2024 BPKAD				
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kepala Sub Bidang. Pengelolaan Pembiayaan dan Dana Transfer	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
	- Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kepala Sub Bidang. Pengelolaan Pembiayaan dan Dana Transfer	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
	- Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kepala Sub Bidang. Pengelolaan Pembiayaan dan Dana Transfer	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
	5. Indikator Kegiatan : Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Ketua Tim sub substansi Analis Keuangan	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
	Indikator Sub Kegiatan :						BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang. Pengelolaan Pembiayaan dan Dana Transfer	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK

2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah						
	Indikator Program : Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik	Kepala Bidang Aset	Tahun 2024 BPKAD				
	Indikator Kegiatan : Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Diamankan	Kepala Bidang Aset	Tahun 2024 BPKAD				
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Standar Harga yang Disusun	Ketua Tim Sub - Substansi Perencanaan Kebutuhan	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
	- Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Ketua Tim Sub - Substansi Perencanaan Kebutuhan	Tahun 2024 BPKAD				BK
	- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Ketua Tim Sub - Substansi Perencanaan Kebutuhan	Tahun 2024 BPKAD	√			BK
	- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (60 daftar Barang Milik Daerah)	Kepala Bidang Aset	Tahun 2024 BPKAD	√			BK
	- Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kepala Bidang Aset	Tahun 2024 BPKAD	√			BK
	- Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Tahun 2024 BPKAD	√			BK
	- Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (5 buku Laporan Penilaian)	Kepala Bidang Aset	Tahun 2024 BPKAD	√			BK
	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Tahun 2024 BPKAD	√			BK
	- Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Risalah Lelang/Laporan Penjualana Barang Milik Daerah)	Kepala Bidang Aset	Tahun 2024 BPKAD	√			BK
	- Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Ketua Tim Sub - Substansi Perencanaan Kebutuhan	Tahun 2024 BPKAD	√			BK

	- Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kepala Bidang Aset	Tahun 2024 BPKAD	√			BK
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang						
1	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
2	Persentase Pengelolaan Aset Daerah	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
C.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang						
	Urusan Keuangan						
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Kepala Bidang Akuntansi	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Kepala Bidang Akuntansi	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
3	Manajemen Aset	Kepala Bidang Aset	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Kepala Bidang Akuntansi	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
5	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Kepala Bidang Akuntansi	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
6	Rasio PAD terhadap Pendapatan	Kepala Bidang Akuntansi	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
7	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Kepala Bidang Akuntansi	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
8	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntansi	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
9	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntansi	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
D.	Daftar Data Statistik Sektorial Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang						
1	Rekapitulasi Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kepala Bidang Akuntansi	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
2	Rekapitulasi Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kepala Bidang Akuntansi	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 BPKAD	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BPKAD	√	√		
	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana						

7	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
9	Agenda surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BPKAD	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BPKAD	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BPKAD	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BPKAD	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BPKAD	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BPKAD	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BPKAD	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 BPKAD	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BPKAD	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK

	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Ketua Tim Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BPKAD	√	√		BK
F.	Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang						
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS							
1	Nota Kesepakatan KUA Nomor (900.1.1.3 /1462/DPRD)/(900.1.1.3/5353/BPKAD) , Tanggal 31 Oktober 2024 Tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025.	Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS

2	Nota Kesepakatan PPAS Nomor (900.1.1.1/1463/DPRD)/(900.1.1.1/5354/BPKAD) , Tanggal 31 Oktober 2024 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.	Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD							
1	Standar Operasional Prosedur Nomor 067/1136.z/SEKRET/2022 Tentang Verifikasi RKA dan RKAP	Kepala Bidang Anggaran	Tahun 2022 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD							
1	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024, Tanggal 31 Desember 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
2	Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024, Tanggal 31 Desember 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD							
1	Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025, Tanggal 7 Maret 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD TA 2025	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Tahun 2025 BPKAD	√	√		SS
2	Peraturan Bupati No.7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 442 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD TA 2024 (Pergeseran 1)	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
3	Peraturan Bupati No.12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 442 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD TA 2024 (Pergeseran 2)	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
4	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan APBD TA 2024	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS

5	Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
6	Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 (Pergeseran Setelah Perubahan)	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran	Tahun 2022 BPKAD	√	√		SS
Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah							
1	Peraturan Bupati Nomor 400 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang Manajemen Kas	Tahun 2023 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya							
1	Perbub Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang. Pengelolaan Pembiayaan dan Dana Transfer	Tahun 2022 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD							
1	Perbub Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang Manajemen Kas	Tahun 2022 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya							
1	Perbub Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang. Pengelolaan Pembiayaan dan Dana Transfer	Tahun 2022 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank							
1	Perbub Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang Manajemen Kas	Tahun 2022 BPKAD	√	√		SS

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							
1	Perbub Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang Manajemen Kas	Tahun 2022 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas							
1	Perbub Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang Manajemen Kas	Tahun 2022 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait							
1	Perbub Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang Manajemen Kas	Tahun 2022 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan							
1	Perbub Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang Manajemen Kas	Tahun 2022 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota							
1	Perbub Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang Manajemen Kas	Tahun 2022 BPKAD	√	√		SS
Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran							
1	Perbub Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah	Tahun 2022 BPKAD	√	√		SS
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang	Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah	Tahun 2018 BPKAD	√	√		SS
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang	Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah	Tahun 2019 BPKAD	√	√		SS

Sub Kegiatan : Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							
1	Perbub Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah	Tahun 2022 BPKAD	√	√		SS
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang	Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah	Tahun 2018 BPKAD	√	√		SS
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang	Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah	Tahun 2019 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
1	Perbub Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah	Tahun 2022 BPKAD	√	√		SS
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang	Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah	Tahun 2018 BPKAD	√	√		SS
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang	Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah	Tahun 2019 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah							
1	Perbub Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang Pembinaan Akuntansi Perangkat Daerah	Tahun 2022 BPKAD	√	√		SS
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang	Kepala Sub Bidang Pembinaan Akuntansi Perangkat Daerah	Tahun 2018 BPKAD	√	√		SS
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang	Kepala Sub Bidang Pembinaan Akuntansi Perangkat Daerah	Tahun 2019 BPKAD	√	√		SS

Sub Kegiatan : Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD							
1	Perbub Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketua Tim Sub-Substansi Pembukuan dan Pelaporan	Tahun 2022 BPKAD	√	√		SS
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang	Ketua Tim Sub-Substansi Pembukuan dan Pelaporan	Tahun 2018 BPKAD	√	√		SS
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang	Ketua Tim Sub-Substansi Pembukuan dan Pelaporan	Tahun 2019 BPKAD	√	√		SS
Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							
Sub Kegiatan : Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan							
1	Perbub Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang. Pengelolaan Pembiayaan dan Dana Transfer	Tahun 2022 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak							
1	Perbub Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang. Pengelolaan Pembiayaan dan Dana Transfer	Tahun 2022 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota							
1	Perbub Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang. Pengelolaan Pembiayaan dan Dana Transfer	Tahun 2022 BPKAD	√	√		SS
Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							
Sub Kegiatan : Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah							
1	Perbub Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bidang. Pengelolaan Pembiayaan dan Dana Transfer	Tahun 2022 BPKAD	√	√		SS
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							
Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah							
Sub Kegiatan : Penyusunan Standar Harga							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ketua Tim Sub - Substansi Perencanaan Kebutuhan	Tahun 2018 BPKAD	√	√		SS

2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ketua Tim Sub - Substansi Perencanaan Kebutuhan	Tahun 2019 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ketua Tim Sub - Substansi Perencanaan Kebutuhan	Tahun 2018 BPKAD	√	√		SS
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ketua Tim Sub - Substansi Perencanaan Kebutuhan	Tahun 2019 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ketua Tim Sub - Substansi Perencanaan Kebutuhan	Tahun 2018 BPKAD	√	√		SS
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ketua Tim Sub - Substansi Perencanaan Kebutuhan	Tahun 2019 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah							
1	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepala Bidang Aset	Tahun 2024 BPKAD	√	√		SS
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepala Bidang Aset	Tahun 2019 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Tahun 2018 BPKAD	√	√		SS

2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Tahun 2019 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Penilaian Barang Milik Daerah							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepala Bidang Aset	Tahun 2018 BPKAD	√	√		SS
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepala Bidang Aset	Tahun 2019 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Tahun 2018 BPKAD	√	√		SS
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Tahun 2019 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepala Bidang Aset	Tahun 2018 BPKAD	√	√		SS
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepala Bidang Aset	Tahun 2019 BPKAD	√	√		SS
Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ketua Tim Sub - Substansi Perencanaan Kebutuhan	Tahun 2018 BPKAD	√	√		SS

2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ketua Tim Sub - Substansi Perencanaan Kebutuhan	Tahun 2019 BPKAD	√	√		SS

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang						
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah						
	Indikator Program : Rasio pajak daerah terhadap PAD	Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Pendapatan Daerah	Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		SS
	- Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Sub bid Pengembangan Pajak Daerah / Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kelompok Subs-Substansi Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah/ Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kelompok Subs-Substansi Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah / Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		SS
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sub Bid Pengelolaan Data dan Sistem Informasi / Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kelompok Subs-Substansi Pendataan Pajak Daerah / Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		SS

	- Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Sub Bid Pengelolaan Data dan Sistem Informasi / Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Sub Bid Penetapan Pajak Daerah / Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		SS
	- Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Sub Bid Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah / Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		SS
	- Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kelompok Subs-Substansi Pemeriksaan Pajak Daerah / Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Sub Bid Penagihan dan Penyelesaian Piutang Pajak Daerah / Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Sub Bid Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah / Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		SS
	- Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kelompok Subs-Substansi Pemeriksaan Pajak Daerah /Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		SS
	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Sub bid Pengembangan Pajak Daerah / Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang						
1	Persentase (%) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Bapenda	√	√		BK
2	Persentase (%) Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Bapenda	√	√		BK

[illegible]

1	Informasi tentang profil Badan Pendapatan Daerah Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Badan Pendapatan Daerah (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Badan Pendapatan Daerah setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 BAPENDA	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Badan Pendapatan Daerah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		SS
9	Agenda surat Badan Pendapatan Daerah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BAPENDA	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BAPENDA	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BAPENDA	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BAPENDA	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BAPENDA	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BAPENDA	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BAPENDA	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian / Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian / Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Badan Pendapatan Daerah	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 BAPENDA	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 BAPENDA	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Kelompok Subs-Substansi Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah / Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		SS
	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Kelompok Subs-Substansi Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah / Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 BAPENDA	√	√		SS

[illegible]

1	Standar Operasional Prosedur Nomor 900/014/Sekrt Tahun 2022 Tentang Penyusunan Bahan Fasilitasi, Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah dan Pajak Daerah dengan Kementerian dan Lembaga/Instansi	Sub bid Pengembangan Pajak Daerah / Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2022 BAPENDA	√	√		BK
Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah							
1	Standar Operasional Prosedur Nomor 900/014/Sekrt Tahun 2022 Tentang Penyusunan Draft Produk hukum Pajak	Kelompok Subs-Substansi Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah / Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2023 BAPENDA	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah							
1	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kelompok Subs-Substansi Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah	Tahun 2023 BAPENDA	√	√		BK
2	Standar Operasional Prosedur Nomor 900/014/Sekrt Tahun 2022 Tentang Sosialisasi Kebijakan Pajak	Kelompok Subs-Substansi Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah / Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2022 BAPENDA	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah							
1	Standar Operasional Prosedur Nomor 900/014/Sekrt Tahun 2022 Tentang Pendataan Pajak Daerah	Kelompok Subs-Substansi Pendataan Pajak Daerah / Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2022 BAPENDA	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah							
1	Standar Operasional Prosedur Nomor 900/014/Sekrt Tahun 2022 Tentang Pengolahan dan Pemutakhiran Basis Data (<i>database</i>)	Sub Bid Pengelolaan Data dan Sistem Informasi / Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2023 BAPENDA	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penetapan Wajib Pajak Daerah							
1	Standar Operasional Prosedur Nomor 900/014/Sekrt Tahun 2022 Tentang Penetapan atas hasil SKPDKB	Sub Bid Penetapan Pajak Daerah / Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2022 BAPENDA	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah							

1	Standar Operasional Prosedur Nomor 900/014/Sekrt Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Lainnya	Sub Bid Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah / Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2022 BAPENDA	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah							
1	Standar Operasional Prosedur Nomor 900/014/Sekrt Tahun 2022 Tentang Pemeriksaan Pajak Daerah	Kelompok Subs-Substansi Pemeriksaan Pajak Daerah /Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2022 BAPENDA	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah							
1	Standar Operasional Prosedur Nomor 900/014/Sekrt Tahun 2022 Tentang Penagihan & Penyelesaian Piutang Pajak Daerah	Kelompok Subs-Substansi Penagihan Pajak Daerah /Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2022 BAPENDA	√	√		BK
Sub Kegiatan : Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah							
1	Standar Operasional Prosedur Nomor 900/014/Sekrt Tahun 2022 Tentang keberatan atas ketetapan Pajak Daerah	Sub Bid Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah / Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2022 BAPENDA	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah							
1	Standar Operasional Prosedur Nomor 900/014/Sekrt Tahun 2022 Tentang Pemeriksaan Pajak Daerah	Kelompok Subs-Substansi Pemeriksaan Pajak Daerah /Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2022 BAPENDA	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah							
1	Standar Operasional Prosedur Nomor 900/014/Sekrt Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Pengembangan PAD dan Retribusi	Sub bid Pengembangan Pajak Daerah / Kelompok Subs-Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2022 BAPENDA	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang						
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						
	Indikator Program : Persentase Pengembangan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
	- Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
	-Jumlah peserta Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS

2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik						
	Indikator Program : Persentase Pendidikan Politik Masyarakat	Bidang Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Bidang Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
	- Jumlah peserta Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bidang Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						
	Indikator Program : Presentase meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Presentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						

	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bidang Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bidang Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya						
	Indikator Program : Presentase meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Bidang Ideologi, Wawasan Bangsa Dan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bidang Ideologi, Wawasan Bangsa Dan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bidang Ideologi, Wawasan Bangsa Dan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bidang Ideologi, Wawasan Bangsa Dan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial						

	Indikator Program : Persentase Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Bidang Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bidang Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bidang Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
	- Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bidang Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
	- Jumlah pelaksanaan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang						
1	Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik berwawasan kebangsaan per tahun	-Bidang Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik -Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
C.	Daftar Data Statistik Sektoral Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang						
1	Data Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) /Ormas yang terdaftar di Kab. Karawang tahun 2024	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS

[illegible]

1	Informasi tentang profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK
3	Agenda Kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kesbangpol	√	√		BK
4	Agenda Kerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK

	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
9	Agenda surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kesbangpol	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kesbangpol	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kesbangpol	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kesbangpol	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kesbangpol	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kesbangpol	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kesbangpol	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kesbangpol	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kesbangpol	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK
E. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara							

3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Bidang Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen Dan Penanganan Konflik	Tahun 2024 Kesbangpol	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Karawang						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Indikator Program : Presentase kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang/Bagian : Sekretariat, Keuangan, Perencanaan, Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Keperawatan	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
	1. Indikator Kegiatan : Presentase dokumen laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Bidang/Bagian : Sekretariat, Keuangan, Perencanaan, Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Keperawatan	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Bidang/Bagian : Sekretariat, Keuangan, Perencanaan	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
	2. Indikator Kegiatan : Prosentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Bidang/Bagian : Sekretariat, Keuangan, Perencanaan, Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Keperawatan	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan : Prosentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan kesehatan yang disediakan	Bidang/Bagian : Sekretariat, Keuangan, Perencanaan, Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Keperawatan	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
	Indikator Program : jumlah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKP dan UKM Kewenangan daerah kabupaten/kota	Bidang/Bagian : Sekretariat, Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Keperawatan	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Jumlah Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya prasarana pendukungnya	Bidang Penunjang Medik	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS

	Indikator Sub Kegiatan :Jumlah pembangunan rumah saki beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Bidang Penunjang Medik	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan : Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Bidang Penunjang Medik	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Bidang Pelayanan Medik, Bidang Keperawatan	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Pengembangan Rumah Sakit	Bagian Sekretariat	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
B.	Daftar Data Statistik Sektoral Pada Rumah Sakit Umum Daerah Karawang						
1	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD	Bidang/Bagian Keperawatan, Perencanaan & Anggaran	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
2	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap	Bidang/Bagian Keperawatan, Perencanaan & Anggaran	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
3	Jumlah Kunjungan Pasien Bedah	Bidang/Bagian Pelayanan Medik, Perencanaan & Anggaran	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
4	Jumlah Kunjungan Pasien Gawat Darurat	Bidang/Bagian Pelayanan Medik, Perencanaan & Anggaran	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
5	Jumlah Kunjungan Pasien KIA	Bidang/Bagian Keperawatan, Perencanaan & Anggaran	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
6	Jumlah Kunjungan Pasien Perawatan Kritis	Bidang/Bagian Pelayanan Medik, Perencanaan & Anggaran	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
7	Jumlah Lembar Resep dan Resep yang dilayani instalasi farmasi	Bidang/Bagian Penunjang Medik, Perencanaan & Anggaran	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
8	Jumlah Pelayanan Bank Darah	Bidang/Bagian Penunjang Medik, Perencanaan & Anggaran	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS

9	Jumlah Kunjungan Pasien Radiologi	Bidang/Bagian Penunjang Medik, Perencanaan & Anggaran	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
10	Jumlah Pelayanan Gizi	Bidang/Bagian Penunjang Medik, Perencanaan & Anggaran	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
11	Jumlah Pelayanan Rehabilitasi Medis	Bidang/Bagian Penunjang Medik, Perencanaan & Anggaran	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
12	Jumlah Tenaga Keperawatan di RSUD	Kelompok Sub Substansi TU dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
13	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat RSUD	Kelompok Sub Substansi TU dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
14	Jumlah Tenaga Medis di RSUD	Kelompok Sub Substansi TU dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
15	Jumlah Tenaga Teknis Medis RSUD	Kelompok Sub Substansi TU dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
16	Jumlah Administrasi dan Umum	Kelompok Sub Substansi TU dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
C. Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Karawang							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Kelompok Sub Substansi Akuntansi dan Verifikasi	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Kelompok Sub Substansi Akuntansi dan Verifikasi	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Kelompok Sub Substansi Akuntansi dan Verifikasi	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Kelompok Sub Substansi Akuntansi dan Verifikasi	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Kelompok Sub Substansi Akuntansi dan Verifikasi	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		BK

4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Kelompok Sub Substansi Penyedia Sarana Medik dan Non Medik	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		BK
5	Data perbendaharaan	Kelompok Sub Substansi Perbendaharaan	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							
1	Informasi tentang profil Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Kelompok Sub Substansi Pelaporan Program dan Informasi	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Karawang (ASN dan Non ASN)	Kelompok Sub Substansi TU dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		BK
3	Agenda Kerja Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karawang setiap bulan pada tahun berjalan	Kelompok Sub Substansi TU dan Kepegawaian	Tahun 2025 RSUD Karawang	√	√		BK
4	Agenda Kerja Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karawang	Kelompok Sub Substansi TU dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Kelompok Sub Substansi Rumah Tangga dan Logistik	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		BK

6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Kelompok Sub Substansi Hukum, Humas, Pemasaran dan Promosi Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Bagian Sekretariat	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Kelompok Sub Substansi Hukum, Humas, Pemasaran dan Promosi Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
9	Agenda surat Rumah Sakit Umum Daerah Karawang	Kelompok Sub Substansi TU dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Kelompok Sub Substansi Perencanaan Program dan Anggaran	Tahun 2025 RSUD Karawang	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Kelompok Sub Substansi Perencanaan Program dan Anggaran	Tahun 2025 RSUD Karawang	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Kelompok Sub Substansi Perencanaan Program dan Anggaran	Tahun 2025 RSUD Karawang	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Kelompok Sub Substansi Perencanaan Program dan Anggaran	Tahun 2025 RSUD Karawang	√	√		BK

	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Kelompok Sub Substansi Penyedia Sarana Medik dan Non Medik	Tahun 2025 RSUD Karawang	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Kelompok Sub Substansi Pelaporan Program dan Informasi	Tahun 2025 RSUD Karawang	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Kelompok Sub Substansi Perbendaharaan	Tahun 2025 RSUD Karawang	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Karawang	Kelompok Sub Substansi Pelaporan Program dan Informasi	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Kelompok Sub Substansi Pelaporan Program dan Informasi	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Pelaporan Program dan Informasi	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Kelompok Sub Substansi Pelaporan Program dan Informasi	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		BK
3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Kelompok Sub Substansi Hukum, Humas, Pemasaran dan Promosi Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		BK

4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Kelompok Sub Substansi Hukum, Humas, Pemasaran dan Promosi Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Rumah Sakit Umum Daerah Karawang	Kelompok Sub Substansi Perencanaan Program dan Anggaran	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Kelompok Sub Substansi Perencanaan Program dan Anggaran	Tahun 2021 RSUD Karawang	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Kelompok Sub Substansi Perencanaan Program dan Anggaran	Tahun 2025 RSUD Karawang	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Kelompok Sub Substansi Hukum, Humas, Pemasaran dan Promosi Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Kelompok Sub Substansi Hukum, Humas, Pemasaran dan Promosi Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Kelompok Sub Substansi Hukum, Humas, Pemasaran dan Promosi Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Kelompok Sub Substansi Hukum, Humas, Pemasaran dan Promosi Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Bagian Sekretariat	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Bagian Sekretariat	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		BK
D. Daftar Produk Hukum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Karawang							
1	Peraturan Bupati 54 Tahun 2024 Tentang : Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Keuangan	Tahun 2024 RSUD Karawang	√	√		SS

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Indikator Program dan Daftar Data Indikator Sub Kegiatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Karawang						
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
	Indikator Program : Persentase Pemenuhan UKP UKM	Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang SDM dan Sarana Prasarana	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase fasyankes pemerintah yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar	Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang SDM dan Sarana Prasarana	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Bidang SDM dan Sarana Prasarana	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Indikator Program : Presentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang SDM dan Sarana Prasarana	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan	Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang SDM dan Sarana Prasarana	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS

	Indikator Sub Kegiatan : Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan	Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang SDM dan Sarana Prasarana	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
	Indikator Kegiatan : Presentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat	Bagian Tata Usaha/Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Bagian Tata Usaha/Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
B.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Karawang						
1	Persentase Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Bidang Pelayanan Kesehatan/Komite Mutu	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
2	Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi Standar Akreditasi RS	Sekretariat	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
3	Presentase penurunan jumlah komplain terkait mutu layanan	Bagian Tata Usaha/Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
4	Presentase penurunan jumlah kejadian kasus kesalahan tindakan dalam Pemberian Asuhan (PA)	Bidang Pelayanan Kesehatan/Komite Mutu	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
5	Indeks kepuasan pelanggan internal	Bagian Tata Usaha/Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
6	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar	Bidang SDM dan Sarana Prasarana/Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
7	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bidang Pelayanan Kesehatan/Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
8	Persentase pertumbuhan pendapatan kas Rumah Sakit	Bagian Tata Usaha/Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
9	Rasio pendapatan BLUD terhadap belanja	Bagian Tata Usaha/Sub	Tahun 2024 RSUD	√	√		SS
C.	Daftar Data Statistik Sektoral Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Karawang						
1	Jumlah Komposisi SDM	Bagian Tata Usaha	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS

2	Jumlah Tenaga Penunjang dan Non Kesehatan	Bagian Tata Usaha	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
3	Jumlah Tenaga Medis (Dokter)	Bagian Tata Usaha	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
4	Jumlah Perawat	Bagian Tata Usaha	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
5	Jumlah Kunjungan Pasien Instalasi Gawat Darurat	Bagian Tata Usaha	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
6	Jumlah Kunjungan Pasien Instalasi Gawat Darurat Berdasarkan Asal Pasien	Bagian Tata Usaha	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
7	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
8	Daftar 10 Besar Penyakit Rawat Jalan	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
9	Jumlah Kunjungan Rawat Inap	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
10	Indikator Kinerja Rawat Inap (BOR, TOI, BTO, Alos, NDR, GDR)	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
11	Daftar 10 Besar Penyakit Rawat Inap	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
12	Jumlah Kunjungan Pasien Intensif	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
13	Jumlah Kunjungan Pasien TB MDR	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
14	Jumlah Kunjungan Pasien Instalasi Bedah Sentral	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
15	Jumlah Kunjungan IBS berdasarkan Spesialisasi Operasi	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
16	Jumlah Kunjungan IBS berdasarkan Jenis Operasi	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
17	Jumlah Kunjungan IBS berdasarkan Anestesi	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
18	Jumlah Kunjungan Pasien Laboratorium	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
19	Jumlah Kunjungan Pasien Radiologi	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
20	Jumlah Kunjungan Pasien Fisioterapi	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS

21	Jumlah Layanan Farmasi (Jumlah Resep dan Layanan Farmasi)	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
22	Jumlah Porsi Pada Layanan Gizi Berdasarkan Jenis Makanan	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
23	Jumlah Porsi Pada Layanan Gizi Berdasarkan Bentuk Makanan	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
24	Capaian Indikator Mutu Nasional	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
25	Capaian Indikator Mutu Prioritas	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
26	Capaian Indikator Mutu Rumah Sakit	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
27	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
28	Survey Kepuasan Pasien	Bidang Pelayanan Kesehatan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
D.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Karawang						
Kepala Sub Bagian Keuangan							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK

5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							
1	Informasi tentang profil Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Karawang (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
3	Agenda Kerja Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Karawang setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2025 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
4	Agenda Kerja Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Karawang	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		
	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :						

7	a. Pengamatan gejala bencana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
9	Agenda surat Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Karawang	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan							
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2025 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2025 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2025 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2025 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2025 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2025 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2025 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Karawang	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
	2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Karawang, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Kehumasan)	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Kehumasan)	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Karawang	Seksi Penelitian dan Pengembangan SDM	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2023 - 2026	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2023 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tahun 2025 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sekretariat, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sekretariat, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK

	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sekretariat, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sekretariat, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sekretariat, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
E. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Karawang							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD							
Sub Kegiatan : Belanja Jasa Konsultansi Manajemen							
1	Peraturan Bupati Karawang tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang	Bagian Tata Usaha	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan	Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Bagian Perencanaan,	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang tentang Pelaksanaan Anggaran badan Layanan	Bagian Tata Usaha/Kepala Subag Perencanaan,	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK

4	Peraturan Bupati Karawang tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang	Bagian Tata Usaha, Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
5	Peraturan Bupati Karawang tentang Remunerasi Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang	Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
6	Peraturan Bupati Karawang tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan	Bidang SDM dan Sarana Prasarana, Seksi Pengadaan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK
7	Peraturan Bupati Karawang tentang Pedoman Kerja Sama pada Badan Layanan Umum	Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Umum dan	Tahun 2024 RSUD Jatisari Karawang	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN BANYUSARI KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Banyusari						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Banyusari Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Banyusari (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Banyusari setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Banyusari	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Banyusari	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Banyusari	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Banyusari	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Banyusari	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Banyusari	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Banyusari	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Banyusari	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Banyusari	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Banyusari	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Banyusari	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Banyusari	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Banyusari	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Banyusari	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Banyusari							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa/Kelurahan dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Banyusari Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Banyusari Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Banyusari Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Banyusari Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Banyusari Tahun 2024	Kasi Pelayanan umum	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Banyusari Tahun 2024	Kasi kesejahteraan sosial	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Banyusari Tahun 2024	Kasi kesejahteraan sosial	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Banyusari Tahun 2024	Kasi kesejahteraan sosial	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Banyusari Tahun 2024	Kasi kesejahteraan sosial	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Banyusari Tahun 2024	Kasi kesejahteraan sosial	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Banyusari Tahun 2024	Kasi kesejahteraan sosial	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Banyusari Tahun 2024	Kasi kesejahteraan sosial	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Banyusari Tahun 2024	Kasi kesejahteraan sosial	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Banyusari Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Banyusari Tahun 2024	Kasi kesejahteraan sosial	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Banyusari Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Banyusari							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasi Pelayanan umum ,kasi trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Banyusari							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Sekretaris Camat	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Sekretaris Camat	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Sekretaris Camat	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						

	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	c. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	b. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS

	c. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	b. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	c. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	d. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	e. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS

	f. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	g. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	h. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	i. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS

2	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
	Indikator Program: Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel		Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS

1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	b. Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Tahun 2024	Kasi trantib dan Kasi Pemerin	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	c. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 2024	Kasi trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	d. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Tahun 2024	Kasi trantib dan Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024	Kasi trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	f. Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Tahun 2024	Kasi pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	g. Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tahun 2024	Kasi pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	h. Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tahun 2024	Kasi pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS

E.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	Indikator Program: Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	e. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	f. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	g. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	h. Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	i. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS

	j. Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	k. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	l. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	m. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	n. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	o. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	p. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	q. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
	r. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		SS
E.	Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Banyusari						
A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 TentangTentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 tanggal 30 Desember tahun 2022.	Kasi Pemerintahan	Tahun 2022 Kec. Banyusari	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 tanggal 30 Desember tahun 2022.	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Banyusari	√	√		BK
3	Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
4	Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang .	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
5	Peraturan Bupati karawang nomor 9 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
6	Surat Perintah Camat Nomor 10 tahun 2024 Tim Pelaksana Gebyar Paten Kecamatan Banyusari	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
7	Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2024 Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK

b. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Banyusari	√	√		BK
2	Permendesa no 2 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2016 Kec. Banyusari	√	√		BK

2. Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

a. Sub Kegiatan: Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawangb	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK

3. Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

a. Sub Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

1	Surat Keputusan Camat Nomor 400.12 /02/Tahun 2024 Tentang Standar Operasional Pelayanan (SOP) Pelayanan Publik	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
B. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
1. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 401 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
3	Nota Kesepakatan antara Pemda Karawang dengan Kepolisian Resort Karawang dan Komando Distrik 0604 Karawang tentang Sinergitas Pemerintah daerah. POLRI dan TNI Karawang Selawasna (Simponi Karasa) Kabupaten Karawang	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
4	Surat Keputusan Camat Banyusari Nomor: 007/1/SP/Kec-2024 Tentang Penunjukkan Personil dalam kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI dan TNI dan Instansi Vertikal	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Banyusari	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN BATUJAYA KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Batujaya						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Batujaya Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Batujaya (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Batujaya setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Batujaya	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Batujaya	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat f. Lokasi evakuasi g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Batujaya	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Batujaya	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Batujaya	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Batujaya	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Batujaya	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Batujaya	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Batujaya	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Batujaya	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Batujaya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Batujaya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Batujaya	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Batujaya	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Batujaya							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa/Kelurahan dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Batujaya							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Batujaya							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS

3	Indikator Kegiatan : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan :						
	a. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Kasi Keamanan dan Ketertiban					
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		SS

E.	Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Batujaya						
A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
1	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Tentang Penyelenggaraan Perizinan Pelayanan Perizinan Terpadu Tanggal 28 Desember 2012	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2012 Kec. Batujaya	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Batujaya	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK
2. Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2022 Kec. Batujaya	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2022 Kec. Batujaya	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi PMD	Tahun 2022 Kec. Batujaya	√	√		BK

2	Surat Keputusan Camat Nomor 900 Tahun 2022 Tentang Musrenbang Kecamatan Batujaya	Kasi PMD	Tahun 2022 Kec. Batujaya	√	√		BK
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
1. Kegiatan : Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024							
a. Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	Kasi PMD	Tahun 2021 Kec. Batujaya	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 41 Tahun 2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2022 Kec. Batujaya	√	√		BK
3	Surat Keputusan Camat Nomor 900 Tahun 2022 Tentang Musrenbang Kecamatan Batujaya	Kasi PMD	Tahun 2022 Kec. Batujaya	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK
C. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
1. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2022 Kec. Batujaya	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2022 Kec. Batujaya	√	√		BK

3	Surat Keputusan Bupati Nomor 800.22/Kep. 485-Huk/2024 tanggal 11 Oktober Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintah Daerah POLRI dan TNI Karawang Salawasna (Simfoni Karasa) Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Batujaya	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN CIAMPEL KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Ciampel						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Ciampel Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Ciampel (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Ciampel setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Ciampel	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Ciampel	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Ciampel	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Ciampel	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Ciampel	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Ciampel	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Ciampel	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Ciampel	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Ciampel	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Ciampel	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Ciampel	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Ciampel	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Ciampel	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Ciampel	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Ciampel							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciampel Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciampel Tahun 2024	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciampel Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciampel Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciampel Tahun 2024	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciampel Tahun 2024	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciampel Tahun 2024	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciampel Tahun 2024	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciampel Tahun 2024	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciampel Tahun 2024	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciampel Tahun 2024	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciampel Tahun 2024	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tahun 2024	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciampel Tahun 2024	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciampel Tahun 2024	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Ciampel Tahun 2024	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Ciampel							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Ciampel							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Tahun 2024	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Tahun 2024	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Tahun 2024	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	b. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS

	c. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Tahun 2024	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun 2024	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2024	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
D.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	Indikator Program: Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS

	b. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	d. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	e. Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	f. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	g. Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	h. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	i. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	j. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	k. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	l. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	m. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS

	n. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
	o. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		SS
E.	Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Ciampel						
A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
1	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Tentang APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2023 Kec. Ciampel		√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor : 442 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2023 Kec. Ciampel		√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor : Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten karawang	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Ciampel	√	√		BK
4	Surat Keputusan Camat Nomor 22 Tahun. 2024 Tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Ciampel		√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Ciampel		√		BK
2. Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							
a. Sub Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
1	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Tentang APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2023 Kec. Ciampel		√		BK

2	Peraturan Bupati Karawang Nomor : 442 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2023 Kec. Ciampel		√		BK
3	Surat Keputusan Camat Nomor : 400.7/Kep. 30-Kec/2024 Tanggal 25 Januari 2024 Tentang Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Ciampel Tahun 2024	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
4	Surat Keputusan Camat Ciampel Nomor : 401.1/Kep.350-Kec/2023 tentang Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Tahun 2023-2028	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2023 Kec. Ciampel	√	√		BK
5	Surat Keputusan Camat Ciampel Nomor : 138/Kep.272-Kec/2023, tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Pelajar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2023 Kec. Ciampel	√	√		BK
6	Surat Keputusan Camat Nomor : 260/Kep. 50/Kec/2023, Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (SATGAS P2TP2A) Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Tahun 2023	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2023 Kec. Ciampel	√	√		BK
7	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK

3. Kegiatan: Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kepala Seksi PMD	Tahun 2021 Kec. Ciampel		√		BK
2	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel		√		BK

3	Keputusan Bupati Karawang Nomor 050.3/ Kep. 413 – Huk/ 2022 Tahun 2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pendelegasian Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 kepada Kepala Perangkat Daerah	Kepala Seksi PMD	Tahun 2022 Kec. Ciampel		√		BK
4	Surat Edaran Bupati Karawang Nomor 000.7.2.1/366/Bapp, tanggal 02 Februari 2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel		√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel		√		BK

b. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

1	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Tentang APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Kepala Seksi PMD	Tahun 2023 Kec. Ciampel		√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor : 442 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Kepala Seksi PMD	Tahun 2023 Kec. Ciampel		√		BK
3	Surat Keputusan Camat Nomor : 144/315/Kec Tahun 2024 Tentang Panitia Peningkatan Kapasitas BPD Tahun 2024	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
4	Surat Keputusan Camat Nomor : 400.10.4.3 / Kep.24 / I/ Kec /2024 Tahun 2024 Tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Tanggal 19 Januari 2024	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Seksi PMD	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK

B. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

1	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Tentang APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2023 Kec. Ciampel	√	√		BK
2	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2020 Kec. Ciampel	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang No. 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2016 Kec. Ciampel	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Karawang Nomor : 442 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2023 Kec. Ciampel	√	√		BK
5	Surat Keputusan Bupati Nomor 800.22/Kep. 485-Huk/2023 Tahun 2023 Tentang Tim Sinergitas Pemerintahan Daerah, Polri, Dan TNI Karawang Salawasna (Simponi Karasa) Kabupaten Karawang Tahun 2023.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2023 Kec. Ciampel	√	√		BK
6	Surat Keputusan Camat Nomor 800.22/Kep. 275/Kec/2024 Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintahan Daerah, Polri, Dan TNI Karawang Salawasna (Simponi Karasa) Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Tahun 2024.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
7	Surat Keputusan Camat Nomor : 800.1 /367/Kec, tanggal 30 Desember 2023 Tentang Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2024.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2023 Kec. Ciampel	√	√		BK
8	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK

C. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan: Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Desa	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2022 Kec. Ciampel	√	√		BK
3	Surat Perintah Camat Nomor : 800.1 /359/Kec, tanggal 24 Desember 2024 Tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Fisik Dana Transfer Desa Tahun Anggaran 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Ciampel	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN CIBUAYA KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Cibuaya						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Cibuaya Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Cibuaya (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Cibuaya setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Cibuaya	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Cibuaya	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Cibuaya	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cibuaya	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cibuaya	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cibuaya	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cibuaya	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cibuaya	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cibuaya	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cibuaya	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Cibuaya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Cibuaya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Cibuaya	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cibuaya	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Cibuaya							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cibuaya Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cibuaya Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cibuaya Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Keluaran di Kecamatan Cibuaya Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Keluaran di Kecamatan Cibuaya Tahun 2024	Kepala seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Keluaran di Kecamatan Cibuaya Tahun 2024	Kepala seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Keluaran di Kecamatan Cibuaya Tahun 2024	Kepala seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Keluaran di Kecamatan Cibuaya Tahun 2024	Kepala seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Keluaran di Kecamatan Cibuaya Tahun 2024	Kepala seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Keluaran di Kecamatan Cibuaya Tahun 2024	Kepala Sesksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Keluaran di Kecamatan Cibuaya Tahun 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Keluaran di Kecamatan Cibuaya Tahun 2024	Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Keluaran di Kecamatan Cibuaya Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Keluaran di Kecamatan Cibuaya Tahun 2024	Kepala Sesksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Keluaran di Kecamatan Cibuaya Tahun 2024	Kepala seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Keluaran di Kecamatan Cibuaya Tahun 2024	Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Cibuaya							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kepala seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kepala Sesksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Cibuaya							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024	Kepala seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Kepala seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kepala seksi pemerintahaan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kepala seksi pemerintahaan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Kepala seksi pemerintahaan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tahun 2024	Kepala seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kepala seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kepala seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kepala seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kepala seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	b. Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Tahun 2024	Kepala seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Kepala seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kepala seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Tahun 2024	Kepala seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kepala seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS

1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Tahun 2024	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2024	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tahun 2024	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tahun 2024	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	c. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2024	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2024	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Tahun 2024	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS

	b. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	c. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Tahun 2024	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun 2024	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2024	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun 2024	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2020 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2020 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2020 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2020 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	d. Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2020 Kec. Cibuaya	√	√		SS
5	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Tahun 2024	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS

b. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Tahun 2024	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
c. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tahun 2024	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
d. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Tahun 2024	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
e. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Tahun 2024	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
f. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun 2024	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
g. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tahun 2024	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
h. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Tahun 2024	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
i. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2024	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
j. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Tahun 2024	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS

	k. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Tahun 2024	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	l. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Tahun 2024	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS

3	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
	Indikator Program: Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						

	a. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	b. Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	c. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	d. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	f. Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	g. Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	h. Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tahun 2024	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
E.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	Indikator Program: Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kepala seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS

1	Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kepala seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tahun 2024	Kepala seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tahun 2024	Kepala seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tahun 2024	Kepala seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Tahun 2024	Kepala seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	e. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2024	Kepala seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	f. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2024	Kepala seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	g. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2024	Kepala seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	h. Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2024	Kepala seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	i. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tahun 2024	Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	j. Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2024	Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	k. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS

	l. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2024	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	m. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tahun 2024	Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	n. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Tahun 2024	Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	o. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tahun 2024	Kepala seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	p. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024	Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	q. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tahun 2024	Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS
	r. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		SS

E. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Cibuaya

A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Cibuaya	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Cibuaya	√	√		BK

3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK
2. Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							
a. Sub Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Kesos	Tahun 2022 Kec. Cibuaya	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Kesos	Tahun 2022 Kec. Cibuaya	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK
3. Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
a. Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa							
1	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang	Kasi PMD	Tahun 2010 Kec. Cibuaya	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah	Kasi PMD	Tahun 2015 Kec. Cibuaya	√	√		BK
3	Surat Keputusan Camat Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Pembentukan TIM MUSRENBANG kec Jayakerta	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK
4. Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							
a. Sub Kegiatan: Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							

1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Karawang dan peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2016	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2011 Kec. Cibuaya	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang dan Peraturan Bupati Karawang	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2016 Kec. Cibuaya	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pemerintahan	Tahun 2022 Kec. Cibuaya	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pemerintahan	Tahun 2022 Kec. Cibuaya	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cibuaya	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN CIKAMPEK KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Cikampek						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Cikampek Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Cikampek (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Cikampek setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Cikampek	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Cikampek setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Cikampek	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cikampek	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cikampek	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cikampek	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cikampek	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cikampek	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cikampek	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cikampek	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Cikampek	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Cikampek	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Cikampek	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cikampek	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Cikampek							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cikampek Tahun 2024	kasi pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cikampek Tahun 2024	kasi pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cikampek Tahun 2024	kasi pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cikampek Tahun 2024	kasi pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cikampek Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cikampek Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cikampek Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cikampek Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cikampek Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cikampek Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cikampek Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cikampek Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cikampek Tahun 2024	kasi pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cikampek Tahun 2024	kasi pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cikampek Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cikampek Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Cikampek							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Cikampek							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS

B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan		Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
D.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	Indikator Program: Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS

1	Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		SS
E. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Cikampek							
A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
1	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Pelayanan Perizinan Terpadu Tanggal 28 Desember 2012	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2012 Kec. Cikampek	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Cikampek	√	√		BK
3	Surat Keputusan Camat Nomor 470 / Kep. 12 /Kec Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Cikampek	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 / 175.7 /Kec Tahun 2024 Tentang Surat Keterangan Ahli Waris	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
5	SSstandar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6/ 171 /Kec Tahun 2024 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
6	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 / 172 /Kec Tahun 2024 Tentang Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
7	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 / 173 /Kec Tahun 2024 Tentang Penerbitan Akta Kelahiran	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK

8	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
2. Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							
a. Sub Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Kesos	Tahun 2022 Kec. Cikampek	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Kesos	Tahun 2022 Kec. Cikampek	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
B. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
1. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Trantib	Tahun 2022 Kec. Cikampek	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Trantib	Tahun 2022 Kec. Cikampek	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 800.22/Kep. 485-Huk/2024 tanggal 11 Oktober Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintah Daerah POLRI dan TNI Karawang Salawasna (Simponi Karasa) Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK

4	Surat Keputusan Camat Nomor 800.22 / Kep. 50/Kec Tanggal 12 Oktober Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintah Daerah, POLRI Dan TNI Karawang Salawasna (SIMPONI KARASA) Kabupaten Karawang Tahun 2024.	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK

C. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan: Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Sub Kegiatan: Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pemerintahan	Tahun 2022 Kec. Cikampek	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pemerintahan	Tahun 2022 Kec. Cikampek	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cikampek	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN CILAMAYA KULON KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Cilamaya Kulon						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Cilamaya Kulon Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Cilamaya Kulon (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Cilamaya Kulon setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Cilamaya Kulon	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Cilamaya Kulon	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Cilamaya Kulon	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Cilamaya Kulon	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Cilamaya Kulon							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2024	Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2024	Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2024	Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2024	Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2024	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2024	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2024	Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2024	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2024	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2024	Seksi Ketentraman dan Ketrtiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2024	Seksi Ketentraman dan Ketrtiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Cilamaya Kulon							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Cilamaya Kulon							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tahun 2024	Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	b. Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Seksi Ketentraman dan Ketrtiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Tahun 2024	Seksi Ketentraman dan Ketrtiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Tahun 2024	Seksi Ketentraman dan Ketrtiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Seksi Ketentraman dan Ketrtiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS

1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	c. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS

	b. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	c. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun 2024	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	d. Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
5	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS

b. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
c. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
d. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
e. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
f. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
g. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
h. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
i. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
j. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS

	k. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	l. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Tahun 2024	Seksi Pembedayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS

3	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
	Indikator Program: Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel		Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						

	a. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	b. Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Tahun 2024	Seksi Trantib dan Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	c. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 2024	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	d. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Tahun 2024	Seksi Trantib dan Seksi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	f. Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	g. Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	h. Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
E.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	Indikator Program: Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS

1	Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	e. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	f. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	g. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	h. Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	i. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tahun 2024	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	j. Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2024	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	k. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS

	l. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2024	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	m. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tahun 2024	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	n. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	o. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tahun 2024	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	p. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	q. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tahun 2024	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
	r. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		SS
E. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Cilamaya Kulon							
A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1. Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							
1	Keputusan Camat Cilamaya Kulon Nomor : 147.42/Kep.345/2024 Tentang Kelompok Kerja OprasionalPos Pelayanan Terpadu Kecamatan Cilamaya Kulon Tanggal 07 Mei 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK

2	Surat Keputusan Camat Cilamaya Kulon Nomor : 400.2/Kep.461/2024 tanggal 08 November 2024 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Prtlindungan Anak Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2024 - 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
2. Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							
a. Sub Kegiatan: Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							
1	Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PPSBB) secara Proporsional dan adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Kabupatena Karawang	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2020 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Bupati Karwang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
2	Surat Keputusan Camat Nomor : 476.1/Kep-36/Kec/2024 tentang Petugas Susur Warga Kecamatan Cilamaya Kulon	Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
3	Standar Operasional Prosedur Nomor : 476.1 /Kep-36/Kec/2024 tentang Petugas Susur Warga Kecamatan Cilamaya Kulon	Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Evaluasi Kelurahan/Desa							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Desa	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
B. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
1. Kegiatan: Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
a. Sub Kegiatan: Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Desa	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Seksi Pemerintahan	Tahun 2015 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Desa	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa	Seksi Pemerintahan	Tahun 2017 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Desa	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa	Seksi Pemerintahan	Tahun 2015 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK

C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
a. Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
1	Keputusan Camat Cilamaya Kulon Nomor : 840/Kep.03-Kec/2024 tanggal 5 Januari 2024 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Kasubag Umum, Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
2	Keputusan Camat Cilamaya Kulon Nomor : 950/Kep.01-Kec/2024 tanggal 5 Januari 2024 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PTK) Pada Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Kasubag Umum, Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK
3	Keputusan Camat Cilamaya Kulon Nomor : 800/Kep.14-Kec/2024 tanggal 8 September 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Kasubag Umum, Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Kulon	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Cilamaya Wetan						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Cilamaya Wetan Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Cilamaya Wetan (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Cilamaya Wetan setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Cilamaya Wetan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Cilamaya Wetan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Cilamaya Wetan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Cilamaya Wetan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Cilamaya Wetan							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Wetan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Wetan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Wetan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Wetan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Wetan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Wetan Tahun 2024	Kasi kesos	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Wetan Tahun 2024	Kasi kesos	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Wetan Tahun 2024	Kasi kesos	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Wetan Tahun 2024	Kasi kesos	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Wetan Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Wetan Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Wetan Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Wetan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Wetan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Wetan Tahun 2024	Kasi Trantibum	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilamaya Wetan Tahun 2024	Kasi Trantibum	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Cilamaya Wetan							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Cilamaya Wetan							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						

	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
	d. Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		SS

E.	Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Cilamaya Wetan						
A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
1	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah	Kasi Pemerintahan	Tahun 2014 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2021 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
4	Surat Perintah Camat Nomor 10 Tahun 2024, Tim Pelaksana Gebyar Paten Kecamatan Cilamaya Wetan	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2024 sub kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun. 2000 Tentang Pembentukan Kemasyarakatan Desa	Kasi PMD	Tahun 2000 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
2	Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor: 147.14/115/SPM, tanggal 07 Januari 2020 Perihal: Penjelasan Kepmendagri dan Otda Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Gerakan PKK	Kasi PMD	Tahun 2020 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
3	Surat Perintah Camat Nomor 147/01/Kec Perihal : Pembentukan Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan Cilamaya Wetan masa bhakti 2020-2025	Kasi PMD	Tahun 2020 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Peningkatan Efektifitas Pemerintahan tingkat Kecamatan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan				BK

2. Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang	Kasi Pemerintahan	Tahun 2008 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
3. Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							
1	Peraturan Daerah Karawang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang	Kasi Kesos	Tahun 2014 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
B. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
1. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 401 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
3	Nota Kesepakatan antara Pemda Karawang dengan Kepolisian Resort Karawang dan Komando Distrik 0604 Karawang tentang Sinergitas Pemerintah daerah. POLRI dan TNI Karawang Selawasna (Simponi Karasa) Kabupaten Karawang	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
4	Surat Keputusan Camat Cilamaya Wetan Nomor: 007/1/SP/Kec-2024 Tentang Penunjukkan Personil dalam kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI dan TNI dan Instansi Vertikal	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK

5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
C. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
1. Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2014 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilamaya Wetan	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN CILEBAR KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Cilebar						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Cilebar Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Cilebar (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Cilebar setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Cilebar	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Cilebar	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Cilebar	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilebar	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilebar	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilebar	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilebar	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilebar	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilebar	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilebar	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Cilebar	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Cilebar	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Cilebar	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Cilebar	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Cilebar							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilebar Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilebar Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilebar Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilebar Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilebar Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilebar Tahun 2024	Kasi Kessos	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilebar Tahun 2024	Kasi Kessos	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilebar Tahun 2024	Kasi Kessos	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilebar Tahun 2024	Kasi Kessos	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilebar Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilebar Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilebar Tahun 2024	Kasi Kessos	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilebar Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilebar Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilebar Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Cilebar Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Cilebar							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasubag Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasubag Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Cilebar							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Kasi Kessos	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kasi Kessos	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						

	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi PMD + Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
D.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	Indikator Program: Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS

	Indikator Sub Kegiatan:						
	r. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		SS
E. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Cilebar							
A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
1	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Cilebar	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Karawang Tahun Anggaran 2022 Tanggal 30 Desember 2022	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Cilebar	√	√		BK
3	Surat Keputusan Camat Nomor 138/Kep. 02/Sekret/2024 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
2. Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							
a. Sub Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan							
1	Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Karawang Tahun Anggaran 2022 Tanggal 30 Desember 2022	Kasi Kessos	Tahun 2022 Kec. Cilebar	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Kasi Kessos	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
1. Kegiatan: Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa							

a. Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Desa	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2022 Kec. Cilebar	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2022	Kasi PMD	Tahun 2022 Kec. Cilebar	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
C. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
1. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan APBD Karawang Tahun Anggaran 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 401 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Karawang Tahun Anggaran 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK

3	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dengan Kepolisian Resort Karawang dan Komando Distrik 0604 Karawang Tentang Sinergitas Pemerintah Daerah, POLRI dan TNI Karawang (Simponi) Kabupaten Karawang	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
D. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2022 Kec. Cilebar	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Cilebar	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN JATISARI KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Jatisari						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Jatisari Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Jatisari (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Jatisari setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Jatisari	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Jatisari	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Jatisari	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Jatisari	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Jatisari	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Jatisari	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Jatisari	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Jatisari	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Jatisari	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Jatisari	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Banyusari	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Jatisari	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Jatisari	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Jatisari	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Jatisari							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Jatisari Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Jatisari Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Jatisari Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Jatisari Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Jatisari Tahun 2024	Kasi Yan UM	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Jatisari Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Jatisari Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Jatisari Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Jatisari Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Jatisari Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Jatisari Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Jatisari Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Jatisari Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Jatisari Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Jatisari Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Jatisari Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Jatisari							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasubag Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Jatisari							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						

	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
D.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	Indikator Program: Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS

	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		SS
E.	Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Jatisari						
A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
1	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 29 Desember Tahun 2023	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2023 Kec. Jatisari	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 442 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 29 Desember Tahun 2023	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2023 Kec. Jatisari	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Adminitrasi Terpadu Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Jatisari	√	√		BK
4	Surat Keputusan Camat Nomor 138/ 30 / Kec. Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Paten Di Kecamatan Jatisari Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
5	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 /22.1/ PATEN / Kec. Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
6	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 / 22.2 / PATEN / Kec. Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Penerbitan Pendirian PAUD/TK, SD,SLTP dan SLTA Sederajat	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
7	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 /22.3/ PATEN / Kec. Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Usaha Sektor Formal, Non Formal Di Bidang Perindagasar	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK

8	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 /22.4/ PATEN / Kec. Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Surat Rekomendasi Izin Pemotongan Unggas yang bersifat Komersial	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
9	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 /22.5/PATEN Kec. Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Surat Rekomendasi Izin Usaha Bidang Peternakan, Perikanan Dan Pertanian Dan Tanaman Pangan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
10	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 /22.6/PATEN/ Kec. Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Surat Rekomendasi Izin Usaha Saprodi	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
11	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6/22.7/ PATEN/ Kec. Tahun 2024 Tentang Surat Keterangan Ahli Waris	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
12	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.7/22.8/ PATEN / Kec. Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Izin TKI ke Luar Negeri	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
13	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.7/22.9/ PATEN / Kec. Tahun 2024 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
14	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.7/22.10/ PATEN/ Kec. Tahun 2024 Tentang Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
15	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.7/22.11/PATEN/ Kec. Tahun 2024 Tentang Penerbitan Akte Kelahiran	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
16	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK

2. Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

a. Sub Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan

1	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 29 Desember Tahun 2023	Kasi Kesos	Tahun 2023 Kec. Jatisari	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 442 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 29 Desember Tahun 2023	Kasi Kesos	Tahun 2023 Kec. Jatisari	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK

B. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

1	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 29 Desember Tahun 2023	Kasi Trantib	Tahun 2023 Kec. Jatisari	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 442 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 29 Desember Tahun 2023	Kasi Trantib	Tahun 2023 Kec. Jatisari	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 800.22/Kep. 485-Huk/2024 tanggal 11 Oktober Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintah Daerah POLRI dan TNI Karawang Salawasna (Simponi Karasa) Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
4	Surat Keputusan Camat Nomor 800.22 / Kep. 50.1/Kec Tanggal 12 Oktober Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintah Daerah, POLRI Dan TNI Karawang Salawasna (SIMPONI KARASA) Kabupaten Karawang Tahun 2024.	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK

5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK
C. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
1. Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 29 Desember Tahun 2023	Kasi Pemerintahan	Tahun 2023 Kec. Jatisari	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 442 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 29 Desember Tahun 2023	Kasi Pemerintahan	Tahun 2023 Kec. Jatisari	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Jatisari	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN JAYAKERTA KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Jayakarta						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Jayakarta Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Jayakarta (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Jayakarta setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Jayakarta	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Jayakarta	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Jayakarta	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Jayakarta	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Jayakarta	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Jayakarta	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Jayakarta	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Jayakarta	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Jayakarta	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Jayakarta	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Jayakarta	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Jayakarta	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Jayakarta	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Jayakarta							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Jayakarta Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Jayakarta Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Jayakarta Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Jayakarta Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Jayakarta Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Jayakarta Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Jayakarta Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Jayakarta Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Jayakarta Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Jayakarta Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Jayakarta Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Jayakarta Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Jayakarta Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Jayakarta Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Jayakarta Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Jayakarta Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Jayakarta							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Jayakarta							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Sekretaris Camat	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Sekretaris Camat	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	b. Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasi Kemanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Tahun 2024	Kasi Kemanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kasi Kemanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa					SS

1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	c. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS

	b. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	c. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	d. Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		SS

[illegible]

1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
1	Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tentang Lomba Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2014 Kec. Jayakarta	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Jayakarta	√	√		BK
3	Surat Keputusan Camat Nomor 02 Tahun. 2024 Tentang Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
1	Permendesa No. 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa	Kasi PMD	Tahun 2016 Kec. Jayakarta	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Jayakarta	√	√		BK
2. Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							
1	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Jayakarta	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Jayakarta	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

1	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Jayakarta	√	√		BK
2	Surat Keputusan Bupati Nomor 52 Tahun. 2024. Tentang Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK
3	Surat Keputusan Camat Nomor 51 Tahun. 2024 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Kase Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK
3. Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							
a. Sub Kegiatan: Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							
1	Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PPSBB) secara Proporsional dan adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Kabupaten Karawang	Kasi Kesos	Tahun 2020 Kec. Jayakarta	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							
1	Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Tersegmentasi Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Karawang	Kasi Kesos	Tahun 2020 Kec. Jayakarta	√	√		BK
4. Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
a. Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa							
1	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang	Kasi PMD	Tahun 2010 Kec. Jayakarta	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah	Kasi PMD	Tahun 2015 Kec. Jayakarta	√	√		BK
3	Surat Keputusan Camat Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Pembentukan TIM MUSRENBANG kec Jayakarta	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Jayakarta	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Karawang Barat						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Karawang Barat Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Karawang Barat (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Karawang Barat setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Karawang Barat	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat		√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Karawang Barat	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Karawang Barat	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Karawang Barat	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Karawang Barat							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024	Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang)	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024	Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang)	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024	Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang)	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024	Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang)	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024	Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang)	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024	Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang)	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024	Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang)	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Barat Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Karawang Barat							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang)	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Karawang Barat							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Kasi Pemerintahan & Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kasi Pemerintahan & Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Presentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS

	b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
	c. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		SS
E.	Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Karawang Barat						
A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Karawang Barat	√	√		BK

3	Peraturan Bupati Karawang No. 20 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
4	Surat Bupati Karawang Nomor : 510.32 /435/Tapem tanggal 06 Februari Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gebyar Paten Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
5	Surat Keputusan Camat Nomor : 510/Kep. 10/Kec 15 September 2024 tentang Tim Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
6	Standar Operasional Prosedur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang SOP Pelayanan Administrasi Terpadu PATEN Kecamatan Karawang Barat	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
7	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (PATEN) - Rapat Persiapan, - Kegiatan Sewa Panggung, Sewa Tenda, Mamin Kegiatan, Pembuatan Laporan	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK

2. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

b. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2022 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun.2022 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK

2. Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan /PMD	Tahun 2022 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah	Kasi PMD / Lurah Wilayah Kec. Karawang Barat	Tahun 2022 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 903/Kep. 415-Huk/2022 Tahun 2022 Tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kasi PMD / Lurah Wilayah Kec. Karawang Barat	Tahun 2022 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
4	Surat Keputusan Camat Karawang Barat No. 903/Kep,03/Kec/2024 tentang Pejabat Teknis Kegiatan Tahun 2024	Kasi PMD / Lurah Wilayah Kec. Karawang Barat	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Administrasi, Honor Pendamping, Pembangunan Fisik	Kasi PMD / Lurah Wilayah Kec. Karawang Barat	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK

c. Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan /PMD	Tahun 2022 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pemerintahan / Lurah Wilayah Kec. Karawang Barat	Tahun 2022 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pemerintahan / Lurah Wilayah Kec. Karawang Barat	Tahun 2016 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
4	Surat Keputusan Lurah Karawang Kulon, Lurah Adiarsa Barat, Lurah Nagasari, Lurah Karangpawitan, Lurah Tanjungpura, Lurah Tanjungmekar, Lurah Tunggakjati dan Lurah Mekarjati tentang SK Penetapan RT dan RW Tahun 2024	Kasi Pemerintahan / Lurah Wilayah Kec. Karawang Barat	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK

5	Surat Keputusan Lurah tentang Pembentukan LPM	Kasi Pemerintahan / Lurah Wilayah Kec. Karawang Barat	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
6	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rapat LMP dan Honor RT/RW	Kasi Pemerintahan / Lurah Wilayah Kec. Karawang Barat	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
B. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
1. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2022 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2022 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 800.22/Kep. 485-Huk/2024 tanggal 11 Oktober Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintah Daerah POLRI dan TNI Karawang Salawasna (Simponi Karasa) Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
4	Surat Keputusan Camat Nomor 800.22 / Kep. 50.1/Kec Tanggal 12 Oktober Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintah Daerah, POLRI Dan TNI Karawang Salawasna (SIMPONI KARASA) Kabupaten Karawang Tahun 2024.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan : Bahan Laporan Kegiatan, BBM Operasional, Makan Minum Pengamanan, Honor Petugas Simponi Karasa, Sewa Kendaraan Operasional	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Karawang Barat	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Karawang Timur						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Karawang Timur Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Karawang Timur (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Karawang Timur setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Karawang Timur	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Karawang Timur	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Karawang Timur	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Karawang Timur	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Karawang Timur							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Timur Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Timur Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Timur Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Timur Tahun 2024	Kasi PMD dan Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Timur Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Timur Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Timur Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Timur Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Timur Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Timur Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Timur Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Timur Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Timur Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Timur Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Timur Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Karawang Timur Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Karawang Timur							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Sekcam dan Kasubag Umum Prolap	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Sekcam dan Kasubag Umum Prolap	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Karawang Timur							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024	Sekcam dan Kasubag Umum Prolap	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Sekcam dan Kasubag Umum Prolap	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
	b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS

	c. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		SS
E. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Karawang Timur							
A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang No. 20 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Kab. Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK

4	Surat Bupati Karawang Nomor : 510.32 /435/Tapem tanggal 06 Februari Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gebyar Paten Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
5	Surat Keputusan Camat Nomor : 510/Kep. 10/Kec 15 September 2024 tentang Tim Pelayanan Administrasi Terpadu	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
6	Standar Operasional Prosedur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang SOP Pelayanan Administrasi Terpadu PATEN Kecamatan Karawang Timur	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
7	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (PATEN) - Rapat Persiapan, - Kegiatan Sewa Panggung, Sewa Tenda, Mamin Kegiatan, Pembuatan Laporan	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK

2. Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

a. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Ketua TP PKK Desa dan Kelurahan	Tahun 2022 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Ketua TP PKK Desa dan Kelurahan	Tahun 2022 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun.2022 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Ketua TP PKK Desa dan Kelurahan	Tahun 2022 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
4	Surat Keputusan Camat Karawang Timur No. 903/Kep,03/Kec/2024 tentang Pejabat Teknis Kegiatan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Ketua TP PKK Desa dan Kelurahan	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
5	Surat Keputusan Lurah dan Kepala Desa tentang Penetapan dan Pembentukan Tim Penggerak PKK Kelurahan Kecamatan Karawang Timur Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Ketua TP PKK Desa dan Kelurahan	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tahun 2022 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tahun 2022 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
3	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 5 Tahun 2018 tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tahun 2018 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
4	Peraturan Bupati Karawang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 - 2021 dengan Kebijakan Nasional	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tahun 2017 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
5	Surat Keputusan Camat Nomor 147.2/Kep. 02/Kec. Tahun 2024 Tentang Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan Karawang Timur Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
6	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan : Rapat Persiapan Musrenbang Usulan Bahan Musrenbang(Foto Copy, Paparan), Kegiatan Musrenbang makan minum, Transport Musrenbang Dapil)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK

b. Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi PMD / Lurah Karawang Wetan	Tahun 2022 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah	Kasi PMD / Lurah Adiarsa Timur	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK

3	Surat Keputusan Bupati Nomor 903/Kep. 415-Huk/2022 Tahun 2022 Tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Karawang timur Kabupaten Karawang tahun 2024	Kasi PMD / Lurah Palumbonsari	Tahun 2022 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
4	Surat Keputusan Camat Karawang Timur No. 903/Kep,03/Kec/2024 tentang Pejabat Teknis Kegiatan Tahun 2024	Kasi PMD / Lurah Plawad	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan _ Administrasi, Honor Pendamping, Pembangunan Fisik	Kasi PMD / Lurah Wilayah Karawang Timur	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK

c. Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan /PMD	Tahun 2022 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pemerintahan / Lurah Wilayah Karawang Timur	Tahun 2022 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pemerintahan / Lurah Wilayah Karawang Timur	Tahun 2016 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
4	Surat Keputusan Lurah Karawang Wetan, Lurah Adiarsa Timur, Lurah Palumbonsari dan Lurah Plawad tentang SK Penetapan RT dan RW Tahun 2024	Kasi Pemerintahan / Lurah Wilayah Karawang Timur	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
5	Surat Keputusan Lurah tentang Pembentukan LPM	Kasi Pemerintahan / Lurah Wilayah Karawang Timur	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK
6	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rapat LMP dan Honor RT/RW	Kasi Pemerintahan / Lurah Wilayah Karawang Timur	Tahun 2024 Kec. Karawang Timur	√	√		BK

B. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Klari						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Klari Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Klari (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Klari setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Klari	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Klari	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Klari	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Klari	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Klari	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Klari	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Klari	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Klari	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Klari	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Klari	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Klari	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Klari	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Klari	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Klari	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Klari							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Klari Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Klari Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Klari Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Klari Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Klari Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Klari Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Klari Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Klari Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Klari Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Klari Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Klari Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Klari Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Klari Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Klari Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Klari Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Klari Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Klari							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Klari							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	b. Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024						SS

1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	b. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	b. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Kasi PMD, Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS

	d. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	e. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	f. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	g. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	h. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	i. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	j. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	k. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	l. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS

C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan		Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS

4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	b. Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Tahun 2024	Kasi Pemerintahan, Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	c. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	d. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		SS

A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
1	Surat Keputusan Bupati Nomor 800.22/Kep. 485-Huk Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintahan Daerah,Polri dan TNI Karawang Salawasna (Simponi Karasa) Kab.Karawang Tahun 2024 Tanggal 11 Oktober Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
2	Surat Keputusan Camat Nomor 800/Kep. 16/Kec Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Efektif Inovasi Daerah Optimalisasi Pengisian Indikator Penilaian Sinergitas Kecamatan Melalui Google Spreadsheet di Kecamatan Klari	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
1	Surat Keputusan Camat Nomor 800.22/Kep. 14 -Kec Tahun 2024 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Klari		√		BK
2	Standar Operasional Prosedur Nomor 067/91/PATEN Tahun 2024 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Klari	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Klari		√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Klari		√		BK
2. Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							
1	Surat Keputusan Camat Nomor 800.22/Kep. 14 -Kec Tahun 2024 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK

2	Standar Operasional Prosedur Nomor 067/91/PATEN Tahun 2024 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Klari.	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Paten	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Klari	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Paten	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Klari	√	√		BK
2	Surat Keputusan Camat Nomor 400.2.4/Kep. 22 Tahun 2024 Tentang Gugus Tugas Layak Anak Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
3	Surat Keputusan Camat Nomor 400.2.4/Kep. 22 Tahun 2024 Tentang Gugus Tugas Layak Anak Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
3. Kegiatan: Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
4. Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							

a. Sub Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
2. Kegiatan: Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
a. Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
d. Sub Kegiatan: Evaluasi Kelurahan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
e. Sub Kegiatan: Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
1. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							

a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
2. Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
3. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
1. Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							
a. Sub Kegiatan: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
d. Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
e. Sub Kegiatan: Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
f. Sub Kegiatan: Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
g. Sub Kegiatan: Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
h. Sub Kegiatan: Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
i. Sub Kegiatan: Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK
j. Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Klari	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN KOTABARU KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Kotabaru						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Kotabaru Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Kotabaru (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Kotabaru setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Kotabaru	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Kotabaru setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Batujaya	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Kotabaru	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Kotabaru	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Kotabaru	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Kotabaru	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Kotabaru	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Kotabaru	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Kotabaru	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Batujaya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Batujaya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Kotabaru	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Kotabaru	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Kotabaru							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Batujaya Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Kotabaru							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Kotabaru							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:		Tahun 2024 Kec. Kotabaru				
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						

	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	b. Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						

	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaaan Masyarakat Umum dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaaan Masyarakat Umum dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Umum dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Umum dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Umum dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakatat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	c. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tahun 2024			√	√		SS

	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	b. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	c. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Mukim Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	b. Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen Hasil Peresmian Mukim Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	e. Jumlah Sarana dan Prasarana Mukim yang Disediakan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
5	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS

	d. Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
6	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	b. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	c. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	d. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Tahun 2024	Kasi Kesos/ Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	e. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	f. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS

	g. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	h. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	i. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	j. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	k. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	l. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan		Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial/KUA	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial/KUA	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						

	Indikator Program: Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel		Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	b. Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	c. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	d. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	f. Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS

	g. Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	h. Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
E.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	Indikator Program: Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	e. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	f. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	g. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS

	h. Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	i. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	j. Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	k. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	l. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	m. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	n. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	o. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	p. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	q. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS
	r. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		SS

E.	Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Kotabaru

A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1	Surat Keputusan Camat Nomor 400.12/01/Tahun 2024 Tentang Standar Operasional Pelayanan (SOP) Pelayanan Publik	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK
2	Standar Operasional Prosedur Nomor 300.1/204/Kec Tahun 2024 Tentang Peyanan Rekomendasi Ijin dan Surat Pengantar Kelakuan Baik	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kotabaru	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN KUTAWALUYA KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Kutawaluya						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Kutawaluya Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Kutawaluya (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Kutawaluya setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Kutawaluya	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Kutawaluya	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Kutawaluya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Kutawaluya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Kutawaluya							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kutawaluya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kutawaluya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kutawaluya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kutawaluya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Kutawaluya Tahun 2024	Kasi Yanum	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Kutawaluya Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Kutawaluya Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Kutawaluya Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Kutawaluya Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Kutawaluya Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Kutawaluya Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kutawaluya Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Kutawaluya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Kutawaluya Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Kutawaluya Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Kutawaluya Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Kutawaluya							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasubag Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Kutawaluya							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS

1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
D.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	Indikator Program: Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						

	a. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		SS
E.	Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Kutawaluya						
A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Pelayanan Perizinan Terpadu Tanggal 28 Desember 2012	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2012 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
3	Surat Keputusan Camat Nomor 138/ /Kec Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Kutawaluya	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
5	Standar Operasional Prosedur Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Pendirian PAUD/TK, SD, SLTP dan SLTA Sederajat	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
6	Standar Operasional Prosedur Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Usaha Sektor Formal, Non Formal Di Bidang Perindagsar	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
7	Standar Operasional Prosedur Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Izin Pemotongan Unggas	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
8	Standar Operasional Prosedur Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Izin Usaha Bidang Peternakan, Perikanan Dan Pertanian Dan Tanaman Pangan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
9	Standar Operasional Prosedur Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Izin Usaha Saprodi	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK

10	Standar Operasional Prosedur Tahun 2024 Tentang Surat Keterangan Ahli Waris	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
11	Standar Operasional Prosedur Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Izin TKI ke Luar Negeri	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
12	Standar Operasional Prosedur Tahun 2024 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
13	Standar Operasional Prosedur Tahun 2024 Tentang Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Kasi Pelayanan umum	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
14	Standar Operasional Prosedur Tahun 2024 Tentang Surat Pengantar Penerbitan Keterangan Pindah Antar Kecamatan	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
15	Standar Operasional Prosedur Tahun 2024 Tentang Penerbitan Akta Kelahiran	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
16	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK

2. Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

a. Sub Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2022 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2022 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK

B. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2022 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2022 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 800.22/Kep. 485-Huk/2024 tanggal 11 Oktober Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintah Daerah POLRI dan TNI Karawang Salawasna (Simponi Karasa) Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
4	Surat Keputusan Camat Nomor 800 / Kep. /Kec Tanggal 12 Oktober Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintah Daerah, POLRI Dan TNI Karawang Salawasna (SIMPONI KARASA) Kabupaten Karawang Tahun 2024.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK

C. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pemerintahan	Tahun 2022 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pemerintahan	Tahun 2022 Kec. Kutawaluya	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Kutawaluya	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Lemahabang						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Lemahabang Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Lemahabang (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Lemahabang setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Lemahabang	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Lemahabang	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Lemahabang	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Lemahabang	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Lemahabang	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Lemahabang	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Lemahabang	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Lemahabang	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Lemahabang	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Lemahabang	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Lemahabang	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Lemahabang	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Lemahabang	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Lemahabang	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Lemahabang							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa/Kelurahan dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lemahabang Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lemahabang Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lemahabang Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lemahabang Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Lemahabang Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Lemahabang Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Lemahabang Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Lemahabang Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Lemahabang Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Lemahabang Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Lemahabang Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lemahabang Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Lemahabang Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Lemahabang Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Lemahabang Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Lemahabang Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
C.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Lemahabang						
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasubag Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
D.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Lemahabang						
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024		Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS

3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang				
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS

2	Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
D.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	Indikator Program: Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang				SS

1	Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		SS
E.	Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Lemahabang						
A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Lemahabang	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Lemahabang	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Adminitrasi Terpadu Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Lemahabang	√	√		BK
4	Surat Keputusan Camat Nomor 138/ 30 / Kec. Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Paten Di Kecamatan Lemahabang Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK

5	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 /22.1/ PATEN /Kec. Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
6	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 / 22.2 / PATEN /Kec. Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Penerbitan PendirianPAUD/TK, SD,SLTP dan SLTA Sederajat	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
7	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 /22.3/ PATEN /Kec. Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Usaha Sektor Formal, Non Formal Di Bidang Perindagasar	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
8	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 /22.4/ PATEN /Kec. Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Surat Rekomendasi Izin Pemotongan Unggas yang bersifat Komersial	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
9	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 /22.5/PATEN Kec. Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Surat Rekomendasi Izin Usaha Bidang Peternakan, Perikanan Dan Pertanian Dan Tanaman Pangan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
10	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 /22.6/PATEN/ Kec. Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Surat Rekomendasi Izin Usaha Saprodi	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
11	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 /22.7/ PATEN/ Kec. Tahun 2024 Tentang Surat Keterangan Ahli Waris	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
12	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.7 /22.8/ PATEN / Kec. Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Izin TKI ke Luar Negeri	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
13	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.7 /22.9/ PATEN / Kec. Tahun 2024 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
14	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.7 /22.10/ PATEN/Kec. Tahun 2024 Tentang Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK

15	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.7 /22.11/PATEN/Kec. Tahun 2024 Tentang Penerbitan Akte Kelahiran	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
16	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK

B. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Trantib	Tahun 2022 Kec. Lemahabang	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Trantib	Tahun 2022 Kec. Lemahabang	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 800.22/Kep. 485-Huk/2024 tanggal 11 Oktober Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintah Daerah POLRI dan TNI Karawang Salawasna (Simponi Karasa) Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
4	Surat Keputusan Camat Nomor 800.22 / Kep. 50.1/Kec Tanggal 12 Oktober Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintah Daerah, POLRI Dan TNI Karawang Salawasna (SIMPONI KARASA) Kabupaten Karawang Tahun 2024.	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK

5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Lemahabang	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Tanggal 30 Desember 2022	Kasi Pemerintahan	Tahun 2022 Kecamatan Lemahabang	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Tanggal 30 Desember 2022	Kasi Pemerintahan	Tahun 2022 Kecamatan Lemahabang	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kecamatan Lemahabang	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Majalaya						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Majalaya Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Majalaya (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Majalaya setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Majalaya	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Majalaya	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. LoKasie evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Majalaya	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Majalaya	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Majalaya	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Majalaya	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Majalaya	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Majalaya	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Majalaya	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Majalaya	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Majalaya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Majalaya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Majalaya	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Majalaya	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Majalaya							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa/Kelurahan dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Majalaya Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Majalaya Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Majalaya Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Majalaya Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Majalaya Tahun 2024	Kasie Pelayanan umum	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Majalaya Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Majalaya Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Majalaya Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Majalaya Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Majalaya Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Majalaya Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Majalaya Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Majalaya Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Majalaya Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Majalaya Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Majalaya Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
C.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Majalaya						
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasie Pelayanan umum , Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
D.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Majalaya						
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Sekretaris Camat	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Sekretaris Camat	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Sekretaris Camat	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						

	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tahun 2024	Kasie Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasie Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasie Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasie Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasie Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	b. Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Tahun 2024	Kasie Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						

	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	c. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS

	Indikator Sub Kegiatan:	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	b. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	c. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Mukim Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	a. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	b. Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen Hasil Peresmian Mukim Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Pelantikan Imem Mukim Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	e. Jumlah Sarana dan Prasarana Mukim yang Disediakan Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
5	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial, Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial, Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS

	b. Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial, Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial, Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	d. Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial, Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
6	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	b. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	c. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	d. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	e. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS

	f. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	g. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	h. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	i. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	j. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	k. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	l. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS

	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						

	a. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
	Indikator Program: Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel		Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	b. Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban dan Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	c. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	d. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban dan Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS

	e. Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	f. Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	g. Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	h. Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
E.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	Indikator Program: Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
	e. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS

f. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
g. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
h. Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
i. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
j. Jumlah Dokumen Fasilitasi LoKasie Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
k. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
l. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
m. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
n. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
o. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
p. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
q. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS

	r. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		SS
E.	Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Majalaya						
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
1.	Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
a.	Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 TentangTentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 tanggal 30 Desember tahun 2022.	Kasie Pemerintahan	Tahun 2022 Kec. Majalaya	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 TentangTentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 tanggal 30 Desember tahun 2022.	Kasie Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Majalaya	√	√		BK
3	Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Kasie Pemerintahan	Tahun 2014 Kec. Majalaya	√	√		BK
4	Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang .	Kasie Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Majalaya	√	√		BK
5	Peraturan Bupati karawang nomor 9 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik	Kasie Pelayanan Umum	Tahun 2021 Kec. Majalaya	√	√		BK
6	Surat Perintah Camat Nomor 10 tahun 2024 Tim Pelaksana Gebyar Paten Kecamatan Banyusari	Kasie Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
7	Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2024 Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasie Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
b.	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						

1	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasie Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Majalaya	√	√		BK
2	Permendesa no 2 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa	Kasie Pemerintahan	Tahun 2016 Kec. Majalaya	√	√		BK
2. Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang	Kasie Pemerintahan	Tahun 2008 Kec. Majalaya	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
B. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
1. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 401 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
3	Nota Kesepakatan antara Pemda Karawang dengan Kepolisian Resort Karawang dan Komando Distrik 0604 Karawang tentang Sinergitas Pemerintah daerah. POLRI dan TNI Karawang Selawasna (Simponi Karasa) Kabupaten Karawang	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK
4	Surat Keputusan Camat Banyusari Nomor: 007/1/SP/Kec-2024 Tentang Penunjukkan Personil dalam kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI dan TNI dan Instansi Vertikal	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK

5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Majalaya	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN PAKISJAYA KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Pakisjaya						
	SEKRETARIAT						
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Pakisjaya Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Pakisjaya (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Pakisjaya setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Pakisjaya	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Pakisjaya	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Pakisjaya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Pakisjaya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Pakisjaya							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa/Kelurahan dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pakisjaya Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pakisjaya Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pakisjaya Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pakisjaya Tahun 2024	Sub Bagian Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pakisjaya Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pakisjaya Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pakisjaya Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pakisjaya Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pakisjaya Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pakisjaya Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pakisjaya Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pakisjaya Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pakisjaya Tahun 2024	Sub Bagian Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pakisjaya Tahun 2024	Sub Bagian Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pakisjaya Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pakisjaya Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Pakisjaya							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Sub Bagian Sekretaris Camat	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Sub Bagian Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Pakisjaya							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	b. Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Tahun 2024	Sub Bagian Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Sub Bagian Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS

	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Sub Bagian Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Tahun 2024	Sub Bagian Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Sub Bagian Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2024	Sub Bagian Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tahun 2024	Sub Bagian Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tahun 2024	Sub Bagian Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	c. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2024	Sub Bgaian Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2024	Sub Bagian Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Sub Bagian Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Tahun 2024	Sub Bagian Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	b. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Sub Bagian Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS

	c. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Tahun 2024	Sub Bagian Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun 2024	Sub Bagian Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2024	Sub Bagian Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun 2024	Sub Bagian Tata Usaha (TU)	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Sub Bagian Tata Usaha (TU)	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Sub Bagian Tata Usaha (TU)	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Sub Bagian Tata Usaha (TU)	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
	d. Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Sub Bagian Tata Usaha (TU)	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		SS
E.	Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Pakisjaya						
A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
1	Keputusan Camat Pakisjaya Nomor : 147.42 /Kep.122/2024 Tentang Kelompok Kerja OprasionalPos Pelayanan Terpadu Kecamatan Pakisjaya Tanggal 08 Maret 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
2	Surat Keputusan Camat Pakisjaya Nomor : 800/sk/09/XI/2022 tanggal 01 November 2022 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Prtlindungan Anak Kecamatan Pakisjaya Tahun 2022-2025	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2022Kec. Pakisjaya	√	√		BK

2. Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							
a. Sub Kegiatan: Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							
1	Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PPSBB) secara Proporsional dan adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Kabupaten Karawang	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2020 Kee. Pakisjaya	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Bupati Karwang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
2	Keputusan Camat Pakisjaya Nomor : 463/Kep/04/Kec/2024 tentang Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Evaluasi Kelurahan/Desa							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Desa	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
B. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
1. Kegiatan: Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
a. Sub Kegiatan: Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Desa	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Desa	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa							
1	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Desa	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa	Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pakisjaya	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN PANGKALAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Pangkalan						
SEKETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Pangkalan Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Tirtajaya (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Pangkalan setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Pangkalan	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Pangkalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Pangkalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pangkalan	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pangkalan	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pangkalan	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pangkalan	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pangkalan	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pangkalan	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pangkalan	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Pangkalan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Pangkalan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Pangkalan	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pangkalan	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Pangkalan							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa/Kelurahan dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Tahun 2024	Kasi Trantibum	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Tahun 2024	Kasi Trantibum	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Pangkalan							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Pangkalan							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS

2	Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	c. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	b. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	c. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS

	b. Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	d. Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS

3	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		SS
E. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Pangkalan							
A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
1	Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tentang Lomba Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2014 Kec. Pangkalan	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Pangkalan	√	√		BK
3	Surat Keputusan Camat Nomor 05 Tahun. 2024 Tentang Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							

1	Permendesa No. 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa	Kasi PMD	Tahun 2016 Kec. Pangkalan	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Pangkalan	√	√		BK
2. Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							
1	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Pangkalan	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Pangkalan	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Pangkalan	√	√		BK
2	Surat Keputusan Bupati Nomor 52 Tahun. 2024. Tentang Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK
3	Surat Keputusan Camat Nomor 51 Tahun. 2024 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Kase Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pangkalan	√	√		BK
2. Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							
a. Sub Kegiatan: Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							

1	Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PPSBB) secara Proporsional dan adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Kabupatena Karawang	Kasi Kesejahteraan Sosial (KESSOS)	Tahun 2020 Kec. Pangkalan	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							
1	Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Tersegmentasi Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupatena Karawang	Kasi Kesejahteraan Sosial (KESSOS)	Tahun 2020 Kec. Pangkalan	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN PEDES KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Pedes						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Pedes Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Pedes (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Pedes setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Pedes	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Pedes	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Pedes	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pedes	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pedes	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pedes	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pedes	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pedes	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pedes	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pedes	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Pedes	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Pedes	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Pedes	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Pedes	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Pedes							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa/Kelurahan dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pedes Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pedes Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pedes Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pedes Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pedes Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pedes Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pedes Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pedes Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pedes Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pedes Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pedes Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pedes Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pedes Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pedes Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pedes Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Pedes Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Pedes							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Pedes							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	b. Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Kepala seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kepala seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Tahun 2024	Kepala seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kepala seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS

1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaaan Masyarakat Umum dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Umum dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Umum dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Umum dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakatat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	c. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Tahun 2024	Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS

	b. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	c. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Tahun 2024	Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun 2024	Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2024	Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
			Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Mukim Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	b. Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen Hasil Peresmian Mukim Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Pelantikan Imelum Mukim Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	e. Jumlah Sarana dan Prasarana Mukim yang Disediakan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
5	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS

	d. Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
6	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	b. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	c. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	d. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Tahun 2024	Kasi Kesos/ Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	e. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	f. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS

	g. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	h. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	i. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	j. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	k. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	l. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial/KUA					
			Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial/KUA	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS

D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	Indikator Program: Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	b. Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	c. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	d. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	f. Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Tahun 2024	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS

	g. Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	h. Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
E.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	Indikator Program: Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	e. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	f. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	g. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS

	h. Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	i. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	j. Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	k. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	l. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	m. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	n. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	o. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	p. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	q. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
	r. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		SS
E.	Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Pedes						

A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Pedes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Pedes	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
2. Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							
a. Sub Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Kesos	Tahun 2022 Kec. Pedes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Kesos	Tahun 2022 Kec. Pedes	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
3. Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
a. Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa							
1	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang	Kasi PMD	Tahun 2010 Kec. Pedes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah	Kasi PMD	Tahun 2015 Kec. Pedes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Camat Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Pembentukan TIM MUSRENBANG kec Jayakarta	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK

4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
4. Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							
a. Sub Kegiatan: Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							
1	Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PPSBB) secara Proporsional dan adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Kabupaten Karawang	Kasi kesos	Tahun 2020 Kec. Pedes	√	√		BK
B. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
1. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Trantib	Tahun 2022 Kec. Pedes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Trantib	Tahun 2022 Kec. Pedes	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 800.22/Kep. 485-Huk/2024 tanggal 11 Oktober Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintah Daerah POLRI dan TNI Karawang Salawasna (Simponi Karasa) Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
4	Surat Keputusan Camat Nomor 800.22 / Kep. 50.1/Kec Tanggal 12 Oktober Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintah Daerah, POLRI Dan TNI Karawang Salawasna (SIMPONI KARASA) Kabupaten Karawang Tahun 2024.	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK

5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
C. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
1. Kegiatan: Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
a. Sub Kegiatan: Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Karawang dan peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2016	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2011 Kec. Pedes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang dan Peraturan Bupati Karawang	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2016 Kec. Pedes	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pemerintahan	Tahun 2022 Kec. Pedes	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pemerintahan	Tahun 2022 Kec. Pedes	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Pedes	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN PURWASARI KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Purwasari						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Purwasari Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Purwasari (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Purwasari setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Purwasari	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Purwasari setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Purwasari	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Purwasari	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Purwasari	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Purwasari	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Purwasari	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Purwasari	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Purwasari	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Purwasari	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Purwasari	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Purwasari	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Purwasari	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Purwasari	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Purwasari							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa/Kelurahan dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Purwasari Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Purwasari Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Purwasari Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Purwasari Tahun 2024	kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Purwasari Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Purwasari Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Purwasari Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Purwasari Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Purwasari Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Purwasari Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Purwasari Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Purwasari Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Purwasari Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Purwasari Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Purwasari Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Purwasari Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Purwasari							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Purwasari							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	b. Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS

	b. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tahun 2024	kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Tahun 2024	kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	b. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	c. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS

	d. Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	b. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	c Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	d Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	e. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	f. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS

	g. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	h. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	i. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	j. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan		Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						

	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
	Indikator Program: Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel		Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS

	b. Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	c. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	d. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	f. Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	g. Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	h. Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
E.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	Indikator Program: Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS

	b. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	e. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	f. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	g. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	h. Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	i. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tahun 2024	kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	j. Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	k. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	l. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	m. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS
	n. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		SS

1	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang pelayanan administrasi terpadu kecamatan dilingkungan pemerintah kabupaten karawang	kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Purwasari	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang pelayanan administrasi terpadu kecamatan dilingkungan pemerintah kabupaten karawang	Kasi pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Purwasari	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang pelayanan administrasi terpadu kecamatan dilingkungan pemerintah kabupaten karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Purwasari	√	√		BK
2	Surat Keputusan Camat Nomor 400/ 07/ Kec Tahun 2024 Tentang Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
3	Surat Keputusan Camat Nomor 400/ 17/ Kec Tahun 2024 Tentang Gugus TUgas Kecamatan Layak Anak Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang 2024-2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
3. Kegiatan: Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Tahun 2024 kec. Purwasari	√	√		BK

4. Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							
a. Sub Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Seksi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 kec. Purwasari	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 kec. Purwasari	√	√		BK
5. Kegiatan: Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
a. Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
d. Sub Kegiatan: Evaluasi Kelurahan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
6. Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							
a. Sub Kegiatan: Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							
1	Peraturan Bupati Nomor 440 (Covid-19) / 1605 / Dinkes Tahun 2019 Tentang tindak lanjut pencegahan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten karawang.	Kasi Kesos	Tahun 2019 Kec. Purwasari	√	√		BK

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
g. Sub Kegiatan: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Kesos	Tahun2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
h. Sub Kegiatan: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Kesos	Tahun2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
i. Sub Kegiatan: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. purwasari	√	√		BK
j. Sub Kegiatan: Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Kesos	Tahun 2024 kec. Purwasari	√	√		BK
k. Sub Kegiatan: Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
l. Sub Kegiatan: Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
B. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
1. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
2. Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Seksi Ketrentraman dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
3. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tahun2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
4. Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah							
a. Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Seksi Keteetraman dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
1. Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							
a. Sub Kegiatan: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Seksi Keteentraman dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kepala Seksi Ketertraman dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
d. Sub Kegiatan: Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
e. Sub Kegiatan: Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
f. Sub Kegiatan: Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Trantib	tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
2. Kegiatan: Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
a. Sub Kegiatan: Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
d. Sub Kegiatan: Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
e.Sub Kegiatan: Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK

f. Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
g. Sub Kegiatan: Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
h. Sub Kegiatan: Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
i. Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
j. Sub Kegiatan: Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK
k. Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Purwasari	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN RAWAMERTA KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Rawamerta						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Rawamerta Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Rawamerta (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Rawamerta setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Rawamerta	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Rawamerta	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Rawamerta	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Rawamerta	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Rawamerta	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Rawamerta	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Rawamerta	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Rawamerta	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Rawamerta	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Rawamerta	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Rawamerta	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Rawamerta	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Rawamerta	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Rawamerta	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Rawamerta							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa/Kelurahan dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rawamerta Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rawamerta Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rawamerta Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rawamerta Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Rawamerta Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Rawamerta Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Rawamerta Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Rawamerta Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Rawamerta Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Rawamerta Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Rawamerta Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rawamerta Tahun 2024	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Rawamerta Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Rawamerta Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Rawamerta Tahun 2024	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Rawamerta Tahun 2024	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Rawamerta							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Rawamerta							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	b. Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Tahun 2024	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS

1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	c. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS

	b. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	c. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	b. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	c. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	d. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	e. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS

	f. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	g. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	h. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	i. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	j. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	k. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	l. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS

	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						

	a. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
	Indikator Program: Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	b. Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	c. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	d. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS

	e. Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	f. Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	g. Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	h. Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
E.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	Indikator Program: Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
	e. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS

f. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
g. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
h. Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
i. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
j. Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
k. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
l. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
m. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
n. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
o. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
p. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
q. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS

	r. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		SS
E. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Rawamerta							
A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Rawamerta	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Rawamerta	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang No. 20 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Kab. Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
4	Surat Bupati Karawang Nomor : 510.32 /435/Tapem tanggal 06 Februari Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gebyar Paten Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
5	Surat Keputusan Camat Nomor : 510/Kep. 10/Kec 15 September 2024 tentang Tim Pelayanan Administrasi Terpadu	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
6	Standar Operasional Prosedur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang SOP Pelayanan Administrasi Terpadu PATEN Kecamatan Rawamerta	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Rawamerta	√	√		BK
7	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (PATEN) - Rapat Persiapan, - Kegiatan Sewa Panggung, Sewa Tenda, Mamin Kegiatan, Pembuatan Laporan	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK

2. Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							
a. Sub Kegiatan: PPelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Kesos	Tahun 2022 Kec. Rawamerta	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
B. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
1. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Tahun 2022 Kec. Rawamerta	√	√		BK
2. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Trantib	Tahun 2022 Kec. Rawamerta	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Trantib	Tahun 2022 Kec. Rawamerta	√	√		BK

3	Surat Keputusan Bupati Nomor 800.22/Kep. 485-Huk/2024 tanggal 11 Oktober Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintah Daerah POLRI dan TNI Karawang Salawasna (Simponi Karasa) Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
4	Surat Keputusan Camat Nomor 800.22 / Kep. 50/Kec Tanggal 12 Oktober Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintah Daerah, POLRI Dan TNI Karawang Salawasna (SIMPONI KARASA) Kabupaten Karawang Tahun 2024.	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan						

C. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
1. Kegiatan: Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
a. Sub Kegiatan: Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rawamerta	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN RENGASDENGKLOK KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Rengasdengklok						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Rengasdengklok Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Rengasdengklok (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Rengasdengklok setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Rengasdengklok	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK

	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Rengasdengklok	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Rengasdengklok	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Rengasdengklok	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Rengasdengklok							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa/Kelurahan dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengasdengklok Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengasdengklok Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengasdengklok Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengasdengklok Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengasdengklok Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengasdengklok Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengasdengklok Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengasdengklok Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengasdengklok Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengasdengklok Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengasdengklok Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengasdengklok Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengasdengklok Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengasdengklok Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengasdengklok Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengasdengklok Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Rengasdengklok							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Rengasdengklok							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasubag Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasubag Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	b. Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Tahun 2024	Kasubag Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS

1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	b. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	c. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun 2024	Kasi ketenraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi ketenraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS

	b. Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi ketenraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi ketenraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	d. Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi ketenraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	b. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	c. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	d. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	e. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS

	f. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	g. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	h. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	i. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	j. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	k. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	l. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS

	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						

	a. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
	Indikator Program: Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel		Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	b. Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	c. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	d. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS

	e. Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	f. Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	g. Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	h. Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tahun 2024	Kasubag Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
E.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	Indikator Program: Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
	e. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS

f. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
g. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
h. Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
i. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
j. Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
k. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
l. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
m. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
n. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
o. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
p. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
q. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS

	r. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok	√	√		SS
E.	Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Rengasdengklok						
A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
1	Standar Operasional Prosedur Nomor 188.45 /Kec/2022 Tentang Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) SKPD	Kasubag Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2022 Kec. Rengasdengklok				BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Kasubag Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok				BK
3	Standar Operasional Prosedur Nomor 10/Kec/2022 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Kasubag Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2022 Kec. Rengasdengklok				BK
b. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok				BK
c. Sub Kegiatan: Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok				BK
d. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok				BK
B. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
1. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
1	Surat Keputusan Camat Nomor 800.22/Kep. 244/Camat/2024Tentang Tim Sinergitas Pemerintah Kecamatan Rengasdengklok, Polsek Rengasdengklok, Koramil Rengasdengklok Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok				BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan						
C. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							

1. Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Rengasdengklok				BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Tegalwaru						
	SEKRETARIAT						
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Tegalwaru Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Tegalwaru (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Tegalwaru setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Tegalwaru	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Tegalwaru	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Tegalwaru	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Tegalwaru	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Pangkalan							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa/Kelurahan dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tegalwaru Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tegalwaru Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tegalwaru Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tegalwaru Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tegalwaru Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tegalwaru Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tegalwaru Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tegalwaru Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tegalwaru Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tegalwaru Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tegalwaru Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tegalwaru Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tegalwaru Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tegalwaru Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tegalwaru Tahun 2024	Kasi Trantibum	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tegalwaru Tahun 2024	Kasi Trantibum	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Tegalwaru							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Tegalwaru							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	b. Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Tahun 2024	Kasie Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS

1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	c. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS

	b. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	c. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Mukim Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	a. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	b. Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen Hasil Peresmian Mukim Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	e. Jumlah Sarana dan Prasarana Mukim yang Disediakan Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
5	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS

	b. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	c. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	d. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	e. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	f. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	g. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	h. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	i. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	j. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS

	k. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	l. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Tahun 2024	Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS

3	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
	Indikator Program: Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel		Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						

	a. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	b. Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban dan Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	c. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	d. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban dan Kasie Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	f. Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	g. Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	h. Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
E.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	Indikator Program: Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS

1	Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tahun 2024	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	e. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	f. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	g. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	h. Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	i. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	j. Jumlah Dokumen Fasilitasi LoKasie Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	k. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS

	l. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	m. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	n. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	o. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	p. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	q. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS
	r. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		SS

E. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Tegalwaru

A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 tanggal 30 Desember tahun 2022.	Kasie Pemerintahan	Tahun 2022 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 tanggal 30 Desember tahun 2022.	Kasie Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
3	Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Kasie Pemerintahan	Tahun 2014 Kec. Tegalwaru	√	√		BK

4	Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang .	Kasie Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
5	Peraturan Bupati karawang nomor 9 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik	Kasie Pelayanan Umum	Tahun 2021 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
6	Surat Perintah Camat Nomor 10 tahun 2024 Tim Pelaksana Gebyar Paten Kecamatan Tegalwaru	Kasie Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
7	Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2024 Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasie Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
1	Permendesa No. 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa	Kasi PMD	Tahun 2016 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
2. Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang	Kasie Pemerintahan	Tahun 2008 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Kasie Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
B. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
1. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							

1	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 401 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
3	Nota Kesepakatan antara Pemda Karawang dengan Kepolisian Resort Karawang dan Komando Distrik 0604 Karawang tentang Sinergitas Pemerintah daerah. POLRI dan TNI Karawang Selawasna (Simponi Karasa) Kabupaten Karawang	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
4	Surat Keputusan Camat Tegalwaru Nomor: 007/1/SP/Kec-2024 Tentang Penunjukkan Personil dalam kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI dan TNI dan Instansi Vertikal	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tegalwaru	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Telagasari						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Telagasari Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Telagasari (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Telagasari setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Telagasari	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Telagasari	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas :	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
	a. Pengamatan gejala bencana						
	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Telagasari	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telagasari	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telagasari	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telagasari	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telagasari	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telagasari	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telagasari	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telagasari	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Telagasari	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Telagasari	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Telagasari	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telagasari	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Telagasari							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa/Kelurahan dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Telagasari Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Telagasari Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Telagasari Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Telagasari Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telagasari Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telagasari Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telagasari Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telagasari Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telagasari Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telagasari Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telagasari Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Telagasari Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telagasari Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telagasari Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telagasari Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telagasari Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Telagasari							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Telagasari							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	b. Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS

1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	c. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS

	b. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	c. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Mukim Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	b. Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen Hasil Peresmian Mukim Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Pelantikan Imelum Mukim Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	e. Jumlah Sarana dan Prasarana Mukim yang Disediakan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
5	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	d. Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS

6	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	b. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	c. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	d. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	e. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	f. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS

	g. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	h. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	i. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	j. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	k. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	l. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						

	Indikator Program: Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	b. Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	c. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	d. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	f. Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS

	g. Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	h. Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
E.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	Indikator Program: Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	e. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	f. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	g. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS

	h. Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	i. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	j. Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	k. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	l. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	m. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	n. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	o. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	p. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	q. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS
	r. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		SS

E.	Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Telagasari

A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Telagasari	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Telagasari	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang No. 20 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Kab. Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
4	Surat Bupati Karawang Nomor : 510.32 /435/Tapem tanggal 06 Februari Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gebyar Paten Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
5	Surat Keputusan Camat Nomor : 510/Kep. 10/Kec 15 September 2024 tentang Tim Pelayanan Administrasi Terpadu	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
6	Standar Operasional Prosedur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang SOP Pelayanan Administrasi Terpadu PATEN Kecamatan Telagasari	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Telagasari	√	√		BK
7	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (PATEN) - Rapat Persiapan, - Kegiatan Sewa Panggung, Sewa Tenda, Mamin Kegiatan, Pembuatan Laporan	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
1	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Telagasari	√	√		BK

2	Surat Keputusan Camat Nomor 138/ /Kec Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Telagasari	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
3	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 / 01/Kec Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 / 02/Kec Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Pendirian PAUD/TK, SD, SLTP dan SLTA Sederajat	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
5	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 /03/Kec Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Usaha Sektor Formal, Non Formal Di Bidang Perindagsar	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
6	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 /04/Kec Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Izin Pemotongan Unggas	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
7	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 /05/Kec Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Izin Usaha Bidang Peternakan, Perikanan Dan Pertanian Dan Tanaman Pangan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
8	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 /06Kec Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Izin Usaha Saprodi	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
9	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 /07/Kec Tahun 2024 Tentang Surat Keterangan Ahli Waris	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
10	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.7 /08Kec Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Izin TKI ke Luar Negeri	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
11	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.7 /09/Kec Tahun 2024 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
12	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.7 /10/Kec Tahun 2024 Tentang Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Kasi Pelayanan umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK

13	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.7 /11/Kec Tahun 2024 Tentang Surat Pengantar Penerbitan Keterangan Pindah Antar Kecamatan	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
14	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.712/Kec Tahun 2024 Tentang Penerbitan Akta Kelahiran	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
15	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
2. Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2022 Kec. Telagasari	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2022 Kec. Telagasari	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2022 Kec. Telagasari	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2022 Kec. Telagasari	√	√		BK

3	Surat Keputusan Bupati Nomor 800.22/Kep. 485-Huk/2024 tanggal 11 Oktober Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintah Daerah POLRI dan TNI Karawang Salawasna (Simponi Karasa) Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
4	Surat Keputusan Camat Nomor 800 / Kep. /Kec Tanggal 12 Oktober Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintah Daerah, POLRI Dan TNI Karawang Salawasna (SIMPONI KARASA) Kabupaten Karawang Tahun 2024.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK

c. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

1	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Paten	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Telagasari	√	√		BK
2	Surat Keputusan Camat Nomor 400.2.4/Kep. 22 Tahun 2024 Tentang Gugus Tugas Layak Anak Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
3	Surat Keputusan Camat Nomor 400.2.4/Kep. 22 Tahun 2024 Tentang Gugus Tugas Layak Anak Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK

3. Kegiatan: Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK

b. Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
4. Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							
a. Sub Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
5. Kegiatan: Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							
a. Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
d. Sub Kegiatan: Evaluasi Kelurahan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
e. Sub Kegiatan: Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
B. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
1. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
2. Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
3. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
1. Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							
a. Sub Kegiatan: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
d. Sub Kegiatan: Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
e. Sub Kegiatan: Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
f. Sub Kegiatan: Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
g. Sub Kegiatan: Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
h. Sub Kegiatan: Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
i. Sub Kegiatan: Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK
j. Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan							
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Telagasari	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Telukjambe Barat						
SEKETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Telukjambe Barat Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Tirtajaya (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Telukjambe Barat setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Telukjambe Barat	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK

	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Telukjambe Barat	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Telukjambe Barat	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Telukjambe Barat	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Telukjambe Barat							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa/Kelurahan dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Barat Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Barat Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Barat Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Barat Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Barat Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Barat Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Barat Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Barat Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Barat Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Barat Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Barat Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Barat Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Barat Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Barat Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Barat Tahun 2024	Kasi Trantibum	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Barat Tahun 2024	Kasi Trantibum	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Telukjambe Barat							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Telukjambe Barat							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS

2	Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	c. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	b. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	c. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS

	b. Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	d. Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS

3	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		SS
E. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Telukjambe Timur							
A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
1	Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tentang Lomba Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2014 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
3	Surat Keputusan Camat Nomor 05 Tahun. 2024 Tentang Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							

1	Permendesa No. 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa	Kasi PMD	Tahun 2016 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
2. Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
a. Sub Kegiatan: Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							
1	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
2	Surat Keputusan Bupati Nomor 52 Tahun. 2024. Tentang Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
3	Surat Keputusan Camat Nomor 51 Tahun. 2024 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Kase Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
2. Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							
a. Sub Kegiatan: Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							

1	Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PPSBB) secara Proporsional dan adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Kabupatena Karawang	Kasi Kesejahteraan Sosial (KESSOS)	Tahun 2020 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							
1	Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Tersegmentasi Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupatena Karawang	Kasi Kesejahteraan Sosial (KESSOS)	Tahun 2020 Kec. Telukjambe Barat	√	√		BK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Telukjambe Timur						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Telukjambe Timur Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Telukjambe Timur (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Telukjambe Timur setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Telukjambe Timur	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK

	d. Peringatan bencana						
	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Telukjambe Timur	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Telukjambe Timur	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Telukjambe Timur	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Telukjambe Timur							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa/Kelurahan dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Timur Tahun 2024	Kasi pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Timur Tahun 2024	Kasi pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Timur Tahun 2024	Kasi pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Timur Tahun 2024	Kasi pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Timur Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Timur Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Timur Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Timur Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Timur Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Timur Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Timur Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Timur Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Timur Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Timur Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Timur Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Telukjambe Timur Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Telukjambe Timur							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Telukjambe Timur							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Kasubag UPP	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kasubag UPP	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasubag UPP	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	b. Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Kasi Kemanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasi Kemanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Tahun 2024	Kasi Kemanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kasi Kemanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS

1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	c. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS

	b. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	c. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	d. Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan		Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
D	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						

	Indikator Program: Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
1	Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	e. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	f. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	g. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	h. Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	i. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	j. Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS

	k. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	l. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	m. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	n. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	o. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	p. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	q. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS
	r. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		SS

E.	Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Telukjambe Timur

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a. Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

1	KAK Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK

2. Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

a. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

1	KAK Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
1. Kegiatan: Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
a. Sub Kegiatan: Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							
1	KAK Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
1	KAK Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan							
1	KAK Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
F. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
a. Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
1	KAK Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubag Umum, Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
1	KAK Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja Perangkat Daerah	Kasubag Umum, Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
2. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
a. Sub Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1	KAK Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubag Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
3. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah							
a. Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
1	KAK Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kasubag Umum, Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
1	KAK Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kasubag Umum, Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK

c. Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
1	KAK Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kasubag Umum, Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
d. Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
1	KAK Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kasubag Umum, Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
e. Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
1	KAK Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kasubag Umum, Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
f. Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
1	KAK Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kasubag Umum, Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
g. Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu							
1	KAK Fasilitas Kunjungan Tamu	Kasubag Umum, Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
4. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
a. Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
1	KAK Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kasubag Umum, Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
1	KAK Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kasubag Umum, Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
1	KAK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kasubag Umum, Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
5. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
a. Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
1	KAK Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kasubag Umum, Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
1	KAK Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kasubag Umum, Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
1	KAK Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kasubag Umum, Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Telukjambe Timur	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Tempuran						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS

3	Informasi tentang profil Kecamatan Tempuran Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
	Daftar Pegawai Kecamatan Tempuran (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
	Agenda Kerja Camat Kecamatan Tempuran setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Tempuran	√	√		BK
	Agenda Kerja Camat Kecamatan Tempuran	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
4	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		
	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
5	b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana						
	c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang						
	d. Peringatan bencana						

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
6	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
	Agenda surat Kecamatan Tempuran	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tempuran	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tempuran	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tempuran	√	√		BK
1	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tempuran	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tempuran	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tempuran	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tempuran	√	√		BK
	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Tempuran	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
2	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Tempuran	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Tempuran	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tempuran	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Tempuran							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa/Kelurahan dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tempuran Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tempuran Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tempuran Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tempuran Tahun 2024	kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tempuran Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tempuran Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tempuran Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tempuran Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tempuran Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tempuran Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tempuran Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tempuran Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tempuran Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tempuran Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tempuran Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan dan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tempuran Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
C.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Tempuran						
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
D.	Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Tempuran						
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						

	a. Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Tempuran				
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Tempuran	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2022 Kec. Tempuran	√	√		BK
3	Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Adminitrasi Terpadu Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Tempuran	√	√		BK
4	Surat Keputusan Camat Nomor 138/ 30 / Kec. Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Paten Di Kecamatan Tempuran Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
5	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 /22.1/ PATEN /Kec. Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
6	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 / 22.2 / PATEN /Kec. Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Penerbitan PendirianPAUD/TK, SD,SLTP dan SLTA Sederajat	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
7	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 /22.3/ PATEN /Kec. Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Usaha Sektor Formal, Non Formal Di Bidang Perindagasar	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
8	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 /22.4/ PATEN /Kec. Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Surat Rekomendasi Izin Pemotongan Unggas yang bersifat Komersial	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
9	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 /22.5/PATEN Kec. Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Surat Rekomendasi Izin Usaha Bidang Peternakan, Perikanan Dan Pertanian Dan Tanaman Pangan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK

10	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 /22.6/PATEN/ Kec. Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Surat Rekomendasi Izin Usaha Saprodi	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
11	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 /22.7/ PATEN/Kec. Tahun 2024 Tentang Surat Keterangan Ahli Waris	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
12	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.7 /22.8/ PATEN / Kec. Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Izin TKI ke Luar Negeri	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
13	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.7 /22.9/ PATEN / Kec. Tahun 2024 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
14	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.7 /22.10/ PATEN/Kec. Tahun 2024 Tentang Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
15	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.7 /22.11/PATEN/Kec. Tahun 2024 Tentang Penerbitan Akte Kelahiran	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
16	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan: Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK

B. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Trantib	Tahun 2022 Kec. Tempuran	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Trantib	Tahun 2022 Kec. Tempuran	√	√		BK

3	Surat Keputusan Bupati Nomor 800.22/Kep. 485-Huk/2024 tanggal 11 Oktober Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintah Daerah POLRI dan TNI Karawang Salawasna (Simponi Karasa) Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
4	Surat Keputusan Camat Nomor 800.22 / Kep. 50.1/Kec Tanggal 12 Oktober Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintah Daerah, POLRI Dan TNI Karawang Salawasna (SIMPONI KARASA) Kabupaten Karawang Tahun 2024.	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Tempuran	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Tanggal 30 Desember 2022	Kasi Pemerintahan	Tahun 2022 Kecamatan Tempuran	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Tanggal 30 Desember 2022	Kasi Pemerintahan	Tahun 2022 Kecamatan Tempuran	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kecamatan Tempuran	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN TIRTAJAYA KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Tirtajaya						
	SEKETARIAT						
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Tirtajaya Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Tirtajaya (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Tirtajaya setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Tirtajaya	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Tirtajaya	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Tirtajaya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Tirtajaya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Tirtajaya							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa/Kelurahan dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtajaya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtajaya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtajaya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtajaya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtajaya Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtajaya Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtajaya Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtajaya Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtajaya Tahun 2024	kasi trantib	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtajaya Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtajaya Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtajaya Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtajaya Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtajaya Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masysrakat Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtajaya Tahun 2024	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtajaya Tahun 2024	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Tirtajaya							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Tirtajaya							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tahun 2024	Kasi Pemerintahan & Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS

	b. Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	b. Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Kasi Kemanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasi Kemanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Tahun 2024	Kasi Kemanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kasi Kemanan dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS

1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	c. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa		√	√		SS
	c. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS

	b. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	c. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	d. Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	d. Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
5	Indikator Kegiatan: Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS

b. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
c. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
d. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
e. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
f. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
g. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
h. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
i. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
j. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS

C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
3	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2024	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS

4	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
	Indikator Program: Presentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan secara Transparan dan Akuntabel	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Tahun 2024	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2024	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	b. Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Tahun 2024	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	c. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun 2024	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS

	d. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Tahun 2024	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	e. Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	f. Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Tahun 2024	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	g. Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	h. Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum (Yanum)	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
E.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	Indikator Program: Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	b. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
	c. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS

d. Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
e. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
f. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
g. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
h. Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
i. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
j. Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
k. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Keamanan dan Ketertiban Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
l. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
m. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tahun 2024	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
n. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS
o. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		SS

1	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
c. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
1	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
2	Surat Keputusan Bupati Nomor 52 Tahun. 2024. Tentang Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
3	Surat Keputusan Camat Nomor 51 Tahun. 2024 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Kase Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
3. Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							
a. Sub Kegiatan: Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							
1	Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PPSBB) secara Proporsional dan adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Kabupaten Karawang	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2020 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
b. Sub Kegiatan: Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							
1	Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Tersegmentasi Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Karawang	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2020 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
3. Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
a. Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa							
1	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2010 Kec. Tirtajaya	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2015 Kec. Tirtajaya	√	√		BK
3	Surat Keputusan Camat Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Pembentukan TIM MUSRENBANG kec Jayakarta	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tahun 2024 Kec. Tirtajaya	√	√		BK

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN TIRTAMULYA KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL		
A.	Daftar Data Keuangan, Kepegawaian, Program dan Pelaporan Pada Kecamatan Tirtamulya						
SEKRETARIAT							
1	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit						
	a. Laporan Realisasi Anggaran 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
	b. Neraca 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
	c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai standar akuntansi 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
2	Laporan Perubahan Ekuitas 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
3	Laporan Operasional 2024	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
4	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dokumen/informasi yang tersedia di website www.sirup.lkpp.go.id website www.lpse.karawangkab.go.id serta website e-katalog.lkpp.go.id	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
5	Data perbendaharaan dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS

1	Informasi tentang profil Kecamatan Tirtamulya Kab Karawang, terdiri atas : a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan d. Tugas dan fungsi e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga f. Struktur organisasi g. Gambaran umum h. Profil singkat pejabat struktural i. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, di verifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi pemberantasan korupsi untuk diumumkan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
2	Daftar Pegawai Kecamatan Tirtamulya (ASN dan Non ASN)	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
3	Agenda Kerja Camat Kecamatan Tirtamulya setiap bulan pada tahun berjalan	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2025 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
4	Agenda Kerja Camat Kecamatan Tirtamulya	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
5	Daftar Aset dan Inventaris	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
6	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik, terdiri atas : a. Tata cara memperoleh informasi publik b. Tata cara pengaduan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		
7	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat, terdiri atas : a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK

	e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat						
	f. Lokasi evakuasi						
	g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi						
8	Informasi tata cara menyikapi berita hoax	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
9	Agenda surat Kecamatan Tirtamulya	Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/ atau Kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
	2. Ringkasan Anggaran dan Sub Kegiatan 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
	3. Rencana Kerja Tahun 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
	4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
	5. Perjanjian Kinerja 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
	6. Anggaran Kas 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
2	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Kecamatan Tirtamulya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
	1. Laporan Penilaian Kinerja (LAKIP) 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
	2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
	3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK

3	Laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas, terdiri atas : a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
4	Laporan informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Publik, terdiri atas : a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat Badan Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
5	Daftar serta Hasil Penelitian Kecamatan Tirtamulya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
6	Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2021 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
7	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2025 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
8	Daftar Perjanjian Kerjasama	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
9	Peraturan perundang - undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK

10	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, terdiri atas a. Dokumen pendukung b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk c. Risalah Rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk d. Rancangan Peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk e. Tahap perumusan Peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk f. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
11	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang - undangan, keputusan, dan/ atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub Bagian Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
B. Daftar Data Statistik Sektoral Pada Kecamatan Tirtamulya							
1	Nama Kepala Desa/Lurah dan Tingkat Pendidikannya, Luas Desa/Kelurahan dan Jarak Tempuh ke Kantor Kecamatan dan Jarak Tempuh ke Kantor Bupati menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtamulya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
2	Banyaknya Dusun, RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtamulya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
3	Banyaknya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtamulya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
4	Batas wilayah administrasi menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtamulya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS

5	Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan penduduk berdasarkan jenis kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtamulya Tahun 2024	kasi Yanum	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
6	Jumlah Sarana Pendidikan menurut jenjang pendidikan per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtamulya Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
7	Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtamulya Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
8	Jumlah Sarana Peribadatan/Keagamaan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtamulya Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
9	Banyaknya sarana hiburan dan olahraga menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtamulya Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
10	Jumlah sarana usaha perdagangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtamulya Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
11	Jumlah Kantor Lembaga Keuangan menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtamulya Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
12	Jumlah Lokasi Objek Wisata, Hotel/Penginapan dan Restaurant/Rumah Makan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtamulya Tahun 2024	Kasi Kesos	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
13	Luas lahan sawah, hasil panen padi dalam setahun, rata-rata hasil panen, banyaknya mesin pengering padi (oven) dan banyaknya penggilingan beras (huller) per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtamulya Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
14	Besarnya bantuan keuangan untuk pembangunan Desa menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtamulya Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
15	Banyaknya kejadian bencana menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtamulya Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS

16	Banyaknya kejadian gangguan kamtibmas menurut jenisnya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirtamulya Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
C. Daftar Data Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Tirtamulya							
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Kasubag Umum Program dan Pelaporan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
2	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
D. Daftar Data Berdasarkan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Serta Indikator Sub Kegiatan Pada Kecamatan Tirtamulya							
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
	Indikator Program: Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024		Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Berjalan Dengan Baik Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
2	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2024	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
	Indikator Program: Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS

1.	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
	b. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
C.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum						
	Indikator Program: Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2024	Kasi Trantib	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
D.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
	Indikator Program: Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
1	Indikator Kegiatan: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
	Indikator Sub Kegiatan:						

	a. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2024	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		SS
E. Daftar Produk Hukum Berdasarkan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Pada Kecamatan Tirtamulya							
A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1. Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
b. Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
1	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Pelayanan Perizinan Terpadu Tanggal 28 Desember 2012	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2012 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2014 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
3	Surat Keputusan Camat Nomor 470 / Kep. 6 /Kec Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Tirtamulya	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
4	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 / 123.1/Kec Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
5	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 / 123.2/Kec Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Pendirian PAUD/TK, SD, SLTP dan SLTA Sederajat	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
6	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 / 123.3 /Kec Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Usaha Sektor Formal, Non Formal Di Bidang Perindagsar	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
7	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 / 123.4 /Kec Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Izin Pemotongan Unggas	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK

8	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 / 125.5 /Kec Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Izin Usaha Bidang Peternakan, Perikanan Dan Pertanian Dan Tanaman Pangan	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
9	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 / 125.6 /Kec Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Izin Usaha Saprodi	Kasi PMD	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
10	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 / 125.7 /Kec Tahun 2024 Tentang Surat Keterangan Ahli Waris	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
11	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 / 125.8 /Kec Tahun 2024 Tentang Rekomendasi Izin TKI ke Luar Negeri	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
12	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 / 125.9 /Kec Tahun 2024 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
13	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 / 123.10 /Kec Tahun 2024 Tentang Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Kasi Pelayanan umum	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
14	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 / 123.11 /Kec Tahun 2024 Tentang Surat Pengantar Penerbitan Keterangan Pindah Antar Kecamatan	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
15	Standar Operasional Prosedur Nomor 100.3.6 / 123.12 /Kec Tahun 2024 Tentang Penerbitan Akta Kelahiran	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
16	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kasi Pelayanan Umum	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK

2. Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

a. Sub Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2022 Kec. Tirtamulya	√	√		BK

2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2022 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kasi Kesejahteraan Sosial	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK

B. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2022 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2022 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
3	Surat Keputusan Bupati Nomor 800.22/Kep. 485-Huk/2024 tanggal 11 Oktober Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintah Daerah POLRI dan TNI Karawang Salawasna (Simponi Karasa) Kabupaten Karawang Tahun 2024	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
4	Surat Keputusan Camat Nomor 800 / Kep. 7 /Kec Tanggal 12 Oktober Tahun 2024 Tentang Tim Sinergitas Pemerintah Daerah, POLRI Dan TNI Karawang Salawasna (SIMPONI KARASA) Kabupaten Karawang Tahun 2024.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
5	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK

C. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**1. Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa****a. Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa**

1	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pemerintahan	Tahun 2022 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
2	Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember Tahun 2022	Kasi Pemerintahan	Tahun 2022 Kec. Tirtamulya	√	√		BK
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kasi Pemerintahan	Tahun 2024 Kec. Tirtamulya	√	√		BK

